

**KONDISI SOSIAL POLITIK INDONESIA PADA MASA PEMERINTAHAN
KABINET BURHANUDDIN HARAHAP 1955-1956**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Yogyakarta Untuk
Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan**



Oleh:

Yuli Ernawati

10406244011

**JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2014**

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul “ Kondisi Sosial Politik Indonesia Pada Masa Pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap 1955-1956” ini disetujui oleh pembimbing untuk diujikan.



Pembimbing

Dr. Aman, M.Pd

NIP. 19741015 200312 1 001

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Kondisi Sosial Politik Indonesia Pada Masa Pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap 1955-1956” telah dipertahankan di depan Dewan Penguji skripsi 10 Oktober 2014 dan dinyatakan telah memenuhi syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan.

DEWAN PENGUJI

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Terry Irenewaty, M.Hum	Ketua Penguji		20 Oktober 2014
Dr. Aman, M. Pd	Sekretaris		20 Oktober 2014
Hj. Harianti, M.Pd	Penguji Utama		20 Oktober 2014

Yogyakarta, 20 Oktober 2014
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Yogyakarta


Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M. Ag
NIP. 19620321 198903 1 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Yuli Ernawati

NIM : 10406244011

Jurusan : Pendidikan Sejarah

Fakultas : Ilmu Sosial

Judul : Kondisi Sosial Politik Indonesia Pada Masa Pemerintahan
Kabinet Burhannudin Harahap 1955-1956.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil pekerjaan saya sendiri dan sepanjang sepengetahuan saya tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain atau telah digunakan sebagai persyaratan studi di Perguruan Tinggi lain, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang saya ambil sebagai acuan dengan mengikuti kaidah penulisan yang lazim.

Apabila ternyata pernyataan ini terbukti tidak benar, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Yogyakarta, September 2014

Yang menyatakan



(Yuli Ernawati)

HALAMAN MOTTO

“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua”

(Aristoteles)

“Tuhan tidak pernah menciptakan produk gagal, tetapi adalah hal bodoh jika Tuhan menciptakan produk yang sesempurna-NYA”

(Film Comic 8)

"Tuhan bukan pesulap yang memperkaya kita tanpa adanya usaha dan kerja keras"

(Penulis)

“Jangan takut untuk mencoba hal baru dalam hidupmu. Jika berhasil, kamu akan bahagia.
Jika tidak, kamu akan lebih bijaksana”

(Penulis)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan khusus untuk:

Ayah dan Ibu tercinta, Supangat (Alm) dan Yarti yang telah membesarkan dan merawat saya dengan penuh kasih sayang , yang telah membimbing dan mendidik saya dengan sabar dan ikhlas, yang selalu mengirimkan do'a tanpa henti, yang selalu mendukung dan menguatkan saya, yang telah memberikan seluruh hidupnya untuk anak-anaknya. Terimakasih banyak atas segala yang Ayah dan Ibu berikan, semoga Allah SWT membalas kebaikan Ayah dan Ibu dengan kebaikan yang berlipat ganda.

KONDISI SOSIAL POLITIK INDONESIA PADA MASA PEMERINTAHAN KABINET BURHANUDDIN HARAHAP 1955-1956

Oleh
Yuli Ernawati
10406244011

ABSTRAK

Kabinet Burhanuddin Harahap merupakan Kabinet kelima pada masa demokrasi parlementer di Indonesia. Penelitian ini bertujuan; 1) Mengetahui proses terbentuknya Kabinet Burhanuddin Harahap; 2) Mengetahui program kerja Kabinet Burhanuddin Harahap dan pelaksanaannya; 3) Mengetahui kondisi sosial politik Indonesia masa Kabinet Burhanuddin Harahap dan 4) Mengetahui akhir pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap.

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian sejarah yang terdiri dari lima tahapan. Tahapan pertama adalah penentuan topik. Berikutnya adalah pengumpulan sumber (*heuristic*) baik berupa sumber primer maupun sumber sekunder. Ketiga adalah verifikasi, yang berupa kritik ekstern maupun intern terhadap sumber-sumber yang diperoleh. Selanjutnya adalah interpretasi, yaitu proses penafsiran terhadap fakta-fakta sejarah yang telah ditemukan. Tahapan terakhir adalah Historiografi atau penulisan sejarah, peneliti harus menyusun fakta-fakta sejarah yang diperoleh dan disajikan menjadi cerita sejarah yang tersusun secara kronologis.

Hasil penelitian ini berisi tentang kondisi sosial politik Indonesia masa pemerintahan kabinet Burhanuddin Harahap, diantaranya; 1) Kabinet Burhanuddin terbentuk setelah jatuhnya Kabinet Ali Sastroamidjoyo I yang tersandung peristiwa Angkatan Darat 27 Juni 1955. Kabinet Burhanuddin Harahap merupakan kabinet koalisi yang terdiri dari beberapa partai; 2) Program kerja pemerintahan Kabinet Burhanuddin berusaha menstabilkan keadaan sosial, politik dan ekonomi negara yang pada saat itu masih labil; 3) Burhanuddin Harahap berhasil mengembalikan wibawa pemerintah terhadap Angkatan Darat dan masyarakat, berhasil mengatasi korupsi, mengadakan perbaikan ekonomi, serta berhasil menyelenggarakan pemilu. Keberhasilan program kabinet Burhanuddin Harahap masih jauh dari yang diharapkan. Dalam hubungan Indonesia Belanda, telah menyebabkan terjadinya perpecahan dalam tubuh Masyumi serta partai-partai Islam lainnya; 4) Akhirnya Kabinet demisioner setelah gagal menyelesaikan pembatalan perjanjian KMB dan hasil pemungutan suara itu diumumkan.

Kata Kunci : Kondisi Sosial Politik, Kabinet Burhanuddin Harahap, 1955-1956.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dan Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat hidayatNya, penelitian sebagai tugas akhir yang berjudul “ Kondisi Sosial Politik Indonesia pada Masa Pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap 1955-1956” ini dapat diselesaikan dengan baik. Keberhasilan penelitian dan penulisan laporan ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, saran dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis berbesar hati untuk menyampaikan banyak ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Rochmat Wahab, M. Pd., MA selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan fasilitas dan kemudahan dalam penelitian ini.
2. Bapak Prof. Ajat Sudrajat M. Ag selaku Dekan FIS UNY yang mempermudah perijinan dalam penelitian ini.
3. Bapak M. Nur Rokhman, M.Pd selaku Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah, terima kasih telah memberikan saran dan nasihat dalam membantu penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Zulkarnain, M.Pd selaku Penasehat akademik Pendidikan Sejarah NR 2010, terimakasih telah memberikan bimbingan dan nasehat dalam membantu penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Aman, M. Pd, selaku pembimbing skripsi , terimakasih banyak atas bimbingan, saran, dan masukan untuk penulisan skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini berjalan dengan baik.
6. Bapak/ibu dosen Pendidikan Sejarah UNY yang dengan sabar mendidik dan membagikan ilmu kepada kami para mahasiswa.
7. Seluruh Staf Karyawan Jurusan Pendidikan Sejarah UNY, Perpustakaan St. Ignatius, Perpustakaan Fisipol UGM, Perpustakaan Nasional RI, Perpustakaan FIS UNY,

Perpustakaan Lab. Sejarah, Perpustakaan UNY, Jogja Library Center dan Staff ANRI yang telah mempermudah proses penyusunan skripsi ini.

8. Kedua Orang Tua Bapak Supangat (Alm) dan Ibu Yarti yang telah memberikan segalanya, kakak-kakakku beserta istrinya Jatmiko dan Suhartanto yang setia menghibur, dan membuatku semangat dalam mengerjakan skripsi ini juga keponakan-keponakanku yang tersayang (Chesza Aulia Arendi, Ajeng Titis Asmorojati, Faidza Allea Arendi) terimakasih atas senyum dan kelucuan yang kalian berikan.
9. Keluarga kedua, Ibu Esty dan Bapak Kistiono Munandar serta adek-adek (Bima, Mahadilla, Maharani, Arkan dan Zul) yang telah memberikan banyak bantuan, bimbingan, nasihat serta semangat dalam segala hal.
10. Sahabat-sahabat terkasih Winda Prasetyaning Adhi S.Pd, Ria Jumaria S.Pd, Apri Septika S.Pd, Dewi Santyaningsih S.Pd, Bripda Arif Fitra Naviri, Catur Yudi Setyawan S.Pd, Laili Hasanah, Fendy, Yayah, Primandhita, Maya, dan Aya yang selalu siap direpotkan dan telah senantiasa membimbing serta menemani dalam suka dan duka.
11. Teman-teman seperjuangan Sitoremi Dyah Santika S.Pd, Syella Joe S.Pd, Aris Wahyudi dan Dhani Kurniawan selama proses penelitian di Jakarta.
12. Angga Tegar Prahara, S.H yang selalu memberikan saran, mendukung, menemani, dengan penuh perhatian.
13. Khairul Anam, S.Pd, Wasis Wijayanto S.Pd, dan Moh. Habib Asyhad S.s yang telah banyak memberi bimbingan, nasihat, dan masukan dalam menyempurnakan skripsi ini.
14. Keluarga besar Pendidikan Sejarah Non Reguler 2010, terimakasih telah menjadi keluarga dan rumah baru bagi saya. Semua yang telah kita lewati memberikan pelajaran dan warna baru dalam kehidupan saya.
15. Keluarga KKN-PPL SMA N 1 Tempel yang telah menjadi tempat berbagi segala hal.
16. Teman-teman Pendidikan Sejarah R 2010 yang senantiasa membantu.

17. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu, sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik dan lancar.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari hasil penelitian skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun kearah penyempurnaan penelitian ini, penulis terima dengan tangan terbuka. Semoga karya ini bermanfaat bagi pembaca, amien.

Yogyakarta, September 2014

Penyusun

Yuli Ernawati

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB IPENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Historiografi yang Relevan	14
G. Metode Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	16
1. Metode Penulisan.....	16
a. Pemilihan Topik.....	17
b. Heuristik (Pengumpulan Sumber)	17
c. Verifikasi (Kritik Sumber).....	20
d. Interpretasi (Analisis Sumber)	22
e. Historiografi (Penulisan).....	22
2. Pendekatan Penelitian	24
H. Sistematika Pembahasan	24
BAB II TERBENTUKNYA KABINET BURHANUDDIN HARAHAH	27
A. Latar Belakang Kehidupan Burhanuddin Harahap.....	27
B. Proses Terbentuknya Kabinet Burhanuddin Harahap.....	32
C. Susunan Kabinet Burhanuddin Harahap.....	38
BAB III PELAKSANAAN PROGRAM KERJA	

KABINET BURHANUDDIN HARAHAP	43
A. Program Kerja Kabinet Burhanuddin Harahap	43
B. Pelaksanaan Program Kerja Kabinet Burhanuddin Harahap	44
1. Pengembalian Kewibawaan	44
2. Melaksanakan Pemilu	62
3. Menyelesaikan Perundang-Undangan Desentralisasi.....	76
4. Menghilangkan Faktor-faktor Inflasi.....	82
5. Memberantas Korupsi.....	87
6. Meneruskan Pengembalian Irian Barat.....	91
7. Memperkembangkan Politik Asia-Afrika	103
BAB IV KONDISI SOSIAL POLITIK	108
A. Masa Sebelum Kabinet Burhanuddin Harahap	108
B. Masa Burhanuddin Harahap	116
BAB V BERAKHIRNYA KABINET BURHANUDDIN HARAHAP	132
A. Jatuhnya Kabinet Burhanuddin Harahap	132
B. Pembentukan Kabinet Ali Sastroamidjoyo II	136
BAB VI KESIMPULAN.....	141
DAFTAR PUSTAKA.....	145
LAMPIRAN-LAMPIRAN	149

DAFTAR SINGKATAN

1.	ACOMA	Angkatan Komunis Muda
2.	AD	Angkatan Darat
3.	AKUI	Angkatan Kebangkitan Umat Islam
4.	AMS	Algemene Middelbare School
5.	APRI	Angkatan Perang Republik Indonesia
6.	BTI	Barisan Tani Indonesia
7.	DI/TII	Darul Islam/Tentara Islam Indonesia
8.	DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
9.	DPRS	Dewan Perwakilan Rakyat Sementara
10.	GPII	Gerakan Pemuda Islam Indonesia
11.	HIS	Hollands Inlandse School
12.	JIB	Jong Islamieten Bond
13.	KAA	Konferensi Asia Afrika
14.	KKN	Korupsi Kolusi Nepotisme
15.	KMB	Konferensi Meja Bundar
16.	KNIL	Koninklijk Nederlands Indisch Leger
17.	KSAD	Kepala Staf Angkatan Darat
18.	KSAU	Kepala Staf Angkatan Udara
19.	Masyumi	Majelis Syuro Muslimin Indonesia
20.	MBAD	Markas Besar Angkatan Darat
21.	MULO	Meer Uitgebreid Lager Onderwijs
22.	NU	Nahdatul Ulama
23.	Parindra	Partai Republik Indonesia Raya
24.	Parkindo	Partai Kristen Indonesia
25.	PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
26.	PETA	Pembela Tanah Air
27.	PEMILU	Pemilihan Umum
28.	Perti	Persatuan Tarbiyan Islam
29.	PIR	Partai Indonesia Raya
30.	PKI	Partai Komunis Indonesia
31.	PKRI	Partai Katolik Republik Indonesia
32.	PNI	Partai Nasional Indonesia
33.	PPI	Panitia Pemilihan Indonesia
34.	PPPI	Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia
35.	PRI	Partai Rakyat Indonesia
36.	PRN	Partai Rakyat Nasional
37.	PSI	Partai Sosialis Indonesia
38.	PSII	Partai syarikat Islam Indonesia
39.	RHS	Rechts Hoge School
40.	RIS	Republik Indonesia Serikat
41.	RUU	Rancangan Undang-Undang

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1 Lampiran.1	Foto Burhanuddin Harahap	149
2 Lampiran.2	Foto Kabinet Burhanuddin Harahap	150
3 Lampiran.3	Kabinet Perdana Menteri Republik Indonesia No. 1648 Tahun 1956	151
4 Lampiran.4	Berita Pelantikan Kabinet Burhanuddin Harahap. Merdeka, 12 Agustus 1955	154
5 Lampiran.5	Berita Susunan Kabinet Burhanuddin Harahap. Merdeka, 13 Agustus 1955	155

KONDISI SOSIAL POLITIK INDONESIA PADA MASA PEMERINTAHAN KABINET BURHANUDDIN HARAHAP 1955-1956

Oleh
Yuli Ernawati
10406244011

ABSTRAK

Kabinet Burhanuddin Harahap merupakan Kabinet kelima pada masa demokrasi parlementer di Indonesia. Penelitian ini bertujuan; 1) Mengetahui proses terbentuknya Kabinet Burhanuddin Harahap; 2) Mengetahui program kerja Kabinet Burhanuddin Harahap dan pelaksanaannya; 3) Mengetahui kondisi sosial politik Indonesia masa Kabinet Burhanuddin Harahap dan 4) Mengetahui akhir pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap.

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian sejarah yang terdiri dari lima tahapan. Tahapan pertama adalah penentuan topik. Berikutnya adalah pengumpulan sumber (*heuristic*) baik berupa sumber primer maupun sumber sekunder. Ketiga adalah verifikasi, yang berupa kritik ekstern maupun intern terhadap sumber-sumber yang diperoleh. Selanjutnya adalah interpretasi, yaitu proses penafsiran terhadap fakta-fakta sejarah yang telah ditemukan. Tahapan terakhir adalah Historiografi atau penulisan sejarah, peneliti harus menyusun fakta-fakta sejarah yang diperoleh dan disajikan menjadi cerita sejarah yang tersusun secara kronologis.

Hasil penelitian ini berisi tentang kondisi sosial politik Indonesia masa pemerintahan kabinet Burhanuddin Harahap, diantaranya; 1) Kabinet Burhanuddin terbentuk setelah jatuhnya Kabinet Ali Sastroamidjoyo I yang tersandung peristiwa Angkatan Darat 27 Juni 1955. Kabinet Burhanuddin Harahap merupakan kabinet koalisi yang terdiri dari beberapa partai; 2) Program kerja pemerintahan Kabinet Burhanuddin berusaha menstabilkan keadaan sosial, politik dan ekonomi negara yang pada saat itu masih labil; 3) Burhanuddin Harahap berhasil mengembalikan wibawa pemerintah terhadap Angkatan Darat dan masyarakat, berhasil mengatasi korupsi, mengadakan perbaikan ekonomi, serta berhasil menyelenggarakan pemilu. Keberhasilan program kabinet Burhanuddin Harahap masih jauh dari yang diharapkan. Dalam hubungan Indonesia Belanda, telah menyebabkan terjadinya perpecahan dalam tubuh Masyumi serta partai-partai Islam lainnya; 4) Akhirnya Kabinet demisioner setelah gagal menyelesaikan pembatalan perjanjian KMB dan hasil pemungutan suara itu diumumkan.

Kata Kunci : Kondisi Sosial Politik, Kabinet Burhanuddin Harahap, 1955-1956.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia setelah proklamasi kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai sekarang, sudah melaksanakan tiga tipe demokrasi. Tiga tipe demokrasi tersebut adalah Demokrasi Liberal (1950-1959), Demokrasi Terpimpin (1959-1965) dan Demokrasi Pancasila (1966-sekarang). Indonesia setelah kembali ke bentuk negara kesatuan Republik Indonesia memakai Sistem *Demokrasi Parleментар*.¹ Sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 adalah sistem kabinet Parleментар, maksudnya setiap kabinet yang berkuasa harus mendapat dukungan sebagian besar dari parlemen (DPR pusat).² Kedudukan kabinet tergantung dari dukungan dalam parlemen. Dalam sistem kabinet parleментар, kedudukan Presiden sebagai kepala negara tidak bertanggungjawab atas pemerintahan. Presiden hanya sebagai simbol yaitu mempunyai kedudukan tetapi tidak mempunyai kekuasaan. Presiden berwenang membentuk *formatur kabinet*³, apabila terjadi krisis kabinet dalam pemerintahan.

¹ *Demokrasi Parleментар* adalah sistem politik yang ditandai oleh banyak partai yang kekuasaan politik berada ditangan politikus sipil yang berpusat di Parlemen, (B. N. Marbun. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2003, hlm. 116).

² Moedjanto. *Indonesia Abad ke-20 Jilid II*. Yogyakarta: Kanisius.1992, hlm. 77.

³ *Formatur Kabinet* adalah seorang atau beberapa orang yang ditunjuk oleh Kepala Negara untuk membentuk kabinet. (B. N. Marbun, *op.cit.*, hlm. 171).

Tahun 1950 sampai tahun 1959, terdapat sejumlah kabinet yang memerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam setiap tahunnya selalu berganti kabinet. Kabinet-kabinet itu diantaranya adalah Kabinet Natsir (September 1950-Maret 1951), Kabinet Sukiman (April 1951-April 1952), Kabinet Wilopo (April 1952-Juni 1953), Kabinet Ali Sastroamidjoyo I (Juli 1953-Agustus 1955), Kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955-Maret 1956), kabinet Ali Sastroamidjoyo II (1956-1957) dan kabinet Djuanda (1957-1959).⁴

Setelah jatuhnya Kabinet Ali I, sebagai gantinya Wakil Presiden Dr. Muh. Hatta menunjuk Mr. Burhanuddin Harahap (Masyumi) sebagai formatur kabinet. Kejadian ini baru pertama kali di Indonesia, formatur kabinet ditunjuk oleh Wakil Presiden sebagai akibat dari kepergian Soekarno naik Haji ke Mekkah. Kabinet ini terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Wakil Presiden Nomor 141 tahun 1955 tertanggal 11 Agustus 1955 dan mulai bekerja setelah dilantik tanggal 12 Agustus 1955 dengan dipimpin oleh Burhanuddin Harahap.⁵

Kabinet Burhanuddin Harahap merupakan kabinet koalisi yang terdiri atas beberapa partai, hampir merupakan Kabinet Nasional sebab jumlah partai yang tergabung dalam koalisi kabinet ini berjumlah 13 partai. Kabinet ini termasuk kabinet koalisi, hal ini dikarenakan masih ada beberapa partai

⁴ Zulkarnain. *Jalan Meneguhkan Negara: Sejarah Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Pujangga Press. 2012, hlm. 104.

⁵ *Keterangan dan Djawaban Pemerintah tentang Program Kabinet*. Jakarta: Kementerian Penerangan RI. 1955, hlm. 3.

oposisi yang tidak duduk dalam kabinet seperti PNI dan beberapa partai lainnya.

Program kerja Kabinet Burhanuddin Harahap, adalah 1)Mengembalikan kewibawaan (Gezag) moril pemerintah, i.c. kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada Pemerintah, 2)Melaksanakan Pemilihan Umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan menyegerakan terbentuknya Parlemen yang baru, 3)Menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi sedapat-dapatnya dalam tahun 1955 ini juga, 4)Menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi, 5)Memberantas korupsi, 6)Meneruskan perjuangan mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia, dan 7)Memperkembangkan politik kerjasama Asia-Afrika, berdasarkan politik bebas dan aktif menuju perdamaian.⁶ Seperti halnya pelaksanaan program kerja kabinet lainnya, kabinet Burhanuddin juga mengalami keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan program kerjanya.

Keberhasilan kabinet Burhanuddin Harahap adalah 1) menyelenggarakan pemilu pertama yang demokratis pada 29 September 1955 (memilih anggota DPR) dan 15 Desember 1955 (memilih konstituante), 2) Kabinet Burhanuddin Harahap berhasil mengembalikan wibawa pemerintah terhadap Angkatan Darat dan masyarakat, 3) berhasil mengadakan perbaikan ekonomi termasuk di dalamnya keberhasilan mengendalikan harga dan mencegah terjadinya inflasi. Dapat dikatakan kehidupan rakyat semasa kabinet

⁶ P.N.H. Simanjuntak. *Kabinet-kabinet Republik Indonesia dari Awal Kemerdekaan sampai Reformasi*. Jakarta: Djambatan. 2003, hlm. 152-153.

cukup makmur, harga barang tidak melonjak naik akibat inflasi.⁷ 4) berhasil memberantas korupsi dengan mengadakan penangkapan-penangkapan terhadap orang-orang yang dicurigainya, seperti Djody Gondokusumo bekas Menteri Kehakiman masa Kabinet Ali.

Semasa pemerintahannya, Burhanuddin Harahap berusaha menstabilkan kondisi sosial politik Indonesia pada saat itu. Meskipun demikian dalam perjalanannya kabinet ini juga mengalami hambatan-hambatan yang menyebabkan kabinet ini demissioner. Atas dasar uraian diatas penulis berusaha mengkaji lebih dalam mengenai “Kondisi Sosial Politik Indonesia pada Masa Pemerintahan Kabinet Burhannudin Harahap (1955-1956)”. Pembahasan ini menarik untuk diteliti mengingat kabinet ini tidak berumur panjang hanya sekitar kurang lebih 7 bulan saja, tetapi masa pemerintahan kabinet Burhanuddin Harahap berhasil mengadakan perbaikan ekonomi dan dapat dikatakan kehidupan rakyat semasa kabinet cukup makmur, berhasil menyelenggarakan pemilihan umum, dan berhasil mengembalikan wibawa pemerintah terhadap Angkatan Darat. Penulis tertarik untuk mengetahui secara rinci keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai oleh Kabinet Burhanuddin Harahap.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana proses terbentuknya Kabinet Burhanuddin Harahap?

⁷ Bibit Suprpto. *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1985, hlm. 168.

2. Bagaimana program kerja pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap dan pelaksanaannya?
3. Bagaimana kondisi sosial politik Indonesia pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap?
4. Bagaimana berakhirnya Kabinet Burhanuddin Harahap?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan yang terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut.

1. Tujuan Umum

- a. Melatih daya pikir kritis, analisis, objektif dan ketajaman analisis fenomena-fenomena historis yang terjadi di masa lampau.
- b. Sebagai sarana untuk menerapkan metodologi penelitian sejarah, sehingga dapat memperdalam wawasan kesejarahan serta menghasilkan karya sejarah yang ilmiah dari suatu peristiwa.
- c. Untuk meningkatkan dan mengembangkan disiplin intelektual terutama profesionalitas kesejarahan.
- d. Untuk meningkatkan pengetahuan tentang sejarah Indonesia, khususnya pada masa demokrasi parlementer.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui proses terbentuknya Kabinet Burhanuddin Harahap.
- b. Mendapat gambaran yang luas tentang program kerja dan pelaksanaan program kerja dari Kabinet Burhanuddin Harahap.

- c. Untuk mengetahui kondisi sosial politik Indonesia pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap
- d. Untuk mengetahui proses berakhirnya Kabinet Burhanuddin Harahap.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis maupun pembaca. Adapun manfaat penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi Penulis

- a. Sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta.
- b. Menjadi salah satu tolak ukur bagi penulis dalam meneliti, menganalisis, serta merekonstruksi suatu peristiwa yang pernah terjadi.
- c. Dapat melatih kemampuan penulis dalam merekonstruksi peristiwa sejarah melalui analisis dari berbagai sumber baik primer maupun sekunder.
- d. Untuk menambah wawasan kesejarahan penulis terutama mengenai politik Indonesia khususnya pada masa demokrasi parlementer.

2. Bagi Pembaca

- a. Penulisan skripsi ini diharapkan menjadi sumber bacaan yang bermanfaat dan memberikan ilmu sehingga menambahkan wawasan bagi sang pembacanya.

- b. Selain itu, skripsi ini dapat dijadikan sumber literatur atau bahan penunjang bagi penulisan selanjutnya khususnya tentang Burhanuddin Harahap.
- c. Menambah wawasan pembaca mengenai program kerja dan pelaksanaan program kerja dari Kabinet Burhnuddin Harahap.
- d. Menambah wawasan pembaca mengenai bagaimana kondisi sosial politik Indonesia pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap.
- e. Setelah membaca skripsi ini, pembaca dapat mengetahui penyebab jatuhnya kabinet Burhanuddin Harahap.

E. Kajian Pustaka

Penulisan sejarah merupakan bentuk dan proses pengkisahan atas peristiwa-peristiwa manusia yang telah menjadi peristiwa masa lampau.⁸ Penulisan sejarah memerlukan kajian pustaka maupun kajian teori untuk memperkuat makna peristiwa-peristiwa masa lampau dan mendekati suatu peristiwa yang terjadi sebelumnya dalam berbagai aspek kehidupan. Kajian pustaka merupakan kajian terhadap buku-buku yang mendukung analisis dalam penelitian.⁹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa buku sebagai kajian pustaka. Suatu sumber pustaka dalam penelitian sangat

⁸ Sartono Kartodirdjo. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia. 1993, hlm. 19.

⁹ *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Sejarah, FISE, UNY. 2006, hlm. 3.

berguna untuk menjelaskan, menginterpretasikan, dan memahami suatu gejala atau fenomena yang kita jumpai dari hasil penelitian. Penelitian mengenai “Kondisi Sosial Politik Indonesia pada Masa Pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap (1955-1956)” menggunakan beberapa kajian pustaka sebagai berikut.

Rumusan masalah pertama adalah proses terbentuknya Kabinet Burhanuddin Harahap. Dalam rumusan ini juga akan dijelaskan mengenai siapa Burhanudin Harahap yang akan dikaji melalui buku Suswanta yang berjudul *Keberanian untuk Takut: Tiga Tokoh Masyumi dalam Drama PRRI* yang diterbitkan oleh Avyrouz pada tahun 2000. Sedangkan mengenai proses terbentuknya Kabinet Burhanuddin Harahap penulis menggunakan buku karya P.N.H Simanjuntak yang berjudul *Kabinet-Kabinet Republik Indonesia* yang diterbitkan oleh Djambatan pada tahun 2003. Dalam buku ini dijelaskan tentang penyebab berakhirnya kabinet Ali dan pembentukan Kabinet Burhanuddin Harahap. Burhanuddin Harahap bersama kabinetnya memerintah antara Agustus 1955-Maret 1956, setelah Kabinet Ali Sastroamidjoyo I mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno. Kabinet Ali Sastroamidjoyo I jatuh disebabkan karena persoalan dalam tubuh Angkatan Darat. Terjadinya peristiwa 27 Juni 1955 yaitu pemboikotan KASAD Zulkifli Lubis terhadap pelantikan Bambang Utoyo sebagai KASAD yang baru mendapat kritikan dari partai-partai dan media massa yang ada.¹⁰ Burhanuddin Harahap dari Masyumi kemudian mengajukan mosi tidak

¹⁰ Bibit Suprpto, *op. cit.*, hlm. 163.

percaya kepada menteri pertahanan, akibatnya Perdana Menteri Ali Sastroamidjoyo mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno.¹¹

Setelah jatuhnya Kabinet Ali, sebagai gantinya Wakil Presiden Dr. Muh. Hatta menunjuk Mr. Burhanuddin Harahap (Masyumi) sebagai formatur kabinet. Kejadian ini baru pertama kali di Indonesia, formatur kabinet ditunjuk oleh Wakil Presiden sebagai akibat dari kepergian Soekarno naik Haji ke Mekkah. Kabinet ini terbentuk pada tanggal 11 Agustus 1955, berdasarkan Keputusan Wakil Presiden Nomor 141 Tahun 1955 dan mulai bekerja setelah dilantik tanggal 12 Agustus 1955 dengan dipimpin oleh Burhanuddin Harahap. Kabinet Burhanuddin Harahap merupakan kabinet koalisi yang terdiri atas beberapa partai, bahkan hampir merupakan Kabinet Nasional sebab jumlah partai yang tergabung dalam koalisi kabinet ini berjumlah 13 partai. Tetapi karena masih ada beberapa partai yang sebagai oposisi tidak duduk dalam kabinet seperti PNI dan beberapa partai lainnya, maka kabinet ini termasuk kabinet koalisi.

Pada rumusan masalah kedua adalah program kerja pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap serta pelaksanaannya tahun 1955-1956. Program kerja pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap akan dikaji dengan buku karya Drs. C. S. T. Kansil, S. H yang berjudul *Susunan dan Program Kabinet Republik Indonesia* yang diterbitkan oleh Prandja Paramita tahun 1970. Dalam buku ini dibahas tentang program kerja kabinet Burhanuddin Harahap selama menjabat pada masa Demokrasi Parlementer.

¹¹ Ali Sastroamidjoyo. *Tonggak-tonggak di Perjalanananku*. Jakarta: Kinta. 1974, hlm. 329.

Sedangkan untuk menjawab pertanyaan mengenai pelaksanaan program kerja serta kebijakan politik dalam negeri Kabinet Burhanuddin Harahap, penyusun menggunakan buku karya Kementerian Penerangan yang berjudul *Keterangan dan Jawaban Pemerintah tentang Program Kabinet Boerhanuddin Harahap* yang diterbitkan tahun 1955. Dalam buku ini dijelaskan bahwa keberhasilan program kerja kabinet dan hambatan pelaksanaan program semasa kabinet Burhanuddin Harahap bekerja.

Keberhasilan kabinet Burhanuddin Harahap adalah dengan menyelenggarakan pemilu pertama yang demokratis pada 29 September 1955 (memilih anggota DPR) dan 15 Desember 1955 (memilih konstituante). Selain itu, Kabinet Burhanuddin Harahap juga berhasil dalam Pemberantasan korupsi dengan menangkap para pejabat tinggi, hal ini ditandai dengan ditangkapnya Djody Gondokusumo Menteri Kehakiman masa Kabinet Ali yang didakwa korupsi.¹² Kabinet ini berhasil mengadakan perbaikan ekonomi termasuk di dalamnya keberhasilan pengendalian harga, mencegah inflasi dan sebagainya. Dapat dikatakan kehidupan rakyat semasa kabinet cukup makmur, harga barang tidak melonjak naik akibat inflasi, terbinanya hubungan antara Angkatan Darat dengan Kabinet Burhanuddin serta menyelesaikan masalah peristiwa 27 Juni 1955 dengan mengangkat Kolonel A.H. Nasution sebagai Staf Angkatan Darat pada 28 Oktober 1955.

Tidak semua usaha kabinet Burhanuddin Harahap berhasil, dalam melaksanakan usaha ada pula rintangan dan halangan yang menyebabkan

¹² A. Kardiyat Wiharyanto. *Sejarah Indonesia dari Proklamasi sampai Pemilu 2009*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma. 2011, hlm. 84.

kegagalan kabinet. Kabinet ini berhasil memenangkan Angkatan Darat yang selama ini dilanda krisis kepemimpinan dan pertentangan antar pemimpin, tetapi sebaliknya timbul masalah baru dalam Angkatan Udara. Tanggal 14 Desember 1955 Menteri Pertahanan Burhanuddin Harahap melantik Komodor Muda Udara Hubertus Soyono sebagai wakil KSAU di lapangan Cililitan (sekarang Halim Perdana Kusuma) didemonstrasikan oleh prajurit dan perwira Angkatan Udara yang tidak setuju pelantikan tersebut gagal, kejadian ini merupakan usaha dari Kliek S. Suryadarma.¹³

Pada rumusan masalah ketiga membahas mengenai kondisi sosial politik Indonesia pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap. Penulis masih menggunakan buku karya Kementerian Penerangan yang berjudul *Keterangan dan Jawaban Pemerintah tentang Program Kabinet Boerhanuddin Harahap* yang diterbitkan tahun 1955. Dalam buku ini dibahas tentang secara garis besar kehidupan sosial politik Indonesia pada masa Pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap. Keadaan sosial politik Indonesia pada masa demokrasi Parleментар khususnya peralihan dari kabinet Ali ke kabinet Burhanuddin Harahap tidak stabil. Di bidang sosial Indonesia dihadapkan oleh masalah ekonomi yang tidak stabil, inflasi serta korupsi merajalela yang menyebabkan penderitaan rakyat. Tetapi dengan usaha kabinet Burhanuddin Harahap berhasil mengadakan perbaikan ekonomi, termasuk didalamnya menekan harga barang-barang, baik harga barang impor maupun harga beberapa macam barang-barang dalam negeri yang merupakan kebutuhan sehari-hari. Selain

¹³ Bibit Suprpto, *op.cit.*, hlm. 174.

itu, Kabinet Burhanuddin Harahap juga melindungi pengusaha nasional. Meskipun masih ada persoalan yaitu tentang krisis beras, tetapi kabinet ini dapat dikatakan cukup berhasil. Kehidupan rakyat semasa kabinet ini cukup makmur, harga barang stabil.

Sedangkan untuk menjawab pertanyaan mengenai kondisi politik Indonesia masa Kabinet Burhanuddin Harahap penyusun masih menggunakan buku karya Deliar Noer yang berjudul *Partai Islam di Tengah Pentas Nasional* yang diterbitkan oleh Grafiti Press tahun 1987. Dalam buku ini dijelaskan bahwa sejak awal terbentuknya kabinet ini sudah mendapat tugas khusus yang harus dilakukan yaitu mengembalikan kewibawaan moril Pemerintah, termasuk kepercayaan AD dan masyarakat kepada Pemerintah. Karena seperti yang kita ketahui Kabinet Ali I jatuh karena peristiwa Angkatan Darat 27 Juni 1955. Selain itu banyaknya aparatur pemerintah yang melakukan korupsi juga menambah jatuhnya kewibawaan Pemerintah dimata Angkatan Darat dan masyarakat. Kabinet Burhanuddin Harahap berhasil mengatasi masalah Angkatan Darat dan korupsi yang merajalela. Meskipun dapat dikatakan berhasil mengembalikan kewibawaan pemerintah terhadap Angkatan Darat dan masyarakat, tetapi kabinet Harahap menghadapi persoalan Angkatan Udara dan kegagalan penyelesaian masalah-masalah hubungan Indonesia Belanda. Selain itu timbulnya kembali perselisihan antar partai Islam terutama antara Masyumi dengan partai-partai Islam lain bersangkutan dengan masalah hubungan dengan negeri Belanda turut mempercepat jatuhnya kabinet ini.

Pemilihan Umum (Pemilu) sudah direncanakan oleh pemerintah, tetapi program ini tidak segera terwujud. Karena usia kabinet pada waktu itu relatif singkat, persiapan-persiapan secara intensif untuk program tersebut tidak dapat dilaksanakan. Pemilu merupakan wujud nyata pelaksanaan demokrasi. Pemilu yang dinanti-nanti akhirnya dapat dilaksanakan pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap ini. Pemilu pertama yang diselenggarakan pada tahun 1955 dilaksanakan dua kali, yaitu: tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Parlemen dan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante (Dewan Pembentuk Undang-Undang Dasar). Empat partai yang muncul sebagai pemenang dalam Pemilu pertama adalah: Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, Nahdatul Ulama (NU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI).¹⁴

Rumusan masalah yang terakhir mengenai berakhirnya Kabinet Burhanuddin Harahap akan dibahas dalam buku karya Drs. G. Moedjanto, M.A yang berjudul *Indonesia abad ke 20 jilid II* yang diterbitkan oleh Kanisius pada tahun 1988 dan buku karya Bibit Suprpto yang berjudul *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia* yang diterbitkan oleh Ghalia Indonesia pada tahun 1985. Kedua buku ini membahas secara garis besar proses berakhirnya kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet Burhanuddin Harahap memerintah hanya selama kurang lebih 7 bulan saja, tetapi banyak mendapatkan keberhasilan sebagaimana disebutkan diatas. Kabinet ini sebenarnya hampir sama dengan kabinet-kabinet lain, berakhir karena terdapat

¹⁴ Moedjanto, *op.cit.*, hlm. 94.

keretakan dalam tubuh kabinet sendiri. Namun akhirnya meletakkan jabatannya juga setelah Parlemen hasil pemilu dilantik. Kabinet ini kehilangan prestige-nya ketika usahanya mengontrol Angkatan Udara gagal, tidak adanya restu dari Presiden Soekarno, dan gagalnya menyelesaikan masalah-masalah hubungan Indonesia-Belanda.

F. Historiografi yang Relevan

Historiografi merupakan rekonstruksi yang imajinatif dari pada masa lampau dari pada masa berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau.¹⁵ Berdasarkan hal tersebut penggunaan historiografi yang relevan sangat penting digunakan dalam penulisan skripsi ini untuk mengetahui originalitas penulisan skripsi. Penggunaan historiografi yang relevan harus dilakukan sebelum mengadakan penulisan skripsi hal ini bertujuan untuk mencapai kesempurnaan dalam penulisan skripsi. Historiografi yang relevan ini bisa merujuk pada buku, disertasi, tesis, skripsi ataupun karya-karya yang lain yang tingkat kevalidannya dapat dipertanggung jawabkan.

Adapun literatur yang relevan dengan penulisan skripsi ini adalah, Skripsi karya Lusia Iskandari mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2004 yang berjudul Indonesia Pada Masa Pemerintahan Kabinet Ali I (1953-1955). Skripsi ini terdapat tujuh bab. Pada bab enam terdapat pembahasan mengenai jatuhnya kabinet Ali I. Pada bab ini ada kesamaan pembahasan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Selain itu

¹⁵ Louis Gootschalk. *“understanding history”*. Terj. Nugroho Notosusanto. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press. 1975, hlm. 32.

dalam skripsi karya Lusia Iskandari ini juga membahas tentang terbentuk dan jatuhnya sebuah kabinet dalam masa demokrasi liberal, sehingga metodologi yang digunakan juga sama. Perbedaannya dengan penulisan skripsi ini adalah, dalam skripsi ini tidak hanya membahas tentang jatuhnya kabinet Ali saja melainkan juga pembentukan kabinet Burhanuddin Harahap.

Historiografi relevan yang kedua adalah skripsi karya Syela Joe Dhesita mahasiswa jurusan pendidikan sejarah Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2014 yang berjudul Program Kerja Pemerintahan Kabinet Wilopo 1952-1953. Skripsi ini menjelaskan tentang program kerja pemerintahan kabinet Wilopo selama demokrasi parlementer. Kesamaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama menjelaskan tentang program kerja salah satu kabinet pemerintahan pada masa parlementer dengan segala kondisi sosial politik dan ekonominya, kesamaan kedua adalah dalam skripsi karya Syela Joe D ini dijelaskan tentang peristiwa 17 Oktober 1952 yang menyebabkan jatuhnya kabinet, pada skripsi penulis dijelaskan kembali peristiwa yang sama dan upaya pemerintah menyelesaikan permasalahan peristiwa tersebut. Perbedaan skripsi ini adalah skripsi penulis tidak terlalu banyak membicarakan tentang tokoh perdana menteri pada kabinet terpilih. Selain itu skripsi ini menjelaskan program kerja dan kondisi sosial ekonomi politik selama masa pemerintahan Kabinet Burhanudin secara lebih jelas.

Sejarah Indonesia dari Proklamasi Sampai Pemilu 2009, ditulis oleh A Kardiyat Wiharyanto yang diterbitkan oleh Universitas Sanata Dharma Yogyakarta tahun 2011. Buku ini membahas secara garis besar tentang

kekuasaan Jepang di Indonesia sampai masa pemerintahan SBY-JK 2004-2009. Kekurangan dari buku ini adalah hanya sekilas membahas keberhasilan Kabinet Burhanuddin Harahap sehingga penulis tertarik untuk membahas lebih mendalam tentang keberhasilan kabinet Burhanuddin Harahap.

G. Metodologi Penelitian dan Pendekatan Penelitian.

1. Metode Penulisan

Metode berasal dari kata *method* dalam bahasa Inggris atau *methodos* dalam bahasa Yunani yang artinya jalan atau cara. Metodologi atau *science of method* adalah ilmu yang membicarakan jalan.¹⁶ Sehubungan dengan upaya tindakan ilmiah, maka metode menyangkut pula cara kerja, yaitu cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu bersangkutan.¹⁷ Menurut Helius Sjamsuddin metode ada hubungannya dengan suatu prosedur, proses, atau teknik yang sistematis dalam penyidikan suatu disiplin ilmu tertentu untuk mendapatkan objek (bahan-bahan) yang diteliti.¹⁸

Penelitian ini akan menggunakan metode sejarah kritis menurut teori Kuntowidjoyo. Penelitian sejarah mempunyai lima tahap, adalah sebagai berikut.

¹⁶ Kuntowidjoyo. *Metodologi Sejarah*. Jakarta: Tiara Wacana. 1994, hlm. xi.

¹⁷ Koentjaraningrat. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Jakarta: Sinar Grafika. 1983, hlm. 16.

¹⁸ Helius Sjamsuddin. *Metodologi Sejarah*. Jogjakarta: Ombak. 2012, hlm.11.

a. Pemilihan Topik

Pemilihan topik merupakan kegiatan awal yang dilakukan untuk menentukan permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Topik yang dipilih harus merupakan topik sejarah, yaitu dapat diteliti sejarahnya. topik sebaiknya dipilih berdasarkan kedekatan emosional dan kedekatan intelektual.¹⁹ Keduanya mencerminkan subjektivitas dan objektivitas yang penting dalam penelitian. Menurut Grey, dalam Helius Sjamsuddin menjelaskan tentang dalam memilih suatu topik untuk penelitian maka perlu diperhatikan empat kriteria, yaitu nilai, keaslian, kepraktisan, dan kesatuan.²⁰ Pemilihan topik berguna untuk menentukan tema sejarah yang akan digunakan sebagai judul skripsi. Judul yang diambil peneliti adalah “Kondisi Sosial Politik Indonesia Pada Masa Pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap 1955-1956”.

b. *Heuristik* (Pengumpulan Sumber)

Kemampuan menemukan dan menghimpun sumber-sumber yang diperlukan dalam penulisan sejarah biasa dikenal sebagai tahap heuristik.²¹ Sumber atau data sejarah ada dua macam, yaitu sumber

¹⁹ Koentjaraningrat, *op. cit.*, hlm. 92.

²⁰ Helius Sjamsuddin, *op. cit.*, hlm. 71-72.

²¹ Saefur Rochmat, *Ilmu Sejarah dalam Perspektif Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009, hlm. 147

tertulis (dokumen) dan sumber tidak tertulis (*artefact*).²² Pada tahap ini peneliti akan mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sesuai dengan apa yang akan diteliti dengan menggunakan studi kepustakaan.

Sejarawan menganggap bahwa sumber-sumber asli sebagai sumber pertama (*primary sources*), sedangkan apa yang telah ditulis oleh sejarawan sekarang atau sebelumnya berdasarkan sumber-sumber pertama disebut (*secondery sources*).²³ Sumber sekunder adalah sumber yang berasal dari seseorang yang bukan pelaku atau saksi peristiwa tersebut, dengan kata lain hanya tahu informasi dari kesaksian orang lain.²⁴

Sumber sekunder penulis dapatkan dari perpustakaan-perpustakaan yang ada di Yogyakarta seperti Laboratorium Sejarah, Perpustakaan FIS, Perpustakaan UPT UNY, Perpustakaan FIB UGM, Perpustakaan Fisipol UGM, Library Center Yogyakarta, Perpustakaan St. Kolege Ignatius, perpustakaan Musium Monumen Jogja Kembali, perpustakaan Musium Dirgantara, perpustakaan Musium Mandala Bhakti Semarang dan Perpustakaan Nasional Indonesia.

²² Kuntowidjoyo. *op. cit.*, hlm. 94.

²³ Helius Sjamsuddin, *op., cit.* hlm. 83.

²⁴ I Gde Widja, *Sejarah Lokal dan Perspektif dalam Pengajaran Sejarah*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, hlm. 18.

Sumber Sekunder yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini, antara lain, jurnal, artikel, majalah, dan buku-buku yang relevan seperti berikut.

Bibit Suprpto, 1985, *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

P.N.H Simanjuntak, 2003, *Kabinet-Kabinet Republik Indonesia*, Jakarta: Djambatan.

Departemen Penerangan, 1970, *Susunan dan Program Kabinet Republik Indonesia selama 25 Tahun 1945-1970*, Jakarta: Pradnja Paramita.

Deliar Noer, 1987, *Partai Islam di tengah Pentas Nasional*, Jakarta: Grafiti Press.

A.B. Lopian, 1996, *Terminologi Sejarah 1945-1950 & 1950-1959*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Kardiyat Wiharyanto, 2011, *Sejarah Indonesia dari Proklamasi Sampai Pemilu 2009*, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

Sumber primer yaitu sumber yang disampaikan oleh pelaku atau saksi mata. Menurut Helius Sjamsuddin sumber-sumber primer (sumber primer) diantaranya adalah kronik, autobiografi, memoir, surat kabar, publikasi umum, surat-surat pribadi, catatan harian, notulen rapat dan sastra.²⁵ Sejauh ini penulis sudah menemukan beberapa sumber primer seperti berita-berita pada dalam koran Suara Merdeka, dan Abadi antara tahun 1955 sampai dengan 1956. Penulis akan memilih berita-berita yang masuk dalam kategori sumber primer terkait dengan bahasan kebijakan politik dalam negeri Kabinet Burhanuddin Harahap.

²⁵ Helius Sjamsuddin, *op. cit.*, hlm. 111.

Peneliti juga mendapatkan beberapa sumber primer dari catatan atau tulisan dari pihak-pihak yang bersangkutan langsung dan sudah dibukukan, diantaranya.

Kementerian Penerangan Republik Indonesia. 1955. *Keterangan dan Jawaban Pemerintah atas Program Kabinet Boerhanuddin Haarahap*. Jakarta:Kementerian Penerangan.

Selain itu penulis juga menggunakan sumber primer dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Arsip yang peneliti peroleh antara Lain:

ANRI. *Kabinet Perdana Menteri Republik Indonesia No. 1648 Tahun 1956*.

ANRI. *Kabinet Presiden Republik Indonesia No. 1396 Tahun 1955*.

ANRI. *Kabinet Perdana Menteri Republik Indonesia No. 2234 Tahun 1955*.

ANRI. *Kabinet Perdana Menteri Republik Indonesia No. 2230 Tahun 1955*.

ANRI. *Kabinet Perdana Menteri Republik Indonesia No. 2228 Tahun 1955*.

ANRI. *Kabinet Perdana Menteri Republik Indonesia No. 2222 Tahun 1955*.

ANRI. *Kabinet Perdana Menteri Republik Indonesia No. 2219 Tahun 1955*.

c. Verifikasi (Kritik Sumber)

Kritik sumber umumnya dilakukan terhadap sumber-sumber pertama. Kritik ini menyangkut verifikasi sumber yaitu pengujian mengenai kebenaran atau ketepatan (akurasi) dari sumber itu. Hal ini bertujuan agar penulis tidak menerima begitu saja informasi yang berasal dari sumber-sumber yang telah diperoleh, namun juga mampu menganalisis secara kritis tentang keabsahan sumber. Kritik sumber terdiri dari kritik ekstern dan kritik intern.

1) Kritik Ekstern

Kritik ekstern adalah cara melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek “luar” dari sumber sejarah. Helius Sjamsuddin menjelaskan tentang arti Kritik ekstern adalah suatu peneliti atas asal-usul dari sumber, suatu pemeriksaan atas catatan atau peninggalan itu sendiri untuk mendapatkan semua informasi yang mungkin, dan untuk mengetahui apakah pada suatu waktu sejak asal mulanya sumber itu telah diubah oleh orang-orang atau tidak.²⁶ Kritik ekstern bertujuan untuk mengetahui tingkat keaslian sumber.

2) Kritik Intern

Kritik intern merupakan kelanjutan dari kritik ekstern yakni untuk meneliti kebenaran isi dokumen. Setelah fakta kesaksian ditegakan melalui kritik eksternal, berikutnya adalah mengadakan evaluasi terhadap kredibilitas isi dari kesaksian tersebut.²⁷ Kritik intern digunakan untuk menguji kredibilitas sumber yang terkumpul. Pengujian kebenaran isi data dilakukan dengan menghubungkan faktor-faktor yang berhubungan dalam pembuatannya.

d. Interpretasi (Analisis Sumber)

²⁶ *Ibid.*, hlm. 105.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 112.

Interpretasi adalah proses menafsirkan fakta sejarah yang telah ditemukan. Interpretasi ada dua macam, yaitu analisis dan sintesis.²⁸ Analisis berarti menguraikan, maka dari sinilah akan ditemukan fakta sejarah. Sedangkan sintesis berarti menyatukan, yaitu menyatukan hasil interpretasi penulis terhadap data yang diperoleh. Dalam proses interpretasi ini sangat memungkinkan adanya subyektifitas karena dalam tahapan ini penulis bebas untuk menafsirkan fakta-fakta yang telah diperoleh.

e. Historiografi (Penulisan)

Penulisan merupakan tahapan terakhir dalam metodologi sejarah. Penulisan merupakan kegiatan menyusun fakta-fakta menjadi sejarah, setelah melakukan pencarian sumber, kritik sumber dan penafsiran kemudian dituangkan menjadi suatu kisah sejarah dalam bentuk tulisan. Aspek kronologi merupakan bagian yang sangat penting dalam penulisan sejarah. Penyajian penelitian dalam bentuk tulisan mempunyai tiga bagian: (1) Pengantar, (2) Hasil Penelitian, dan (3) Simpulan.²⁹ Pada bagian hasil penelitian akan disajikan hasil penelitian mengenai Kondisi Sosial Politik Indonesia pada Masa Kabinet Burhanuddin Harahap 1955-1956, yang dapat dipertanggung jawabkan dengan didukung sumber-sumber yang valid.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 102.

²⁹ Kuntowijoyo. *op. cit.*, hlm. 107.

2. Pendekatan Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan politik, sosial, dan ekonomi. Pendekatan politik merupakan pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan politik dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis tentang kondisi negara, program kerja kabinet, kebijakan dalam negeri Kabinet Burhanuddin Harahap pada masa demokrasi parlementer tahun 1955-1956.

Pendekatan politik digunakan untuk mengkaji keadaan politik pemerintahan Indonesia pada masa demokrasi parlementer khususnya masa pemerintahan Burhanuddin Harahap. Menurut Deliar Noer Ilmu Politik memusatkan perhatiannya pada masalah-masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama atau masyarakat.³⁰ Konsep yang dibahas dalam ilmu politik sendiri meliputi, negara, kekuasaan, kedaulatan, hak, dan, kewajiban, kemerdekaan, lembaga-lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, modernisasi dan sebagainya.³¹

Ilmu yang mempelajari tentang hubungan sosial manusia disebut sosiologi. Sosiologi sendiri menurut David Poponoe adalah ilmu tentang interaksi manusia dalam masyarakat sebagai suatu keseluruhan.³²

Pendekatan sosial dalam penelitian ini digunakan untuk mengungkapkan

³⁰ Dadang Supardan. *Pengantar Ilmu Sosisal : Sebuah kajian pendekatan structural*. Jakarta : Bumi Aksara. 2011, hlm. 492.

³¹ Miriam Budiarjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia. 1977, hlm. 30.

³² Dadang Supardan. *op. cit.*, hlm. 69.

nilai-nilai yang mendasari perilaku tokoh sejarah seperti latar Belakang pendidikan, keluarga dan lingkungan tempat Burhanuddin Harahap tumbuh. Pendekatan sosiologi dalam penelitian ini dapat digunakan untuk menggali latar Belakang kehidupan pribadi Burhanuddin Harahap.

Ilmu Ekonomi menurut J.L. Meij adalah ilmu tentang usaha manusia kearah kemakmuran.³³ Pendekatan ekonomi yaitu penjabaran-penjabaran dari konsep ekonomi sebagai pola distribusi, alokasi produksi dan konsumsi yang dapat menggambarkan keadaan social ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan kabinet Burhanuddin Harahap. Pendekatan-pendekatan yang digunakan ini diharapkan mampu menggambarkan program kerja maupun kebijakan pemerintahan kabinet Burhanuddin Harahap tahun 1955-1956.

H. Sistematika Pembahasan

Bagian ini penulis menguraikan hal-hal mendasar dari penulisan skripsi. Sistematika skripsi berguna untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai skripsi ini. Maka, penulis akan memberikan gambaran secara ringkas. Sistematika pembahasan ini dituangkan dalam tujuh bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab sebagai berikut:

Pada bab pertama yaitu bab pendahuluan berisi tentang latar Belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian

³³ *Ibid.*, hlm. 366.

pustaka, historiografi yang relevan, metode penelitian dan pendekatan penelitian, serta sistematika pembahasan.

Pada bab kedua yaitu proses terbentuknya kabinet Burhanuddin Harahap, dalam bab ini dijelaskan singkat mengenai riwayat kehidupan Burhanuddin Harahap dari kecil hingga menjadi Perdana Menteri. Proses terbentuknya kabinet Burhanuddin Harahap diawali oleh dimisionernya kabinet Ali I yang diakibatkan peristiwa Angkatan Darat 27 Juli 1955. Kemudian dilanjutkan dengan proses pemilihan Burhanuddin Harahap menjadi kabinet kelima.

Pada bab ketiga yaitu program kerja pemerintahan kabinet Burhanuddin Harahap tahun 1955-1956. Pada bab ini dijelaskan tentang program kerja kabinet Burhanuddin Harahap serta kebijakan politik dalam negeri dan pelaksanaannya. Program kerja apa saja yang berhasil dilaksanakan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap dan program-program kerja yang tidak berhasil dilaksanakan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap.

Bab Keempat yaitu Kondisi Sosial Politik Indonesia Pada Masa Kabinet Burhanuddin Harahap. Pada bab ini membahas tentang keadaan sosial politik Indonesia pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap. Di bidang sosial pada masa Pemerintahan Kabinet Harahap dapat dikatakan masyarakat hidup cukup makmur, harga barang kebutuhan tidak melonjak naik akibat inflasi. Di bidang politik Kabinet Harahap berhasil mengembalikan kewibawaan Pemerintah terhadap Angkatan Darat dan masyarakat,

persetujuan partai-partai Islam kembali terjadi seiring diadakannya perundingan Indonesia-Belanda.

Bab Kelima yaitu berakhirnya Kabinet Burhanuddin Harahap. Pada bab ini akan menjelaskan tentang demissionernya Kabinet Burhanuddin Harahap yang dimulai dari pengumuman hasil pemungutan suara dan pembagian kursi di DPR, maka tanggal 2 Maret 1956 Kabinet Burhanuddin Harahap mengundurkan diri, menyerahkan mandatnya kepada Presiden untuk dibentuk kabinet baru berdasarkan hasil pemilihan umum.

Bab Keenam yaitu Kesimpulan. Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan yang diperoleh merupakan jawaban yang menjadi pokok permasalahan dalam rumusan masalah.

BAB II

TERBENTUKNYA KABINET BURHANUDDIN HARAHAP

Burhanuddin Harahap memiliki sejarah panjang dalam dunia perpolitikan Indonesia. Burhanuddin Harahap berperan aktif demi kemajuan bangsa jauh sebelum Indonesia merdeka. Masa pergerakan, Burhanuddin Harahap aktif dalam partai dan beberapa organisasi yang punya tujuan untuk memerdekakan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, Burhanuddin Harahap menjabat beberapa kedudukan penting dalam pemerintahan, hingga pada masa demokrasi parlementer Burhanuddin Harahap menjabat sebagai Perdana Menteri sekaligus merangkap sebagai Menteri Pertahanan (1955-1956). Untuk memperdalam pengetahuan tentang terbentuknya Kabinet Burhanuddin Harahap, maka akan diuraikan latar Belakang kehidupan Burhanuddin Harahap, terbentuknya Kabinet Burhanuddin Harahap dan Susunan Kabinet Burhanuddin Harahap.

A. Latar Belakang Kehidupan Burhanuddin Harahap.

Burhanuddin Harahap dilahirkan pada tanggal 12 Januari 1917 di Medan, Sumatera Utara.¹ Burhanuddin Harahap merupakan putra dari pasangan suami istri Muhammad Yunus dan Siti Nurfiah. Muhammad Yunus merupakan seorang Mantri Polisi yang bekerja pada kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Timur tepatnya di Tanjung Balai. Orang tua Burhanuddin berasal dari Tapanuli. Burhanuddin merupakan anak ketiga dari enam bersaudara. Burhanuddin Harahap dibesarkan dalam keluarga muslim. Hal inilah yang

¹ Suswanta, *Keberanian untuk Takut: Tiga Tokoh Masyumi dalam Drama PRRI*, (Yogyakarta: Avyrouz, 2000), hlm. 22.

nantinya mempengaruhi perkembangan pemikiran Burhanuddin Harahap dalam setiap kebijakannya. Meskipun dilahirkan di Medan, tetapi sejak kecil ia tidak pernah menetap di Medan. Hidup Burhanuddin berpindah-pindah karena mengikuti dimana ayahnya ditugaskan.

Ketika tiba masa sekolah, Burhanuddin dimasukkan ke dalam HIS (*Hollands Inlandse School*)² yang berada di Bagan siapi-api dekat Tanjung Balai. Meskipun orang tua berpindah-pindah, Burhanuddin tetap bersekolah di Tanjung Balai dengan jalan menyewa kost karena tidak semua daerah terdapat HIS (*Hollands Inlandse School*). Setelah lulus dari HIS, ia kemudian melanjutkan ke MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*)³ di Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan. Selepas belajar dari MULO Padang, pada tahun 1935 Burhanuddin hijrah ke Jawa untuk melanjutkan pendidikannya ke AMS A-2 (*Algemene Middelbare School*)⁴, di Yogyakarta. Seperti yang sudah direncanakan sebelumnya, Burhanuddin mengambil Jurusan *Western Klas Sieke Afdeling*. Di Yogyakarta Burhanuddin tinggal disebuah kamar kost, ia

² HIS (*Hollands Inlandse School*) didirikan pada tahun 1894 dengan nama sekolah kelas satu. Sekolah ini ditujukan untuk anak aristokrat dan orang berada (priayi) Indonesia. Pada tahun 1914 sekolah kelas satu ini berganti nama menjadi HIS. Sekolah ini setara dengan sekolah dasar sekarang ini. Lihat S. Nasution *Sejarah Pendidikan Indonesia* Jakarta : Bumi Aksara. 2011, hlm. 53-60.

³ MULO dibuka tahun 1903, MULO merupakan sekolah dasar lanjutan dengan program yang diperluas. MULO merupakan lembaga pendidikan untuk semua bangsa di Hindia Belanda pada waktu itu. Lihat S. Nasution *Sejarah Pendidikan Indonesia* Jakarta : Bumi Aksara. 2011, hlm. 122

⁴ AMS merupakan sekolah lanjutan MULO yang juga merupakan sekolah persiapan untuk perguruan tinggi. Lihat S. Nasution *Sejarah Pendidikan Indonesia* Jakarta : Bumi Aksara. 2011, hlm. 140

meneruskan ke Yogyakarta dengan alasan saat itu kota ini terkenal kota pelajar paling murah. Harga kebutuhan, makanan juga murah sehingga bisa berhemat dan sisanya untuk membeli raket. Semasa bersekolah di AMS (*Algemene Middelbare School*), Burhanuddin gemar membaca surat kabar, surat kabar yang sering ia baca diantaranya adalah *De Locomotif* Semarang dan surat kabar Lokal Yogyakarta. Selain itu, sepulang sekolah ia gemar bermain tenis lalu setelah memenuhi kegemarannya ia bergegas untuk mengikuti les bahasa Belanda. Disela kesibukan belajarnya, Burhanuddin aktif dalam organisasi JIB (*Jong Islamieten Bond*).⁵ Jiwa Burhanuddin yang sejak kecil hidup ditengah-tengah keluarga yang beragama Islam sangat merasa cocok aktif dalam JIB (*Jong Islamieten Bond*).

Ketika lulus AMS (*Algemene Middelbare School*) di Yogyakarta tahun 1938, akhirnya Burhanuddin memutuskan untuk melanjutkan ke RHS (*Rechts Hoge School*),⁶ sekolah tinggi Hukum di Jakarta. Karena pada saat itu belum ada Universitas, adanya sekolah tinggi Kedokteran, Teknik, dan Hukum. Selama menempuh pendidikan di Jakarta, Burhanuddin juga masuk dalam SIS (*Student Islam Studi Club*), suatu perkumpulan mahasiswa Indonesia Islam yang tertarik pada masalah-masalah ke Islaman. Kegiatan dari organisasi ini

⁵ JIB (*Jong Islamieten Bond*) merupakan perkumpulan pemuda Islam yang didirikan di Jakarta pada tanggal 1 Januari 1925 oleh pemuda pelajar ketika itu. Tujuan pertama pembentukannya adalah untuk mengadakan kursus-kursus agama Islam bagi para pelajar Islam dan untuk mengikat rasa persaudaraan antara para pemuda terpelajar Islam yang berasal dari berbagai daerah di Nusantara dan sebelumnya masih menjadi anggota perkumpulan daerah, seperti Jong Java (7 Maret 1915), Jong Sumatra (9 Desember 1917), dan lain-lain.

⁶ Suswanta, *op. cit.*, hlm. 23.

adalah memberi penjelasan, mengeluarkan majalah Islam supaya para mahasiswa mengetahui Islam lebih dalam. Pada organisasi ini, Burhanuddin menjabat sebagai Sekretaris. Selain di SIS (*Student Islam Studi Club*), Burhanuddin juga aktif dalam PPPI (Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia).⁷

Setelah kedatangan Jepang ke Indonesia, semua sekolah yang didirikan Belanda ditutup termasuk RHS (*Rechts Hoge School*) tempat Burhanuddin bersekolah. Kedatangan tentara Jepang tidak saja membawa perubahan politik, tetapi juga perubahan di bidang pendidikan. Burhanuddin terpaksa berhenti dari RHS (*Rechts Hoge School*). Meskipun tidak bersekolah, mahasiswa dari luar Jawa berkumpul dalam suatu organisasi. Kegiatan mereka membantu masalah keuangan sesama mahasiswa luar Jawa yang sama-sama sekolah di Jakarta. Teman seperjuangan Burhanuddin antara lain Chaerul Saleh dan Sukarni. Jepang sempat berbaik hati memberi rumah kost secara gratis di daerah dekat Menteng, tetapi ketika rumah kost itu akan digunakan oleh pihak tentara Jepang maka mereka semua diusir. Akhirnya Burhanuddin bersama Chaerul Saleh dan Sukarni pindah dan menyewa kost di daerah Cikini 71. Burhanuddin memulai kembali pendidikan formalnya setelah Supomo menjadi Menteri Kehakiman dan Jepang membuka kembali sekolah tinggi Hakim dalam bentuk kursus. Karier Burhanuddin Harahap juga nampak dalam bidang

⁷ Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia merupakan perhimpunan para pelajar Indonesia yang didirikan pada bulan September 1926 oleh para mahasiswa *Rechtshoogeschool te Batavia* (RHS-Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta), dan *Technische Hoogeschool te Bandoeng* (THS-Sekolah Tinggi Teknik di Bandung). Organisasi ini bermaksud untuk menyatukan perkumpulan pemuda yang saat itu ada di Indonesia. Organisasi ini sangat berpengaruh di kalangan pelajar, mengingat para anggotanya adalah mahasiswa THS, STOVIA dan RHS.

peradilan, dimulai di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada masa pendudukan Jepang (1942-1946). Setelah Jepang kalah dan Indonesia merdeka, Burhanuddin melanjutkan pendidikan formalnya di UGM (Universitas Gadjah Mada) Yogyakarta.

Pengabdian Burhanuddin secara formal bagi bangsa dan negara paling tidak telah dilakukan berturut-turut sejak permulaan Indonesia merdeka. Awalnya ia duduk dalam Badan Pekerja Komite Nasional Pusat bersama Mr. Assaat yang kantornya bermarkas di Purworejo. Setelah Agresi Militer Belanda II, Burhanuddin melangsungkan pernikahan dengan gadis Sangonan Godean, Sleman Yogyakarta bernama Siti Pariyah.⁸ Hasil dari pernikahan tersebut, Burhanuddin dikaruniai dua orang anak. Selain itu Burhanuddin juga aktif di GPII (*Gerakan Pemuda Islam Indonesia*) dan Partai Masyumi. Burhanuddin Harahap aktif dalam partai Masyumi sejak tahun 1946. Burhanuddin aktif dalam Masyumi berawal dari sebuah ajakan Pak Prawoto. Pak Prawoto merupakan seseorang yang dikenalnya pada organisasi SIS (*Student Islam Studi Club*), beliau merupakan ketua terakhir dari SIS. Pada waktu Indonesia menjadi RIS (Republik Indonesia Serikat), Burhanuddin duduk dalam Parlemen. Demikian pula setelah Indonesia menjadi negara kesatuan, Burhanuddin menjadi anggota DPRS (Dewan Perwakilan Rakyat Sementara). Posisinya di Parlemen ini terhenti sebentar karena ia harus mengemban jabatan sebagai Perdana Menteri sekaligus merangkap sebagai Menteri Pertahanan pada demokrasi liberal, menggantikan kabinet Ali

⁸ ANRI. *Dokumen Wawancara antara JR. Chaniago dengan Burhanuddin Harahap, Jakarta 18 April 1980.*

Sastroamidjoyo I yang telah berakhir. Di bawah kepemimpinannya sebagai perdana Menteri, Indonesia melangsungkan pemilihan umum yang pertama pada tahun 1955. Selain pemilu, masih banyak lagi program kerja kabinet ini diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Mengembalikan kewibawaan (Gezag) moril pemerintah i.c. kepercayaan Angkatan Darat dan Masyarakat kepada Pemerintah.
2. Menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi sedapat-dapatnya dalam tahun 1955 ini juga.
3. Menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi.
4. Memberantas korupsi.
5. Meneruskan perjuangan mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia.
6. Memperkembangkan politik kerjasama Afrika-Asia, berdasarkan politik bebas aktif menuju perdamaian.

Seluruh program itu mendapat persetujuan hampir mutlak dari Parlemen. Pada masa kabinet ini, kondisi ekonomi relatif baik, upaya pemberantasan korupsi digalakan, yakni dengan dibuatnya RUU anti korupsi. Kabinet ini juga berhasil menyelesaikan masalah pemilihan KSAD A.H Nasution diangkat kembali menjadi KSAD (Kepala Staf Angkatan Darat).

B. Sejarah Terbentuknya Kabinet Burhanuddin Harahap

Pada tanggal 24 Juli 1955, Kabinet Ali-Wongso-Arifin atau yang lebih dikenal dengan Kabinet Ali Sastroamidjoyo I mengembalikan mandat kepada

Wakil Presiden Moh. Hatta. Hal ini terjadi karena Presiden Soekarno sedang menunaikan ibadah haji ke Mekkah. Kabinet Ali Sastroamidjoyo I berakhir dikarenakan peristiwa 27 Juni 1955 yaitu pengangkatan Kolonel Bambang Utoyo sebagai KSAD menggantikan Jendral Bambang Sugeng dengan pangkat Jendral Mayor yang diboikot oleh Kolonel Zulkifli Lubis wakil KSAD yang merasa lebih berhak menduduki jabatan KSAD tersebut. Akibatnya pelantikan Bambang Utoyo gagal dan Kolonel Zulkifli Lubis diskorsing sementara waktu namun kemudian dicabut kembali. Setelah kabinet Ali Sastroamidjoyo I mengembalikan mandatnya, Indonesia menjadi demisioner⁹. Demisionernya kabinet Ali Sastroamidjoyo I, Indonesia kembali dihadapkan pada permasalahan yang sama, yakni kekosongan pemerintahan. Selama tujuh belas hari Indonesia mengalami krisis kabinet dan untuk kelangsungan pemerintahan harus dibentuk kabinet baru sesuai dengan UUDS 1950.

Baru dua hari setelah pengunduran kabinet diterima, selaku pengganti Presiden Soekarno, Wakil Presiden Moh. Hatta memulai babak baru untuk segera mengadakan *hearing*¹⁰ dengan pimpinan-pimpinan partai politik dan golongan. Mohammad Hatta mengadakan *hearing* (dengar pendapat) berturut-

⁹ Demisioner adalah keadaan suatu kabinet yang telah mengembalikan mandat kepada kepala negara. Kabinet ini tetap melaksanakan tugas sehari-hari sambil menunggu dilantiknya kabinet baru. (B.N. Marbun. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2003, hlm. 114).

¹⁰ Hearing yaitu kegiatan diskusi yang dilakukan para pimpinan partai dengan presiden untuk menentukan atau mengambil kesepakatan dalam menghadapi masalah.

turut selama 3 hari yang berlangsung dari tanggal 26-28 Juli yang bertempat di kantor Wakil Presiden Merdeka Utara. *Hearing* pendapat pertama dimulai pada tanggal 26 Juli pukul 09.00 WIB dan berlangsung sampai pukul 13.30 WIB, dalam waktu itu telah selesai didengar 7 parpol. Ketujuh parpol itu adalah Masyumi yang dalam hal ini diwakili oleh Moh. Natsir, Dr. Sukiman, dan Mr. Burhanuddin Harahap; PNI diwakili Sidik Joyosukarto, S. Mangunsakoro, Sahilal Rasjad; PIR Hazairin diwakili Syamsudin St Makmur, T.Noor, Djanuismadi; PIR Wongso diwakili oleh S. Kartohadikusuma, Mr. Latuharhary dan Djamhuri; PKI diwakili oleh D.N Aidit, Ir. Sukirman dan Lukman; PSI diwakili oleh Subadio Sastrosatomo, Hamid Algadri dan D. Syahrurah; sementara partai politik yang terakhir dalam *hearing* kemarin itu ialah PRN yang diwakili Bebassa Daeng Lalo, Rustam Palidih, S. Cokrosisworo, dan Loah.¹¹ Muncul beberapa pendapat pada *hearing* hari pertama, diantaranya pendapat dari PIR Hazairin, Moh. Natsir (Masyumi), PNI, PIR Wongsonegoro dan PKI. PIR Hazairin menghendaki kabinet yang dipimpin oleh Hatta tetapi harus dengan persetujuan Parlemen. Moh. Natsir berpendapat yang dihadapi saat ini bukan krisis kabinet melainkan krisis gezag dan bukan saja membentuk kabinet tetapi mengembalikan dari gezag itu dan jalan yang akan memberikan terlaksananya pengembalian gezag adalah dengan pembentukan kabinet Presidensil. PNI berpendapat masalah ini akan dibawa kesidang DP PNI yang akan diadakan secepat mungkin. PIR Wongsonegoro menghendaki parlementer zaken kabinet dengan mendapat

¹¹ Merdeka, 27 Juli 1955, hlm. 1.

dukungan langsung dari partai-partai dari Parlemen sedangkan pendapat yang terakhir dari PKI yaitu PKI menghendaki kabinet parlementer.

Keesokan harinya tanggal 27 Juli masih ditempat yang sama *hearing* dilanjutkan kembali dengan fraksi Persatuan Progresif, Demokrat, Partai Katolik, Partai NU, Parindra, Partai Buruh, Parkindo, Partai Murba, dan PSII, sedangkan tanggal 28 Juli *hearing* berlangsung dengan fraksi SKI, SOBSI, BTI, GTI, dan PERTI.¹² Dalam proses *hearing* tersebut disampaikan keinginan para pemimpin partai untuk membentuk kabinet baru yang kuat.

Proses *hearing* yang berlangsung dari tanggal 26-28 Juli 1955 di kantor Wakil Presiden Merdeka Utara telah membawa hasil. Akhirnya pada hari jum'at tanggal 29 Juli 1955 pukul 11.55 WIB, Wakil Presiden Moh. Hatta menunjuk 3 orang formatur (pembentuk) kabinet baru yaitu Sukiman (Masyumi), Wilopo (PNI), dan Assaat (Non Partai). Assaat diharapkan mampu menjembatani kedua partai tersebut.¹³ Kabinet yang diharapkan adalah suatu kabinet yang yang mendapat dukungan cukup dalam Dewan Perwakilan Rakyat yang terdiri dari orang-orang yang jujur dan disegani. Ketiga formatur tersebut diberi batas waktu selama seminggu untuk mengusahakan pembentukan kabinet baru. Ketiga formatur tersebut mengadakan rapat yang kedua selama 2,5 jam, rapat pertama diadakan pada hari Sabtu malam tanggal

¹² P.N. H. Simanjuntak. *Kabinet-kabinet Republik Indonesia dari Awal Kemerdekaan sampai Reformasi*. Jakarta: Djambatan. 2003, hlm. 148. Lihat juga Merdeka, 26 Juli 1955.

¹³ Merdeka, 1 Agustus 1955, hlm. 1.

30 Juli 1955 yang bertempat di gedung Dewan Menteri.¹⁴ Program kabinet yang akan dibentuk adalah mengembalikan wibawa Pemerintah termasuk kepercayaan dari tentara dan masyarakat umumnya, serta melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang tetap sehingga pembentukan parlemen dapat pula terjamin.¹⁵ Dengan program khusus seperti ini tentu kesulitan tidak lagi terletak pada penyusunan program dan kebijaksanaan kabinet, tetapi lebih pada orang-orang yang akan duduk dalam kabinet.

Tanggal 1 Agustus 1955, formatur kabinet menghadapi kesulitan. Kesulitan itu berkisar kepada tuntutan mutlak dari pihak Masyumi untuk menduduki kursi Perdana Menteri dan dua kursi Kementerian penting lainnya, tetapi keinginan itu ditolak PNI yang juga menghendaki kursi Perdana Menteri didapat oleh PNI.¹⁶ Kesulitan itu susah dipecahkan, sehingga sebelum rapat dimulai baik Wilopo maupun Sukiman perlu mengadakan pertemuan dengan masing-masing pimpinan dari partainya. Karena kesulitan itu susah untuk diatasi, kemudian Asaat mengusulkan agar Hatta dijadikan sebagai Perdana Menteri dan usul itu disetujui formatur lainnya. Pelaksanaannya akan diusahakan melalui Parlemen agar hambatan konstitusional dapat diatasi. Hatta pun bersedia menjadi Perdana Menteri, apabila disetujui oleh Parlemen. Resolusi dari Masyumi ini disetujui oleh Asaat dan Wilopo serta disetujui oleh para formatur agar Masyumi dan PNI mengemukakan hal ini pada

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Abadi, 1 Agustus 1955, hlm. 1.

¹⁶ Merdeka, 2 Agustus 1955, hlm. 2.

Parlemen. Namun Masyumi melihat PNI tidak bersungguh-sungguh dalam tugasnya dan oleh karena itu Sukiman tidak perlu melanjutkan tugasnya. Persoalan ketidakseriusan PNI itu nampaknya menemui jalan buntu. Ketiga tokoh ini tidak berhasil membentuk kabinet baru. Akhirnya Rabu, tanggal 3 Agustus 1955 ketiga formatur mengembalikan mandatnya kepada Wakil Presiden Moh. Hatta karena dirasa pembentukan kabinet baru mengalami banyak hambatan dan kesulitan.

Setelah pengembalian mandat oleh ketiga formatur tersebut, pada hari yang sama Hatta menunjuk Mr. Burhanuddin Harahap (Masyumi) untuk membentuk kabinet baru tentunya dengan memperoleh dukungan yang cukup dalam Dewan Perwakilan Rakyat yang didalamnya duduk orang-orang jujur dan disegani, yang bertugas terutama mengembalikan kewibawaan atau gezag moril Pemerintah i.c. kepercayaan Angkatan Darat dan Masyarakat kepada Pemerintah serta melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan menyelenggarakan terbentuknya Parlemen baru. Burhanuddin Harahap dipilih oleh Hatta karena dianggap seorang yang lebih akseptabel bagi banyak kalangan, ia yang berumur 38 tahun mencoba mengikutsertakan PNI. Namun usaha tersebut menemui jalan buntu. Akhirnya pada tanggal 11 Agustus 1955 Burhanuddin Harahap berhasil membentuk kabinet baru tanpa ikut sertanya PNI.¹⁷ Tidak ikut sertanya PNI bermula dari usul PNI yang tidak dapat diterima Masyumi. Dalam usul pertamanya PNI mencalonkan Hardi, Sunario, dan Rambitan sebagai Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri

¹⁷ Deliar Noer. *Partai Islam di tengah Pentas Nasional*. Jakarta: Grafiti Press. 1987, hlm. 245.

dan Menteri Pekerjaan Umum. Usul keduanya, PNI mencalonkan A.K Gani sebagai Wakil Perdana Menteri serta mengusulkan agar kursi Pertahanan tidak diduduki Masyumi. Tanggal 11 Agustus 1955, Kabinet pimpinan Burhanuddin Harahap diumumkan telah disahkan dengan Surat Keputusan Wakil Presiden tanggal 11 Agustus 1955 No. 141 tahun 1955. Keesokan harinya tanggal 12 Agustus 1955 pukul 08.00 WIB kabinet baru ini dilantik oleh Wakil Presiden Moh. Hatta di Istana Negara, selanjutnya pukul 10.30 diadakan timbang terima dengan kabinet Ali demisioner bertempat di gedung Dewan Menteri Pejambon.¹⁸

C. Susunan Kabinet Burhanuddin Harahap

Kabinet Burhanuddin Harahap merupakan kabinet koalisi yang terdiri dari beberapa partai dan hampir merupakan kabinet Nasional, karena jumlah partai yang tergabung dalam koalisi kabinet ini semua berjumlah 13 partai. Kabinet ini juga sering disebut kabinet koalisi, hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa partai yang tidak duduk dalam kabinet seperti PNI dan beberapa partai lainnya. Susunan kabinet baru ini terdiri dari partai Masyumi, PIR Hazairin, PSII, Demokrat, NU, PSI, PKRI, Partai Buruh, PRN, Parindra, Parkindo, dan PRI serta seorang tidak berpartai. PNI dalam susunan kabinet ini tidak ikut serta. Sesuai nama kabinet ini, Mr. Burhanuddin Harahap dari Masyumi sebagai formatur menempatkan diri sebagai perdana menteri. Proses terbentuknya kabinet Burhanuddin Harahap ini agak mengalami kesulitan yaitu

¹⁸ Merdeka, 12 Agustus 1955, hlm. 1.

sampai empat kali Wakil Presiden membentuk formatur kabinet, barulah yang keempat kalinya berhasil.

Kabinet Burhanuddin Harahap mulai menjalankan tugasnya pada tanggal 12 Agustus 1955 setelah diadakan pelantikan dan serah terima dari kabinet Ali I. Jumlah menteri seluruhnya termasuk Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Menteri Departemental, Menteri Muda, dan Menteri Negara semuanya 23 orang.¹⁹ Partai-partai yang anggotanya ada di kabinet Burhanuddin Harahap ini antara lain: Masyumi (4 Menteri), PIR Hazairin (2 Menteri), PSII (2 Menteri), Demokrat (1 Menteri), NU (2 Menteri), PSI (2 Menteri), PKRI (1 Menteri), Partai Buruh (2 Menteri), PRN (2 Menteri), Parindra (2 Menteri), Parkindo (1 Menteri), PRI (1 Menteri), dan seorang menteri lagi tidak mewakili partai yaitu: Syamsuddin Sutan Makmur sebagai menteri Penerangan.

Kabinet ini didominasi oleh partai Masyumi walaupun terdapat banyak partai dalam kabinet ini, tetapi seakan-akan hanya menjadi pelengkap saja. Selain itu, ada pihak yang menyebut kabinet ini sebagai kabinet Masyumi karena Masyumilah yang mendominasi kabinet ini. PNI tidak duduk dalam kabinet ini, tetapi PNI bersama-sama PIR Wongsonegoro, SKI, PKI dan Progresif bertindak sebagai oposisi. Seakan-akan kabinet ini sebagai ganti kabinet Ali- Wongso-Arifin, karena pada masa Kabinet Ali I sebagai partai

¹⁹ Bibit Suprpto. *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1985, hlm. 174.

yang besar Masyumi untuk pertama kali tidak duduk dalam kabinet tersebut dan bertindak sebagai oposisi.

Adapun komposisi kabinet Burhanuddin Harahap²⁰ adalah sebagai berikut.

1. Perdana Menteri : Mr. Burhanuddin Harahap (Masyumi)
2. Wakil Perdana Menteri I : R.Djanu Ismadi (PIR Hazairin)
3. Wakil Perdana Menteri II : Harsono Cokroaminoto (PSII)
4. Menteri Luar Negeri : Mr. Ide Anak Agung Gede Agung
(Demokrat)
5. Menteri Dalam Negeri : Mr. R. Sunaryo (NU)
6. Menteri Pertahanan : Mr. Burhanuddin Harahap (Masyumi)
7. Menteri Keuangan : Prof. Dr. Sumitro Joyohadikusumo
(PSI)
8. Menteri Perekonomian : I.J. Kasimo (PKRI)
9. Menteri Pertanian : Moh. Sardjan (Masyumi)
10. Menteri Muda Perhubungan : Asraruddin (Partai Buruh)
11. Menteri Perhubungan : F. Loah (PRN)
12. Menteri Agraria : Mr. Gunawan (PRN)
13. Menteri Pekerjaan Umum : Rd. Pandji Suroso (Parindra)
14. Menteri Kehakiman : Mr. Lukman Wariadinata (PSI)
15. Menteri Perburuhan : Iskandar Tejasukmana (Partai Buruh)

²⁰ Departemen Penerangan. *Susunan Kabinet RI 1945-1970*. Jakarta: Pradjna Paramita. 1970, hlm. 18-19. Lihat juga Merdeka, 13 Agustus 1955.

16. Menteri Sosial : Sudibyo (PSII)
17. Menteri Agama : K.H. Moh Ilyas (NU)
18. Menteri P.P dan K : Prof. Ir. R.M. Suwandi (Parindra)
19. Menteri Kesehatan : Dr. J. Leimena (Parkindo)
20. Menteri Penerangan : Syamsuddin Sutan Makmur
21. Menteri Negara : Abdul Halim (Masyumi)
22. Menteri Negara : Sutomo/ Bung Tomo (PRI)
23. Menteri Negara : Drs.Comala Adjaib Nur (PIR Hazairin)

Menteri-menteri dalam kabinet Burhanuddin Harahap ini banyak berasal dari dari Kabinet sebelumnya (Ali I) diantaranya: Mr. Sunaryo (Menteri Dalam Negeri), R.P. Suroso (Menteri Sosial), dan Sudibyo (Menteri Urusan Kesejahteraan Rakyat). Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pemerintah Indonesia, Kabinet ini banyak mengalami tambal sulam dengan adanya pergantian para menteri. Periode ini pergantian para menteri sudah menjadi hal biasa. Baik karena menterinya mengundurkan diri ataupun diganti.²¹Pergantian ini antara lain sebagai berikut.

1. Karena Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga belum dilantik, maka untuk sementara dirangkap oleh Wakil Perdana Menteri I Ismadi. Baru pada tanggal 26 Agustus 1955, R. P Soeroso (Parindra) dilantik menjadi

²¹ P.N. H. Simanjuntak, *op. cit.*, hlm. 151.

Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga yang baru (berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 142 Tahun 1955).

2. Karena Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan belum dilantik, maka untuk sementara dirangkap oleh Wakil Perdana Menteri II Harsono. Baru pada tanggal 26 Agustus 1955, Prof. Ir. Suwandi (Parindra) dilantik menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang baru (berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 142 Tahun 1955).
3. Tanggal 18 Januari 1956, Wakil Perdana Menteri II Harsono Cokroaminoto dan Menteri Sosial Sudibyo, yang keduanya dari PSII mengundurkan diri dari jabatannya. Kemudian, jabatan Wakil Perdana Menteri II dihapus dan jabatan Menteri Sosial *ad interim* dirangkap oleh Menteri Sutomo.
4. Tanggal 19 Januari 1956, Menteri Dalam Negeri Sunaryo dan Menteri Agama Moh. Ilyas yang keduanya dari NU megundurkan diri dari jabatannya. Kemudian, jabatan Menteri Dalam Negeri *ad interim* dirangkap oleh Menteri Suroso dan Menteri Agama *ad interim* dirangkap oleh Menteri Sarjan.

BAB III

PROGRAM KERJA PEMERINTAHAN KABINET BURHANUDDIN DAN PELAKSANAANNYA

Kabinet kelima pada masa demokrasi Parleментар mulai menjalankan tugasnya pada Agustus 1955. Setelah resmi dilantik, kabinet yang didampingi oleh Burhanuddin Harahap sebagai Perdana Menteri ini perlahan menyelesaikan permasalahan demi permasalahan yang ditinggalkan oleh kabinet sebelumnya. Sembari mulai menjalankan program kerja yang telah diajukannya kepada Wakil Presiden.

A. Program Kerja Kabinet Burhanuddin Harahap

Program kerja yang diusung kabinet ini juga tidak jauh berbeda dengan program kerja kabinet-kabinet sebelumnya. Burhanuddin hanya melengkapi dan menyempurnakan beberapa hal yang dianggap penting untuk dimasukkan dalam program kerjanya, hal ini mengingat bahwa Indonesia yang baru saja merdeka pada saat itu memiliki masalah kompleks yang tidak dapat diselesaikan oleh satu periode kabinet saja. Program kerja yang dijadikan landasan kabinet baru ini ialah rancangan program kerja yang disetujui ketiga formatur sebelumnya, yaitu Sukiman, Wilopo dan Assaat. Berikut merupakan Program Kerja yang telah diajukan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap:¹

1. Mengembalikan kewibawaan (Gezag) moril pemerintah, i.c. kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada Pemerintah.
2. Melaksanakan Pemilihan Umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan menyegerakan terbentuknya Parlemen yang baru.
3. Menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi sedapat-dapatnya dalam tahun 1955 ini juga.
4. Menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi.
5. Memberantas korupsi.

¹ ANRI. Kabinet Presiden RI No. 1396 tahun 1955, hlm. 13.

6. Meneruskan perjuangan mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia.
7. Memperkembangkan politik kerjasama Asia-Afrika, berdasarkan politik bebas dan aktif menuju perdamaian.

B. Pelaksanaan Program Kerja Kabinet Burhanuddin Harahap

Program kerja yang telah diajukan kabinet Burhanuddin Harahap tersebut dilaksanakan semaksimal mungkin, meskipun demikian masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Berikut akan dipaparkan apa saja program kabinet Burhanuddin Harahap dan bagaimana pelaksanaannya

1. Pengembalian Kewibawaan

Mengembalikan kewibawaan (Gezag) moril pemerintah, i.e. kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada Pemerintah merupakan program utama yang diusung oleh Kabinet Burhanuddin Harahap. Mengingat dalam periode 1950-1955 ini sering jatuh bangunnya kabinet. Selama periode tersebut Indonesia telah berganti kabinet 4 kali. Mulai dari kabinet Natsir, Sukiman, Wilopo dan Ali Sastroamidjoyo I. Jadi satu kabinet rata-rata memerintah 1 tahun, bahkan ada yang belum genap memerintah 1 tahun sudah jatuh. Sering jatuhnya kabinet disebabkan oleh sulitnya membentuk kabinet koalisi yang bertahan lama. Hal tersebut juga disebabkan oleh jumlah partai dan fraksi yang banyak yang masing-masing tidak mempunyai dominasi. Selain itu, seringnya kabinet mengalami perubahan maka pembangunan tidak berjalan lancar. Pada akhirnya masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongan. Program kabinet yang satu belum selesai sudah disusul program yang lain dari kabinet yang lain pula. Jadi, sebagai akibatnya terjadilah

krisis kabinet, krisis pemerintahan, krisis ekonomi, banyaknya manipulasi dan korupsi, serta kesenjangan kemajuan antara pusat dan daerah (antara Jawa dan luar Jawa), terjadi juga krisis kepercayaan dan krisis kewibawaan. Maka dari itu, kabinet Burhanuddin Harahap berkeinginan untuk mengembalikan kewibawaan pemerintah di mata Angkatan Darat dan masyarakat. Karena pemerintahan dalam suatu negara itu perlu mendapat kepercayaan dari masyarakat dan para aparturnya.

Ketika Indonesia masih dalam masa penjajahan, kewibawaan pemerintah didasarkan pada ketakutan dari pihak rakyat jelata. Namun, ketika Indonesia telah merdeka rakyat mengabdikan pada para pemimpin-pemimpinnya sebagai rasa terimakasih karena pemimpin telah bersedia memperjuangkan kemerdekaan Negara ini. Kemerdekaan itu telah tercapai dan kewibawaan Pemerintah tidaklah lagi berdasarkan ketakutan dari rakyat, akan tetapi ditimbulkan oleh sikap kasih sayang dari pemimpin-pemimpinnya dalam pemerintahan terhadap rakyat. Tetapi sangat disesalkan, selain orang-orang yang bertanggungjawab ternyata terdapat orang-orang yang tidak bertanggungjawab dan menyalahgunakan jabatan dalam menjalankan pemerintahan. Pemimpin-pemimpin terkadang mempergunakan kekuasaan yang didasarkan pada suatu mayoritas suara di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sudah lama dipandang tidak sesuai dengan kehidupan dalam masyarakat. Selain itu, kekuasaan tersebut seringkali tidak diimbangi dengan moral dan kesusilaan, sehingga menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat dan pegawai. Hal ini

sangat mudah sekali hilangnya kewibawaan Pemerintah terhadap aparaturnya dan juga terhadap masyarakat yang mengharapkan tuntunan, bantuan dan keadilan dari Pemerintahnya.

Kehilangan kewibawaan Pemerintah terhadap aparaturnya terlihat nyata dikalangan Angkatan Darat yang akhirnya turut menyebabkan keruntuhan kabinet-kabinet yang lalu. Dilihat dari sisi kesejahteraan, militer Indonesia lahir dari tiga elemen pokok yang masing-masing mempunyai karakteristik yang sangat berbeda. Ketiga elemen pokok itu adalah KNIL, PETA dan Laskar.² Pada saat pembentukan partai-partai politik, maka laskar-laskar ini bergabung dengan partai-partai yang seideologi. Pada mulanya laskar ini tumbuh guna melawan Belanda, akan tetapi setelah terbentuknya TRI (Tentara Rakyat Indonesia) laskar-laskar tersebut menimbulkan masalah, terutama mengenai masalah koordinasi pertahanan. Pandangan politik laskar-laskar tersebut lebih sesuai dengan pandangan politik partainya daripada strategi militer sehingga tidak selalu searah. Sistem pemerintahan parlementer telah menempatkan militer sebagai kekuatan ekstra parlementer.³ Apalagi kaum sipil seringkali campur tangan dalam urusan intern militer, bahkan militer sering digunakan untuk kepentingan politiknya. Hal itu tentu saja sangat mengecewakan kaum militer dan menunjukkan hubungan yang tidak harmonis antara sipil dan militer.

² Suswanta. *Keberanian untuk Takut: Tiga Tokoh Masyumi dalam Drama PRRI*. Yogyakarta: Avyrouz. 2000, hlm. 41.

³ *Ibid.*, hlm. 43.

Periode tahun 1950-1952, perasaan antipati yang telah tertanam dalam pihak militer terhadap pihak sipil semakin bertambah, walaupun pada masa Kabinet Natsir (September 1950-Maret 1951) terdapat kerjasama antara pemerintahan Natsir (pihak sipil) dengan militer yang cukup harmonis. Namun keadaan tersebut hanya sebentar, terutama sejak berkuasanya Kabinet Sukiman (Maret 1951-Februari 1952). Kemudian pada masa kabinet pengganti Sukiman, yaitu kabinet Wilopo, konflik antara pihak sipil dengan militer mulai timbul lagi dengan terjadinya suatu peristiwa yang disebut “Peristiwa 17 Oktober 1952”.⁴

Peristiwa 17 Oktober 1952 merupakan suatu peristiwa dimana terjadi demonstrasi masyarakat yang menuntut dibubarkannya Parlemen (Dewan Perwakilan Sementara) dan diadakan Parlemen baru. Selain itu, mereka juga menuntut agar secepat mungkin diadakan pemilihan umum serta diadakan pembersihan dalam kementerian-kementerian. Demonstrasi ini terjadi pada hari Jum'at dimana massa bergerak menuju gedung DPR dan kemudian ke Istana Merdeka untuk menyampaikan tuntutan tersebut kepada Presiden. Awalnya demonstrasi diikuti 5000 orang demonstran, tetapi lama-lama bertambah menjadi 30.000 orang demonstran. Menghadapi demonstrasi ini sebelumnya telah diadakan penjagaan pada posisi yang strategis seperti di Lapangan Banteng dan Lapangan Merdeka. Pada malam hari sebelum terjadi demonstrasi Presiden Soekarno telah diberitahu oleh Kolonel dr. Mustopo. Oleh sebab itu beliau tidak kaget atas

⁴ Yahya A. Muhaimin. *Perkembangan Militer Dalam Politik di Indonesia 1945-1966*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2002, hlm. 73.

adanya demonstrasi masyarakat. Di hadapan para demonstran, Presiden menjanjikan akan segera mengadakan pemilu, tetapi tuntutan untuk membubarkan Parlemen ditolak. Penolakan tersebut didasarkan pada pemikiran jika Parlemen (DPR) dibubarkan, berarti itu akan menjadikan Presiden diktator. Presiden tidak memenuhi tuntutan demonstran hingga akhirnya para demonstran membubarkan diri dengan sendirinya.

Peristiwa 17 Oktober 1952 ini dilatar belakangi permasalahan Angkatan Perang di Indonesia yang masih sangat heterogen pada masa itu. Pemerintah ingin menciptakan angkatan perang yang tidak terpecah-pecah dan sejalan dengan tuntutan jaman. Selain itu demobilisasi dan pengurangan anggaran Kementerian Pertahanan perlu dilaksanakan mengingat negara mengalami krisis keuangan pada saat itu.⁵ Demi menyederhanakan Angkatan Perang tersebut Kepala Staff Angkatan Darat (KSAD) dibawah pimpinan Jendral A. H. Nasution akan membangun TNI dan memasukan bekas tentara *Koninklijk Nederlands Indisch Leger* (KNIL) kedalamnya. Selain itu juga munculnya rencana pemerintah untuk memutasi panglima-panglima melahirkan permasalahan dalam tubuh angkatan perang itu sendiri.⁶

Kebijakan KSAD (Kepala Staf Angkatan Darat) ini memunculkan rasa tidak puas dari beberapa perwira TNI AD. Salah satunya adalah

⁵ Herbert Feith. *The Wilopo Cabinet 1952-1953 : A Turning Point in Post-Revolutionary Indonesia*. New York: Cornel University Press. 2009, hlm. 123.

⁶ Abdul Haris Nasution. *Peristiwa 17 Oktober 1952 : Ketika "Moncong" Meriam Mengarah ke Istana Merdeka*. Yogyakarta : Narasi. 2013, hlm. 17.

Kolonel Bambang Supeno dari Jawa Timur yang mengajak kalangan tentara untuk mengajukan tuntutan agar mengganti pimpinan Angkatan Darat (AD). Ajakan Kol. Bambang Supeno tersebut justru menimbulkan pro dan kontra di kalangan tentara. Beberapa golongan pro karena menganggap kebijakan KSAD dianggap tidak menghargai para pejuang dan telah menganak tirikan tentara pejuang gerilya. Hal ini dikarenakan banyak tentara bekas KNIL yang mendapatkan pangkat dan jabatan yang lebih baik dibanding tentara gerilya. Sedangkan golongan kontra tidak menyetujui cara Kolonel Bambang Supeno. Mereka menganggap cara tersebut dapat merusak solidaritas Angkatan Perang. Dalam pertemuan pimpinan AD pada 12 Juli 1952 mereka tidak menyetujui usulan Kolonel Bambang Supeno.

Keesokan harinya Kolonel Bambang Supeno mengirimkan surat kepada Perdana Menteri Wilopo, Menteri Pertahanan Hamengkubuwono IX, dan Parlemen. Dalam suratnya Kolonel Bambang Supeno menyampaikan ketidak puasannya terhadap pimpinannya, dan ia menuntut penggantian KSAD. Selain surat itu, muncul surat baru yang datang dari dua anggota parlemen dari Indonesia Timur yaitu Bebas Daeng Lolo dan Rondonuwu.⁷ Dalam suratnya mereka mencela kebijaksanaan Kolonel Gatot Subroto Panglima Tentara Teterium VII/Indonesia Timur dalam

⁷ A.B. Lopian, dkk. *Terminologi Sejarah 1945-1950&1950-1959*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1996, hlm. 246.

melaksanakan pemulihan keamanan di Sulawesi Selatan.⁸ Kedua surat tersebut menimbulkan kegemparan dalam Parlemen.

Antar anggota Parlemen terjadi saling tuduh menuduh bahwa ada partai atau golongan tertentu yang ingin menguasai Angkatan Perang dan Kementerian Pertahanan. Perdebatan sengit tersebut memunculkan beberapa mosi mengenai hal tersebut. Mosi-mosi itu berasal dari Zainul Baharudin, Mosi Kasimo, dan Mosi Manai Sophian. Mosi Zainul Baharudin didukung oleh Partai Murba, Partai Buruh, PRN, dan PKI. Mosi Zainul Burhanuddin berasal dari non partai. Mosi tersebut bersifat tidak percaya terhadap pimpinan Angkatan Perang dan Kementerian Pertahanan. Disusul lagi dengan permintaan supaya diadakan reorganisasi dan meminta secepatnya dibentuk Undang-Undang Pokok Pertahanan untuk mengatur lebih lanjut kedudukan hukum dari tiap anggota Angkatan Perang.⁹ Mosi tersebut ditolak dengan 39 suara setuju dan 80 suara menentang.

Akhirnya dikeluarkan mosi tandingan, yaitu mosi Kasimo/Natsir. Mosi Kasimo mendapat dukungan dari Masyumi, Partai Buruh, Parkindo, dan Parindra. Dalam mosi ini mendesak pembentukan suatu panitia negara untuk pembinaan Angkatan Perang dan Kementerian Pertahanan. Mosi ini ditarik kembali karena merasa usulan ini sependapat dengan pemerintah. Mosi yang ketiga adalah Mosi Manai Sophiaan yang dapat dikatakan mosi penyempurna mosi Kasimo Natsir. Hal ini dikarenakan isi mosi Sophiaan

⁸ Abdul Haris Nasution. *op. cit.* hlm. 73.

⁹ P. N. H Simanjuntak. *Kabinet-kabinet Indonesia dari Awal Kemerdekaan sampai Reformasi*. Jakarta: Djambatan. 2003, hlm. 130

mirip dengan Mosi Kasimo/Natsir. Isinya yaitu mendesak Pemerintah agar membentuk suatu panitia yang terdiri dari anggota-anggota Parlemen, dan para wakil Pemerintah untuk menghadapi dan memberi penyelesaian terhadap masalah-masalah yang timbul akibat perselisihan pembahasan mengenai masalah Angkatan Perang tersebut. Mosi Manai Sophian didukung oleh NU dan PSII. Tetapi diam-diam Mosi Manai Sophian mendapat dukungan dari Presiden Soekarno melalui Mr. Ishaq dan Mr. Sunaryo mendesak agar pimpinan PNI (Ali Sastroamidjoyo dan Sartono) ikut mendukung mosi tersebut.¹⁰

Setelah diadakan pemungutan suara mosi ini diterima dengan 65 suara setuju dan 54 suara menolak.¹¹ Dengan diterimanya mosi ini memicu sekelompok Perwira AD untuk melakukan tindakan protes karena menganggap Parlemen telah mencampuri urusan eksekutif Angkatan Perang. Fokus pembicaraan dalam Parlemen meluas, oleh pihak-pihak yang kontra diberkan semua mengenai kelemahan Angkatan Darat, seperti keretakan dalam tubuh Angkatan Darat sendiri sampai masalah korupsi. Berita tentang pro kontra dalam Parlemen akhirnya terdengar ketelinga masyarakat luas khususnya pers. Hal ini pula menyebabkan puncak kemarahan kaum militer yang tidak hanya ditujukan kepada Parlemen namun juga partai-partai politik. Dengan adanya rentetan-rentetan peristiwa-peristiwa tersebut maka tanggal 17 Oktober hanya merupakan

¹⁰ Yahya Muhaimin. *op.cit.*, hlm. 77.

¹¹ Abdul Haris Nasution. *op. cit.*, hlm.67.

suatu ledakan dari sumber pertentangan yang sudah ada didalam kalangan Angkatan Darat.

Terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952, membawa dampak perpecahan dikalangan Angkatan Darat. Kolonel A.H. Nasution diberhentikan dari KSAD dan perwira militer lainnya yang tersandung peristiwa 17 Oktober juga mendapat sanksi yang sama. Setelah Kolonel A.H Nasution diberhentikan dari KSAD (Kepala Staf Angkatan Darat), kedudukannya digantikan oleh Kolonel Bambang Sugeng pada tanggal 4 November 1953. Sementara itu pemerintahan Kabinet Wilopo berakhir, dan digantikan oleh kabinet Ali Sastroamidjoyo I. Pada masa pemerintahan Ali I, Menteri Pertahanan Mr. Iwa Kusumasumantri membuat peraturan yang menghapus KSAP (Kepala Staf Angkatan Perang) yang selama ini dijabat oleh Mayor T.B. Simatupang.¹² Karena peraturan tersebut, Mayor T.B Simatupang dianggap berhenti dari jabatannya. Selain itu, Menteri Pertahanan Mr. Iwa Kusumasumantri juga ikut campur dalam pengangkatan perwira-perwira di dalam Angkatan Darat tanpa berkonsultasi dengannya sebagai KSAD sehingga suasana semakin memanas dan seakan-akan timbul pengelompokan. Sikap dari Menteri Pertahanan Mr. Iwa Kusumasumantri itu menimbulkan kegelisahan di dalam tubuh AD (Angkatan Darat) terutama kelompok pro 17 Oktober 1952.

¹² Yahya Muhaimin. *op. cit.*, hlm.73.

Melihat kondisi yang demikian, atas inisiatif dan usaha dari beberapa Perwira TNI baik yang pro 17 Oktober seperti Kolonel Suprpto, Kolonel Sutoko, dan Kolonel S.Parman maupun dari anti 17 Oktober seperti Kolonel Zulkifli Lubis dan Kolonel Sapari mengadakan pertemuan guna menciptakan kembali kesatuan TNI yang retak sejak 17 Oktober 1952. ¹³Usaha untuk menciptakan kesatuan AD (Angkatan Darat) ini mendapat dukungan yang besar dari KSAD (Kepala Staf Angkatan Darat) Kolonel Bambang Sugeng. Akhirnya pada tanggal 17 Februari 1955 berhasil diadakan suatu pertemuan para pimpinan perwira AD (Angkatan Darat) yang dihadiri oleh 280 perwira dari kedua belah pihak. Pertemuan ini berakhir pada tanggal 25 Februari 1955, dengan menghasilkan sebuah resolusi yang dapat diterima oleh seluruh perwira yang menghadiri pertemuan tersebut. Resolusi tersebut disahkan oleh KSAD Kolonel Bambang Sugeng. Selain para perwira TNI, pertemuan keluarga di Yogyakarta ini juga telah dihadiri Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta dan Perdana Menteri Ali Sastroamidjoyo. Pada pertemuan kali ini menghasilkan sebuah resolusi yang kemudian dikenal dengan Piagam Keutuhan Angkatan Darat atau Piagam Yogyakarta yang ditandatangani bersama-sama dan berjanji di makam Jendral Sudirman. Piagam Yogyakarta itu berbunyi antara lain sebagai berikut:¹⁴

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Pusat Sejarah Militer Angkatan Darat. *Sejarah TNI Angkatan Darat 1945-1965*. Bandung: Pussemad. 1965, hlm. 170.

Kami para prajurit APRI (Angkatan Perang Republik Indonesia) yang karena berakat Tuhan yang maha kuasa dan disaksikan oleh presiden sebagai panglima tertinggi, wakil presiden, panji Angkatan Darat, perdana menteri, wakil perdana menteri, ketua DPRS, wakil pertahanan, para anggota pemerintahan pusat, ketua seksi pertahanan, dewan perwakilan rakyat sementara dan para pembesar setempat. Berkumpul bersama bersatu pada tanggal 25 Februari 1955 di Yogyakarta telah berbulat hati menghayatkan daya janji.

1. Angkatan Darat RI adalah sebagian dari pada persatuan dan kesatuan tenaga, tekad dan tujuan dari pada bangsa yang telah dihimpun di dalam kesatuan-kesatuan yang teratur dan bersenjata untuk membela Nusa dan Bangsa terhadap setiap musuh di dalam maupun luar tanah air. Oleh karena persatuan dan kesatuan itulah sendi utama dari kekuatan Angkatan Darat RI.
2. Jiwa yang bergaya hidup pada Angkatan Darat RI wajib dipelihara dan dipupuk sehingga tetap dapat mewujudkan prajurit pelopor pertahanan negara yang berbakti dengan tulus ikhlas.
3. Sifat kesederhanaan dan saling menghargai mewujudkan semangat gotong royong, semangat inilah yang wajib dimiliki setiap prajurit Indonesia.
4. Prajurit di Indonesia dalam pengabdianya adalah secita-cita, seperjuangan, senasib sehingga lahirlah sikap setia kawan yang wajib dijunjung tinggi dalam setiap prajurit.
5. Suri tauladan wajib ditanam di dalam setiap tingkah laku prajurit sebagai anggota Angkatan Darat RI pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Yogyakarta, 25 Februari 1955
 Rapat Perwira Angkatan Darat RI
 Ketua tertanda
 Kolonel Bambang Sugeng

Pertemuan di Yogyakarta itu juga menegaskan suatu pernyataan agar peristiwa 17 Oktober dianggap tidak pernah ada dan meminta kepada Pemerintah supaya sebelum hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1955, Pemerintah sudah memberikan penyelesaian secara formal mengenai kejadian tersebut dengan menyerahkan sepenuhnya kebijaksanaan Pemerintah. Hasil dari rapat para perwira TNI di Yogyakarta disambut Pemerintah dengan suka cita. Mengingat di Bandung

akan diadakan Konferensi Asia Afrika (KAA) yang berlangsung dari tanggal 18-24 April 1955. Di dalam persiapan konferensi ini, sangat dibutuhkan bantuan dari Angkatan Darat untuk mengamankan jalannya konferensi serta daerah Jawa Barat tempat diadakannya konferensi.

Tanggal 2 Mei 1955, Kolonel Bambang Sugeng selaku Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) meminta mundur dari jabatannya kepada Kabinet Ali.¹⁵ Ia merasa kurang mampu melaksanakan Piagam Yogyakarta yang telah dipercayakan kepadanya untuk mewujudkan kerukunan dan keutuhan TNI. Sembilan hari kemudian tepatnya tanggal 11 Mei 1955, Kabinet Ali menerima permintaan pengunduran diri Kolonel Bambang Sugeng tersebut. Untuk mengisi kekosongan jabatan KSAD (Kepala Staf Angkatan Darat) maka untuk sementara waktu secara otomatis Wakil KSAD Kolonel Zulkifli Lubis bertindak sebagai pejabat KSAD. Kabinet menetapkan akan mengangkat perwira dari kelompok anti 17 Oktober. Akhirnya pada tanggal 10 Juni, Kabinet Ali mengangkat Kolonel Bambang Utoyo sebagai KSAD baru, tetapi pimpinan TNI terutama pj. KSAD menolak pengangkatan Kolonel Bambang Utoyo. Sebab dirasa tidak berdasarkan kecakapan dan senioritas serta melanggar ketentuan Piagam Yogya. Pada tanggal 25 Juni, Kolonel Zulkifli Lubis menghadap Presiden guna memberi tahu bahwa dia tidak setuju dengan diangkatnya Kolonel Bambang Utoyo dan akan melakukan boikot.¹⁶ Bahkan, pada

¹⁵ Suswanta. *op. cit.*, hlm. 48.

¹⁶ Yahya Muhaimin. *op.cit.*, hlm. 85.

tanggal 27 Juni ketika Pemerintah mengadakan upacara pelantikan Kolonel Bambang Utoyo sebagai KSAD, para pimpinan TNI dan para Perwira yang diundang juga memboikotnya. Pada hari dan tanggal yang sama pula, Kolonel Zulkifli Lubis sebagai pejabat KSAD menolak untuk melaksanakan serah terima. Peristiwa ini akibat dari Pemerintah yang tidak mendapat dukungan Angkatan Darat, tidak dapat melaksanakan suatu tindakan terhadap Kolonel Zulkifli Lubis sehingga kewibawaan Pemerintah menurun apalagi dengan adanya mosi Zainul Baharuddin terhadap kebijaksanaan Menteri Pertahanan. Mosi tersebut mendorong Mr. Iwa Kusumasumantri mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Pertahanan. Akhirnya pada tanggal 13 Juli, Menteri Pertahanan Iwa Kusumasumantri mengundurkan diri. Krisis ini bertambah parah setelah partai-partai mendukung Pemerintah menarik dukungannya dan mengakibatkan jatuhnya Kabinet Ali Sastroamidjoyo I. Menghadapi krisis politik yang seperti ini, akhirnya pada tanggal 24 Juli 1955 Kabinet Ali menyerahkan mandatnya kepada Wakil Presiden Muhammad Hatta.

Jadi kehilangan kewibawaan Pemerintah terhadap aparaturnya khususnya Angkatan Darat itu bukan semata masalah pengangkatan KSAD baru tetapi lebih disebabkan karena disalahgunakannya kekuasaan Pemerintah dilapangan personil yang telah melampaui batas-batas kebijaksanaan politik, sehingga terlanggarlah norma-norma yang menjamin terpeliharanya keutuhan serta perkembangan yang sehat dari Angkatan Darat, sebagai suatu alat kekuasaan Negara yang penting. Selain

itu, militer tidak puas terhadap sistem pemerintahan yang ada karena tidak memperlakukan militer sebagai satu kekuatan politik yang besar.

Seperti yang diketahui, maka sesudah Kabinet Ali Sastroamidjoyo menyerahkan mandatnya pada tanggal 24 Juli 1955 dan sesudah Mr. Assaat, Dr. Sukiman Wiryosandjoyo dan Mr. Wilopo tidak berhasil menyusun kabinet. Terbentuklah kabinet baru dengan tampilnya Burhanuddin Harahap sebagai Perdana Menteri. Sebagai kabinet yang baru, pemerintah sadar bahwa segera diambil tindakan-tindakan yang serius untuk mengembalikan kewibawaan pemerintah terhadap rakyat dan Angkatan Darat sehingga terciptalah kepercayaan serta ketaatan dari aparaturnya maupun dari masyarakat sendiri. Untuk mengembalikan wibawa tersebut, pemerintah mengambil tindakan-tindakan sebagai berikut:¹⁷

- a. Mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi atau golongan ataupun partai.
Pemerintahan tidak akan menjalankan politik balas dendam, tetapi dimana perlu akan mengambil tindakan-tindakan korektif dengan tiada pilih-kasih dan dengan berdasarkan kejujuran dan keadilan, khususnya dikalangan pegawai yang menjadi aparatur Pemerintah.
- b. Sistem konco serta akibat-akibatnya dalam pengangkatan-pengangkatan dan mutasi-mutasi harus digantikan dengan ukuran objektif dan zakelijk.
- c. Terhadap negara-negara lain Pemerintah bersikap bahwa Indonesia bersungguh-sungguh melakukan kewajiban internasional, menjunjung tinggi perjanjian-perjanjian yang dibuatnya dan melalui jalan-jalan yang lazim mengadakan perubahan-perubahan yang diperlukannya dengan senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat dan negara sebagai pedoman.

¹⁷ *Keterangan dan Jawaban Pemerintah tentang Program Kabinet Burhanuddin Harahap 1955*. Jakarta: Kementerian Penerangan RI. 1955, hlm. 7.

- d. Warganegara asing akan diperlindungi menurut hukum-hukum internasional, baikpun pribadinya maupun kepentingannya sebagaimana juga warganegara Indonesia diperlakukan diluar negeri.

Tindakan-tindakan pokok untuk memulihkan kewibawaan Pemerintah terhadap Angkatan Darat ialah:

- a. Penunjukan Kepala Staf Angkatan Darat baru sesuai dengan dasar pemeliharaan jiwa keutuhan dan kemajuan Angkatan Darat.
- b. Peninjauan kembali peraturan dan cara-cara bekerja yang dianggap tidak selaras dengan dasar pemeliharaan keutuhan dan kemajuan Angkatan Darat khususnya, Angkatan Perang umumnya untuk disesuaikan dengan dasar-dasar itu.
- c. Mengadakan peraturan-peraturan baru yang menjamin perkembangan Angkatan Perang pada umumnya menurut saluran-saluran yang sehat menjadi alat kekuasaan Negara yang patuh dan bebas dari pengaruh pertikaian partai-partai politik.
- d. Menyelesaikan persolan disekitar 17 Oktober 1952 dari Angkatan Darat.

Akibat pertentangan yang terjadi pada tanggal 27 Juli 1955 itu, akhirnya Jendral Mayor Bambang Utoyo diberhentikan dan pemecatan terhadap Lubis dibatalkan. Kabinet juga mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan persoalan 17 Oktober 1952 dengan memutuskan tidak akan diadakan penuntutan-penuntutan di muka pengadilan sedangkan tindakan-tindakan selanjutnya disesuaikan dengan jiwa Piagam Yogya. Pemerintah juga mengambil kebijaksanaan untuk menempatkan kembali dalam jabatan aktif semua perwira yang telah dibebastugaskan dari tugasnya karena tersangkut peristiwa 17 Oktober. Sehubungan dengan diberhentikannya Bambang Utoyo dari KSAD, maka perlu diangkat KSAD yang baru karena tidak mungkin jika dibiarkan kosong dan hanya dikerjakan seorang Wakil KSAD saja. Pemerintah Burhanuddin Harahap

berusaha untuk secepatnya mengisi kekosongan itu, tetapi dalam hal ini Pemerintah terkesan lebih hati-hati.

Pada awal Oktober, Markas Besar Angkatan Darat (MBAD/Pimpinan TNI AD) mengajukan calon-calonnya untuk KSAD berdasarkan Piagam Yogya ialah: Simbolon, Gatot Subroto, dan Zulkifli Lubis.¹⁸ Karena tidak mudah bagi pemerintah untuk menjatuhkan pilihannya. Kelebihan Simbolon dari yang lain adalah Simbolon paling senior, komandan yang baik dengan pengalaman staf yang cukup lama dalam komando seluruh Sumatra di masa perang kemerdekaan tetapi tentu pengangkatannya tidak mendapat dukungan dari korps perwira bekas PETA, KNIL, atau Laskar mengingat ia bekas anggota Giyugun. Demikian Lubis dalam masalah senioritas dia jauh di bawah, dia tidak berpengalaman sama sekali dalam komandan lapangan serta pengangkatannya ditentang Presiden Soekarno karena perannya dalam Peristiwa Bambang Utoyo. Dibandingkan dari kedua calon lainnya, dukungan golongan dikalangan Angkatan Darat kepada Gatot Subroto lebih kecil lagi. Sebagai bekas Sersan KNIL, dia tidak mempunyai pengalaman staf namun terkenal baik sebagai komandan pasukan. Mengambil keputusan dari ketiga calon itu, kabinet merasa kesulitan “Dalam kemacetan tersebut dan berdasar Piagam Yogya, maka kabinet Burhanuddin Harahap memutuskan menggunakan *oportuneits-beginsel* dalam peristiwa”, dan kemudian mengajukan Kolonel A.H Nasution yang

¹⁸ Yahya Muhaimin. *op.cit.*, hlm. 88.

dinonaktifkan sejak Desember 1953 sebagai calon KSAD, di samping ketiga calon lainnya.

Gagasan untuk mengangkat kembali Nasution sebagai KSAD mendapat dukungan luas. Suatu survei yang diadakan secara rahasia oleh Markas Besar Angkatan Darat dan hasilnya disampaikan kepada kabinet menunjukkan mayoritas perwira dalam kedudukan yang penting, memilih Nasution dari calon yang lainnya. Bahkan perwira yang dahulu menentang peristiwa 17 Oktober pun sekarang memilih Nasution. Diantara semua calon yang harus dipertimbangkan, Nasutionlah yang menimbulkan keberatan paling kecil. Nasution tidak ambil bagian dalam konferensi Yogya dan tidak angkat bicara ketika terjadi krisis mengenai Bambang Utuyo. Akhirnya Pemerintah pada tanggal 27 Oktober 1955, memutuskan mengangkat Kolonel A.H Nasution sebagai KSAD yang baru. Kemudian tanggal 7 November 1955, Kolonel Nasution dilantik. Pelantikan itu juga mendapat restu dari Presiden Soekarno, para Panglima dan Angkatan Darat bahkan Presiden menaikkan pangkat Kolonel Nasution menjadi Jendral Mayor.¹⁹ Hal ini terbukti dari Order Harian Wakil KSAD Kolonel Zulkifli Lubis tertanggal 3 November 1955 yang berbunyi sebagai berikut:²⁰

„Para Perwira, Bintara dan Bawahan:

1. Dengan pengumuman Perdana Menteri/Menteri Pertahanan pada tanggal 28 Oktober 1955, Pemerintah mengumumkan keputusannya

¹⁹ *Merdeka*, 29 Oktober dan lihat juga 8 November 1955.

²⁰ *Keterangan dan Jawaban Pemerintah, op.cit.*, hlm. 120.

- untuk mengangkat Kolonel A.H Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Darat yang diambil dengan memakai sebagai bahan dasar usul dari Angkatan Darat, dalam sidang Kabinet ke XIX tertanggal 27 Oktober 1955.
2. Dalam jabatan sebagai KSAD Kolonel A.H Nasution dianggap sebagai Jendral Mayor dan pelantikan dalam jabatan serta pangkat yang baru akan dilakukan pada tanggal 7 November 1955 dalam suatu upacara militer lengkap di Jakarta.
 3. Dalam hubungan tersebut diatas, terciptalah alat kelengkapan bagi Angkatan Darat sebagai bekal dalam perjuangan sebagai suatu faktor stabilisasi.
 4. Dengan alat kelengkapan ini sudah wajiblah kita mengarahkan fikiran dan langkah pada penilaian yang layak segi-segi teknik dari pembangunan Angkatan Darat.
 5. Dengan ini kami serukan supaya dapat kita tegakkan disiplin pribadi masing-masing, sehingga disiplin tentara pada umumnya dapat dikokohkan.

Dari Perintah Harian inilah dapat disimpulkan bahwa pengangkatan KSAD baru itu dapat diterima oleh Angkatan Darat, dan dikemudian hari diharapkan akan adanya kerjasama yang baik antar para Perwira. Kepercayaan Angkatan Darat khususnya dan masyarakat umum yang telah dipupuk itu tidak perlu diragukan lagi. Dalam hal mengembalikan kewibawaan (Gezag) Moril Pemerintah i.c Kepercayaan Angkatan Darat dan Masyarakat, Pemerintah Burhanuddin Harahap telah berhasil. Pada masa ini, telah terjalin hubungan yang baik antara Angkatan Darat dengan Pemerintah. Bahkan ketika Kabinet Burhanuddin Harahap berakhir dan terpilihnya Kabinet Ali Sastroamidjoyo untuk yang kedua kalinya, Militer merasa sangat kecewa. Kalangan-kalangan luas dalam Angkatan Darat (AD) telah mengikuti perkembangan pada akhir tahun 1955 dan awal tahun 1956 dengan rasa kecewa semakin besar. Hubungan antara Angkatan Darat dan Kabinet Burhanuddin Harahap telah berjalan

lancar dan pengunduran diri kabinet Burhanuddin Harahap sangat disesalkan dikalangan tentara. Selain itu, cara kabinet ini jatuh pun menimbulkan kekhawatiran di kalangan banyak perwira bahwa orang-orang politik akan meneruskan pola mereka yang lama untuk pertama-tama memusatkan perhatian pada upaya untuk menjatuhkan pemerintah. Yang memperburuk keadaan adalah kenyataan bahwa pimpinan kabinet itu berada di tangan orang yang mereka anggap telah gagal sama sekali dalam pertengahan tahun sebelumnya untuk mengenali ketidakpuasan-ketidakpuasan di pihak tentara untuk dan untuk memberikan pimpinan nasional. Selain itu orang yang sama yang telah kehilangan jabatannya untuk sebagian karena tidak dapat memahami pandangan-pandangan pihak tentara, sekarang memimpin kementerian pertahanan.

2. Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan permasalahan yang kontroversial pada masa pemerintahan parlementer di Indonesia. Diadakannya pemilihan umum diharapkan mampu membawa ketenangan politik dan kestabilan pemerintahan, mengingat silih bergantinya kabinet yang tidak mampu bertahan lama dalam pemerintahan. Inilah yang menjadi alasan kuat mengapa pemerintah pada saat itu berusaha keras menyelesaikan segala persiapan pemilu.

Perdana Menteri Burhanuddin Harahap juga tidak mau ketinggalan ikut mempercepat persiapan pemilu dan memasukkannya dalam program kerja pemerintahannya. Sejak dari kabinet Wilopo masalah pemilihan

umum menjadi agenda utama pemerintah untuk memilih DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan anggota Konstituante yang baru. Pada masa kabinet Wilopo inilah lahir RUU (Rancangan Undang-Undang) pemilihan umum. Setelah melampaui proses yang cukup sulit, akhirnya pada tanggal 1 April 1953 kabinet bersama Parlemen telah berhasil menyelesaikan UU No. 7 th 1953. Tanggal ini bertepatan dengan ulang tahun pertama kabinet Wilopo.²¹ Dan UUD pemilu pertama tersebut disahkan pada tanggal 4 April 1953. Setelah UU No. 7 th 1953 itu diajukan ternyata tidak kurang dari 200 amandemen dilakukan. Keseluruhan pembahasan menyita waktu selama kurang lebih 4 bulan.²² Hal ini menyebabkan pemilu tidak dapat dilangsungkan pada tahun itu juga. Kabinet Wilopo berakhir dan digantikan oleh Kabinet Ali Sastroamidjoyo I.

Pada masa Kabinet Ali Sastroamidjoyo I langkah awal yang diambil dalam pelaksanaan pelaksanaan UU No. 7 th 1953 tersebut adalah pembagian daerah-daerah pemilihan masing-masing dalam kabupaten, kecamatan dan desa-desa berdasarkan pasal 15 dan pasal 130. Berdasarkan UU tersebut daerah pemilihan umum Indonesia dibagi menjadi 16 daerah pemilihan. Untuk pelaksanaan pembagian Daerah Pemilu maka para Gubernur dari seluruh Indonesia memberikan daftar tentang pembagian daerah masing-masing. Pada tanggal 28 Oktober 1953, kabinet Ali I

²¹ Wilopo S. H. *Zaman Pemerintahan Partai-Partai dan Kelemahan-Kelemahannya*. Jakarta :Yayasan Idayu. 197, hlm. 32.

²² *Ibid.*

bersama Presiden Soekarno berhasil membentuk Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) yang terdiri atas:²³

Ketua	: S. Hadikusumo (PNI)
Wakil Ketua	: Sutan Palindih (PRN)
	Suryaningpraja (NU)
	Sudibyo (PSII)
	Hartono (BTI)
	Sudarnadi (PIR)
	H. Sufyan Siroj (Perti)
	Sumarto (Parkindo)
	Asroruddin (Partai Buruh)

Panitia pemilihan Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman. Berdasarkan rapat dari PPI dan pemerintah maka sepakat bahwa pemilu untuk anggota DPR tanggal 29 September 1955 dan pemilu untuk anggota Konstituante tanggal 15 Desember 1955. UU No. 7 th 1953 menjadi landasan hukum pemilu 1955. Undang-Undang ini terdiri dari 16 Bab dan 139 Pasal yang isinya mengatur tentang tata cara dan penyelenggaraan pemilu. Untuk melaksanakan UU No. 7 th 1953, pemerintah Ali Sastroamijoyo mengeluarkan PP No. 9 tahun 1953 tentang penyelenggaraan UU Pemilu. Peraturan Pemerintah (PP) itu terdiri dari 10 Bab dan 84 Pasal. Belum juga dapat terselenggaranya pemilu, lagi-lagi kabinet sudah jatuh. Akhirnya apa yang sudah direncanakan kabinet Ali Sastroamidjoyo dilanjutkan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap.

Dalam berusaha melaksanakan pemilu sesuai jadwal yang telah ditetapkan, maka kabinet ini juga mengalami kesulitan-kesulitan yang

²³ Bibit Suprpto. *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1985, hlm. 158.

sama dengan kabinet sebelumnya yaitu terutama mengenai persiapan-persiapannya. Karena luasnya wilayah Indonesia dan sulitnya perhubungan sampai ke pelosok-pelosok maka pengiriman barang-barang pemungutan suara mengalami kelambatan di beberapa tempat. Pengiriman barang-barang pemungutan suara dimulai tanggal 28 Juni dan diselesaikan pada tanggal 25 Agustus 1955. Pengiriman barang-barang yang diperlukan untuk pemungutan suara ke daerah-daerah yang letaknya jauh dari pusat seperti Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, Kalimantan, didahulukan dari daerah-daerah lain. Panitia harus menyediakan surat suara untuk 43.104.464 orang pemilih, untuk Jawa berjumlah 29.882.413 orang pemilih sedangkan 13.222.051 orang pemilih di Luar Jawa.²⁴

Penyelidikan di daerah dipusatkan pada Kabupaten yang menyelenggarakan pengiriman barang-barang cetakan sampai ke daerah-daerah pemungutan suara di seluruh Indonesia yang berjumlah 208 Kabupaten kecuali Irian Barat. Setelah melakukan penyelidikan dari Kabupaten-kabupaten, akhirnya pada tanggal 6 September 1955 dapat disimpulkan hanya ada 92 kabupaten yang benar-benar siap mengadakan pemungutan suara pada tanggal 29 September 1955, sedangkan yang persiapannya kurang meliputi 116 kabupaten yaitu 48 yang sanggup dengan syarat, 15 yang tidak sanggup dan 53 yang belum menjawab, menjadi 56% dari jumlah kabupaten diseluruh Indonesia kecuali Irian

²⁴ *Keterangan dan Jawaban Pemerintah, op.cit.*, hlm. 9.

Barat.²⁵ Kabupaten yang belum siap tersebut kekurangan macam-macam alat yang diperlukan, seperti daftar-daftar, surat-surat suara, alat-alat pengangkutan, uang dan sebagainya.

Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan itu, maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1955. Agar daerah-daerah yang kekurangan bermacam-macam alat dan tidak dapat melaksanakan pemungutan suara tepat waktu itu diberi perpanjangan waktu untuk menyelenggarakan pemungutan suara. Tanggal pemungutan suara untuk daerah-daerah itu ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten masing-masing. Waktu yang ditetapkan paling lambat 2 bulan setelah tanggal 29 September 1955 yaitu sampai dengan tanggal 29 November 1955.

Kabupaten-kabupaten dimana seluruh kabupaten pemungutan suaranya ditunda/diundur adalah Bengkalis, Aceh Besar, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Tengah, Poso, dan Sumba Barat. Sedangkan Kabupaten-kabupaten yang pemungutan suaranya diundur hanya sebagian dari kabupaten meliputi Padang Pariaman, Pidie, Aceh Selatan, Kuala Kapuas, Barito, Kota Waringin, Kota Baru, Bulongan, Kutai, Makasar, Sulawesi Tenggara, Bone, Mandar, Luwu, Bothain, Maluku Tenggara, Kupang, Flores Timur dan Kepulauan Solor, Maumere, Bolu, Roti Sawu, Ende, Manggarai, Ngada, Alor/Pantai serta Langkat.

²⁵ *Ibid*, hlm. 10.

²⁶Untuk melancarkan penyelenggaraan pemilu, Pemerintah juga mengeluarkan Undang-undang Darurat No. 18 Tahun 1955. Berdasarkan Undang-Undang Darurat tersebut, maka Pemerintah telah menyetujui penambahan Anggota Panitia Pemilihan Indonesia sebagai berikut:²⁷

1. Drs. D.S Matakupan dari partai Katolik
2. S. Wijaya dari Partai Rakyat Indonesia
3. G. Abdul Moeis dari Masyumi
4. Dr. Soedarsono dari PSI
5. Soegih Cokrosumarto dari Parindra

Disamping itu terdapat Suharjo dari PSII mengganti Sudibyo yang menjadi Menteri Sosial, dan A.B.M Yusuf dari Partai Buruh mengganti Asraruddin yang menjadi Menteri Muda Perhubungan. Setelah itu, pada tanggal 26 September 1955 anggota-anggota baru tersebut dilantik oleh Kepala Negara di Istana Negara. Sebagai tindakan terakhir menjelang pemungutan suara pada tanggal 29 September 1955, pemerintah juga mengadakan pembatasan kampanye agar tercipta suasana tertib dan aman. Sehingga menghasilkan pemilihan yang diharapkan masyarakat.

Meskipun tidak semua masyarakat di Indonesia melaksanakan pemungutan suara pada tanggal 29 September 1955, karena seperti yang telah dibahas diatas ada beberapa daerah kabupaten yang menunda atau mengundur pemungutan suara karena persiapannya kurang. Seperti Bali

²⁶ *Ibid.*, hlm. 12.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 13.

juga tidak dapat melaksanakan pemilihan umum pada tanggal 29 September 1955 karena pada saat itu bertepatan dengan hari Raya Galungan, maka pemilihan umum di Bali dilangsungkan pada tanggal 1 Oktober 1955. Sedangkan di seluruh Kabupaten Aceh Barat pemungutan suara dilakukan pada tanggal 25 Oktober, di kabupaten Aceh Timur pemungutan suara disebagian besar dari kabupaten itu telah dilangsungkan dan terakhir pada tanggal 27 Oktober 1955 dan pada dua buah PPS pemungutan suara baru akan dilangsungkan pada tanggal 15 November nanti, di kabupaten Aceh Utara pemungutan suara dilangsungkan pada tanggal 29 Oktober untuk seluruh Kabupaten, dan disebagian Kabupaten Aceh Selatan pemungutan suara dilangsungkan pada tanggal 29 September, sebagian lagi pada tanggal 29 Oktober.²⁸

Pemilihan umum 1955 tidak hanya diikuti oleh partai politik saja, tetapi juga oleh organisasi maupun perorangan. Dalam pemilihan umum anggota DPR diikuti peserta sebanyak 118 peserta pemilu yang terdiri atas: partai politik 36, organisasi 34 dan perorangan 48. Sementara itu peserta pemilihan umum anggota Konstituante terdiri atas: partai politik 39, organisasi 23, perorangan sebanyak 29.²⁹Herbeth Feith mengelompokkan peserta pemilihan umum 1955 berdasarkan perolehan kursinya menjadi: Partai Besar, Partai Menengah, Kelompok kecil yang

²⁸ *Ibid*, hlm. 147.

²⁹ *Arsip Nasional Republik Indonesia*. Jakarta: Proyek Pemasyarakatan dan Diseminasi Kearsipan Nasional. 2004, hlm. 68.

bercakupan Nasional, dan Kelompok kecil yang bercakupan Daerah. Kelompok-kelompok itu adalah sebagai berikut.³⁰

1) Partai Besar

PNI (Partai Nasional Indonesia)

Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia)

NU (Nahdatul Ulama)

PKI (Partai Komunis Indonesia)

2) Partai Menengah

PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia)

Parkindo (Partai Kristen Indonesia)

Partai Katholik

PSI (Partai Sosialis Indonesia)

Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah)

IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia)

3) Kelompok kecil yang bercakupan Nasional

PRN (Partai Rakyat Nasional)

Partai Buruh

Gerakan Pembela Pancasila

PRI (Partai Rakyat Indonesia)

PPRI (Persatuan Polisi Republik Indonesia)

Partai Murba

Baperki (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia)

³⁰ *Ibid.*

PIR (Partai Indonesia Raya) Wongsonegoro

PPTI (Partai Persatuan Tarikat Islam)

Acoma (Angkatan Communis Muda)

4) Kelompok kecil yang bercakupan Daerah

Gerinda-Yogyakarta

Partai Persatuan Daya- Kalimantan Barat

PRD (Partai Rakyat Desa)-Jawa Barat

R. Soedjono Prawonosoeardso dan kawan-kawan-Madiun

Gerakan Pilihan Sunda-Jawa Barat

Partai Tani Indonesia-Jawa Barat

Raja Keprabon dan kawan-kawan-Cirebon, Jawa Barat

Gerakan Banteng-Jawa Barat

PIR (Persatuan Indonesia Raya)-Nusa Tenggara Barat

PPLM Idrus Effendi (Panitia Pendukung Pencalonan L.M Idrus

Effendi)-Sulawesi Tenggara.

Pada saat penyelenggaraan pemilihan umum, ternyata masyarakat tenang dan pergi ke kotak-kotak suara dengan tertib dan disiplin. Meskipun pada waktu kampanye terdapat pertentangan sesuai dengan garis-garis kepartaian bahkan memecah belah masyarakat Indonesia sampai ke desa-desa. Kampanye politik yang terjadi saat itu juga mendorong proses “de-tradisionalisasi” di desa-desa. ³¹Ikatan-ikatan lama

³¹ Baskara T. Wardaya. *Membuka Kotak Pandora Pemilu 1955*. Basis. No. 03-04. Tahun ke 53. 2004, hlm. 12.

yang selama ini lebih berdasar kekerabatan atau tradisi menjadi renggang dan berubah menjadi ikatan baru yang berdasarkan asosiasi politis yang sering kali menimbulkan friksi-friksi baru. Akibatnya, suasana menegangkan menjelang pemilu tidak dapat dihindari. bersemangat turut serta dalam memilih. Pada waktu itu, pada hari H pelaksanaan pemilu, jumlah mereka yang pergi ke kotak-kotak suara dinilai sangat besar. Ketegangan-ketegangan yang sempat muncul menjelang pemilu semua sirna begitu saja. Orang-orang rela berjalan kaki sejauh lima kilometer atau lebih untuk sampai ke tempat pemungutan suara. Ada pula yang harus naik perahu untuk bisa mencapai tempat pemilihannya. Bagi mereka, jarak tidak membuat golput. Meskipun jarak yang harus ditempuh jauh, tetapi bagi mereka yang terpenting adalah dapat berpartisipasi dalam peristiwa Nasional yang amat penting itu. Tingginya partisipasi rakyat pada pemilu tanggal 29 September 1955 tercermin dalam jumlah orang yang ikut mencoblos yaitu 91,4 persen dari mereka yang telah terdaftar. Hasil pemilihan umum tanggal 29 September 1955 adalah sebagai berikut.³²

1. PNI	: 57 kursi
2. Masyumi	: 57 kursi
3. Partai NU	: 45 kursi
4. PKI	: 39 kursi
5. PSII	: 8 kursi
6. Parkindo	: 8 kursi
7. Partai Katolik	: 8 kursi
8. PSI	: 6 kursi
9. PERTI	: 5 kursi
10. IPKI	: 4 kursi
11. GPP	: 4 kursi

³² Bibit Suprpto.*op.cit.*, hlm. 169.

12. PRN	: 2	kursi
13. P3RI	: 2	kursi
14. Murba	: 2	kursi
15. Partai Buruh	: 2	kursi
16. PRI	: 2	kursi
17. PRIM	: 2	kursi
18. AKUI	: 1	kursi
19. ACOMA	: 1	kursi
20. PPTI	: 1	kursi
21. PRD	: 1	kursi
22. R.Sujono Prawirosudarmo	: 1	kursi
23. PIR Wongso	: 1	kursi
24. PIR Hazairin	: 1	kursi
25. Permei	: 1	kursi
26. Baperki	: 1	kursi
27. Parindra	: 1	kursi
28. Persatuan Daya	: 1	kursi
Semua berjumlah	: 257	kursi

Sebagai perbandingan anggota DPR sebelum pemilihan umum (DPR tahun 1954) adalah sebagai berikut.³³

1. Masyumi	: 44	orang
2. PNI	: 42	orang
3. PIR Hazairin	: 19	orang
4. PKI	: 17	orang
5. PSI	: 15	orang
6. PRN	: 13	orang
7. Progresif	: 10	orang
8. Katolik	: 9	orang
9. Demokrat	: 9	orang
10. NU	: 8	orang
11. Parindra	: 7	orang
12. Partai Buruh	: 6	orang
13. Parkindo	: 5	orang
14. PSII	: 4	orang
15. Murba	: 4	orang
16. SKI	: 4	orang
17. PIR Wongsonegoro	: 3	orang
18. SOBSI	: 2	orang
19. BTI	: 2	orang
20. PERTI	: 1	orang
21. GTI	: 1	orang

³³ *Ibid.*, hlm. 170.

22. Tidak Berpartai : 11 orang
 Semua berjumlah : 235 orang

Dari data tersebut dapat dibandingkan, bahwa dari hasil pemilu 1955 tersebut banyak mengalami perubahan total dalam komposisi kursi masing-masing partai. Ada partai yang sebelum pemilihan umum menguasai legislatif terutama eksekutif, akhirnya dalam pemilihan umum 1955 keluar sebagai partai kecil seperti: PSInya Sutan Syahrir sebelum pemilu mempunyai 15 kursi dalam DPR dan sering menguasai Eksekutif, ternyata dalam Pemilu kurang mendapat simpati dan dukungan dari rakyat sehingga hanya mendapat 6 kursi saja.³⁴ Selain itu terdapat sejumlah partai yang bernasib sama dengan PSI yaitu PIR Hazairin dan PRN. Tetapi sebaliknya terdapat juga partai yang naik jumlah kursinya, partai-partai itu adalah NU, awalnya hanya 8 kursi saja sekarang naik drastis menjadi 45 kursi. PSII juga naik dua kali lipat dari 4 kursi menjadi 8 kursi, PKI juga mengalami kenaikan dari 17 kursi menjadi 39 kursi. Sedangkan Masyumi dan PNI tetap menduduki posisinya sebagai partai terbesar.

Tetapi jumlah anggota DPR ini berkembang juga. Pada waktu dilantik tanggal 20 Maret 1956 anggotanya berjumlah 272 orang dengan perhitungan 300.000 orang penduduk diwakili seorang, dengan komposisi Fraksi berjumlah 19 Fraksi yaitu.³⁵

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. Fraksi Masyumi | : 60 anggota |
| 2. Fraksi PNI | : 58 anggota |

³⁴ *Ibid.*, hlm. 171.

³⁵ *Ibid.*

3. Fraksi NU	: 47 anggota
4. Fraksi PKI	: 32 anggota
5. Fraksi Nasional Progresif	: 11 anggota
6. Fraksi Pendukung Proklamasi	: 11 anggota
7. Fraksi PSII	: 8 anggota
8. Fraksi Parkindo	: 9 anggota
9. Fraksi Katholik dan Persatuan Daya	: 8 anggota
10. Fraksi Pembangunan	: 7 anggota
11. Fraksi PSI	: 5 anggota
12. Fraksi PERTI	: 4 anggota
13. Fraksi P3RI	: 2 anggota
14. Fraksi GPI	: 2 anggota
15. Fraksi AKUI	: 1 anggota
16. Fraksi PPTI	: 1 anggota
17. Fraksi PIR Hazairin	: 1 anggota
18. Fraksi Persatuan Irian Barat	: 1 anggota
19. Fraksi Tak Berpartai	: 1 anggota

Disamping telah berhasil menyelenggarakan pemilihan umum untuk anggota DPR, Kabinet Burhanuddin Harahap juga telah berhasil menyelenggarakan pemilihan umum untuk anggota Konstituante pada tanggal 15 Desember 1955. Konstituante merupakan suatu Lembaga (Badan) yang bertugas membuat Undang-Undang Dasar (Konstitusi). Hasil-hasil pemilu untuk anggota Konstituante adalah sebagai berikut.³⁶

1. PNI	: 118 kursi
2. Masyumi	: 113 kursi
3. NU	: 91 kursi
4. PKI	: 59 kursi
5. Rep. Proklamasi	: 21 kursi
6. Parkindo	: 19 kursi
7. PSII	: 17 kursi
8. Katholik	: 12 kursi
9. PSI	: 10 kursi
10. IPKI	: 9 kursi
11. PERTI	: 7 kursi
12. Partai Buruh	: 5 kursi
13. GPPS	: 5 kursi
14. Murba	: 4 kursi

³⁶ *Ibid.*, hlm. 172.

15. Persatuan Daya	: 3	kursi
16. P3RI	: 3	kursi
17. PRN	: 2	kursi
18. PIR Wongso	: 2	kursi
19. PIR Hazairin	: 2	kursi
20. PRI	: 2	kursi
21. PRIM	: 2	kursi
22. Permei	: 2	kursi
23. Baperti	: 4	kursi
24. Gerinda	: 2	kursi
25. Kesatuan	: 2	kursi
26. R. Sujono	: 1	kursi
27. PIR (NT)	: 1	kursi
28. Gerakan Benteng RI	: 1	kursi
29. AKUI	: 1	kursi
30. Partai Tani Indonesia	: 1	kursi
31. Pekerja	: 1	kursi
32. Penyakuran	: 1	kursi
33. PRD	: 1	kursi
34. Gerpis	: 1	kursi
35. Raja Keprabonan	: 1	kursi
36. PPTI	: 1	kursi
37. K. Nope	: 1	kursi
38. Pers. Irian Barat	: 5	kursi
39. Fraksi 5 orang	: 5	kursi
40. Keturunan Eropa	: 4	kursi
41. R. Winarno Danuatmojo	: 1	kursi

Harus diakui, tidak semua tempat pemilu berjalan dengan mulus, khususnya di daerah-daerah yang akses komunikasi dan transportasinya belum lancar. Namun, secara umum kedua pemilu itu berjalan sesuai dengan rencana. Sesudah pemilu terlaksana, tekanan-tekanan politis maupun psikologis menurun drastis. Suasana intimidasi berubah menjadi suasana partisipasi. Rakyat bebas menentukan pilihan mereka tanpa takut terhadap penguasa. Pada hari-hari itu rakyat sadar bahwa nasib mereka tidak lagi ditentukan faktor-faktor dari luar mereka seperti kisah-kisah gaib yang beredar menjelang pemilu. Pada umumnya masyarakat merasa

senang bahwa mereka baru saja ikut berperan serta dalam sebuah momen bersejarah untuk menentukan masa depan bangsa.³⁷

3. Menyelesaikan Perundang-undangan Desentralisasi secepatnya tahun 1955.

Dalam program kerja kabinet Burhanuddin Harahap juga telah dicantumkan mengenai permasalahan penyelesaian Undang-Undang Desentralisasi.³⁸ Pada masa pemerintahan parlementer, dasar negara Indonesia masih menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950). Hal ini menyebabkan semua peraturan-peraturan baik pusat maupun daerah masih menggunakan peraturan-peraturan yang bersifat sementara. Bagi negara yang baru merdeka, masih banyak peraturan-peraturan maupun keperluan negara yang masih harus dibenahi salah satunya masalah mengenai otonomi daerah³⁹ khususnya desentralisasi.

Dalam keterangan Pemerintah pada tanggal 7 Oktober 1955 telah menyatakan bahwa pemerintah tetap menaruh perhatian besar kepada Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pokok Pemerintah dewasa ini sudah sampai pembicaraan pemandangan umum babak ke II sidang DPR dan pemerintah berusaha agar jawaban pemerintah atas pemandangan

³⁷ Baskara T. Wardaya. *op.cit.*, hlm. 11.

³⁸ Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lihat Redaksi Great Publisier. *Buku Pintar Politik: Sejarah, Pemerintahan, dan Ketatanegaraan*. Yogyakarta: GalangPress. 2009, hlm. 200.

³⁹ Otonomi Daerah merupakan kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan.

umum tersebut disampaikan secepatnya kepada DPR, tentu setelah pemerintah mengadakan peninjauan kembali seperlunya terhadap RUU tersebut. Sesudah DPR membicarakan hasil peninjauan itu, dalam tahun 1955 UU pokok itu diharapkan dapat terselesaikan.

Cita-cita Bangsa dan Negara mengenai daerah otonom⁴⁰ ini telah ditentukan dasar-dasarnya di dalam Undang-Undang Dasar. Misalnya, daerah otonom memiliki dasar yang sama hanya tingkatannya yang berbeda dan yang mengenai prinsip perwakilan dan permusyawaratan, mengurus rumah tangga sendiri serta otonomi seluas-luasnya. Hanya persoalan yang dihadapi itu adalah bagaimana pelaksanaan dari otonomi tersebut. Seperti yang dikemukakan dalam Keterangan Pemerintah bahwa persoalan otonomi terbawah merupakan persoalan yang amat sulit mengingat beragam daerah terendah yang merupakan kesatuan hukum dengan bermacam dasar, bentuk dan isinya dengan peranan hukum adatnya serta susunan daerah administrasi yang masih terdapat dalam wilayah itu. Keberadaan Pemerintah daerah sangat penting karena pemerintah daerah menjalankan tugas negara, sehingga jika pemerintah daerah tidak sempurna maka pemerintah negara itu tidak akan sempurna pula.

Pelaksanaan eksperimen daerah otonom tingkat III itu akan dilaksanakan dengan kerjasama yang erat antara Pemerintah pusat dan

⁴⁰ Daerah otonom merupakan daerah di dalam suatu negara yang memiliki kekuasaan otonom, atau kebebasan dari pemerintah di luar daerah tersebut. Biasanya suatu daerah diberi sistem ini karena keadaan geografinya yang unik atau penduduknya merupakan minoritas negara tersebut, sehingga diperlukan hukum-hukum yang khusus, yang hanya cocok diterapkan untuk daerah tersebut.

Pemerintah daerah. Pemerintah yakin bahwa eksperimen itu akan membuahkan hasil dan di dalamnya terdapat hal-hal penting yang berguna bagi pemerintah yang akan datang dalam menghadapi persoalan mengenai daerah otonom tingkat III ini.

Pemerintah menyatakan bahwa I.G.O. (*Inlandsche Gemeente Ordonantie*) dan I.G.O.B (*Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten*) harus diganti dengan Undang-Undang Pokok baru yang dapat membawa haluan baru bagi perkembangan dan kemajuan masyarakat desa dengan mempergunakan syarat-syarat modern. Usaha ke arah itu telah dimulai pada masa Kabinet Ali Sastroamidjoyo I khususnya dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan merundingkan soal tersebut dalam konferensi para Gubernur dalam bulan Januari 1955, dimana perubahan perundang-undangan desa menjadi salah satu acaranya.⁴¹ Dalam perundingan itu, tampak jelas bahwa terdapat hubungan yang erat antara desa dan daerah tingkat III dari Undang-Undang Pokok Pemerintah Daerah. Kenyataan itu masih pula tampak pada masa pemerintahan Burhanuddin Harahap, sehingga Pemerintah Burhanuddin Harahap berpendapat bahwa sulit sekali kiranya untuk memajukan kepada Parlemen rancangan Undang-Undang Kedesaan yang baru sebelum Rancangan Undang-Undang Pokok Pemerintahan Daerah ditetapkan. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri telah menerima rancangan Undang-Undang Desapraja dari Soetardjo Kartohadikoesoemo selaku Komisaris Urusan Daerah Otonom.

⁴¹ Kabinet Presiden RI No. 1396 tahun 1955, *op. cit.*, hlm. 20.

Dalam rancangan tersebut nampak pula hubungannya antara Desapraja-desapraja itu dengan daerah-daerah otonom dari Undang-Undang Pokok Pemerintah Daerah. Kementrian Dalam Negeri selalu memperhatikan soal perubahan Perundang-undangan desa dan selalu mengikuti pertumbuhan masyarakat desa dalam masa peralihan ketatanegaraan saat itu.

Pemerintah Burhanuddin Harahap belum dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang Desa yang baru sebagai pengganti dari I.G.O dan I.G.O.B. bukan berarti pemerintah Burhanuddin Harahap menganggap UU yang lama sudah memenuhi perkembangan zaman tetapi pemerintah masih mengumpulkan persyaratan yang lebih lengkap untuk dapat mengajukan rancangan Undang-Undang yang sekiranya lebih sesuai dengan kondisi masyarakat desa. Pemerintah telah menaruh perhatian yang besar terhadap masyarakat desa, hal ini sudah dimulai pada masa kabinet Ali I tepatnya akhir tahun 1954 dan permulaan tahun 1955 Kementerian Dalam Negeri telah mengirim pegawai ke India, Sialan dan Filipina untuk ikut serta dalam mengadakan penyelidikan tentang Program Community Development yang isinya mencari jalan untuk mempertinggi taraf kehidupan masyarakat desa.⁴² Hasil dari peninjauan-peninjauan itu merupakan bahan-bahan yang sangat penting dalam merencanakan perundang-undangan desa yang baru.

⁴² *Keterangan dan Jawaban Pemerintah, op.cit.*, hlm. 60.

Pada masa pemerintahan Burhanuddin Harahap tepatnya pada permulaan bulan November 1955 Kementerian Dalam Negeri menyumbangkan tenaga untuk ikut serta dalam study tour ke 5 negara di Asia Tenggara. Hal ini juga dijadikan untuk menambah bahan-bahan guna merancang perundang-undangan kearah kemajuan masyarakat desa. Pemerintah Burhanuddin Harahap mengemukakan bahwa Tatapraja dalam daerah Swapraja harus disesuaikan dengan tatapraja dalam daerah Swatantra⁴³ biasa. Hal ini diatur dalam pasal 132 UUDS khususnya mengenai swapraja⁴⁴, akan tetapi pelaksanaan pasal tersebut tidak dapat dipisahkan dengan pelaksanaan pasal 131 Undang-Undang tentang pemerintah daerah Swatantra.⁴⁵ Oleh sebab itu maka dalam rapat kerja dengan seksi DPR Menteri Dalam Negeri pernah menyatakan, bahwa cara penyelesaian persolan swapraja kita harus berpedoman kepada Undang-Undang Pokok tentang Pemerintah Daerah yang sedang dalam pembicaraan di DPR waktu itu. Di dalam Undang-Undang Pokok itu, sebagaimana juga tertera dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1948 terdapat beberapa kemungkinan untuk membentuk daerah istimewa. Dengan demikian, mengingat keinginan dari rakyat didaerah Swapraja dan peninjauan tentang *levensvatbaarheid* daripada masing-masing Swapraja, transformasi dari

⁴³ Swatantra merupakan daerah yang dapat mengurus rumah tangganya sendiri.

⁴⁴ Swapraja merupakan Kesatuan masyarakat Hukum yang tertentu batas-batas daerahnya, berhak mengurus rumah tangganya sendiri, memilih penguasanya dan mempunyai harta benda sendiri.

⁴⁵ *Keterangan dan Jawaban Pemerintah. loc.cit.*

pada pemerintah daerah Swapraja yang feodal dapat berupa sebagai berikut.⁴⁶

- a. Daerah Swapraja menjadi daerah istimewa (dengan tingkatan yang layak), seperti umpamanya daerah istimewa Yogyakarta. Ini bisa terjadi jika kepala Swapraja (Raja) masih mempunyai pengaruh. Kepala Daerah Istimewa diambilkan dari turunan raja dengan mengingat syarat-syarat tentang kecakapan dan kesetiaan. Keistimewaan hanya terletak pada kedudukan kepala daerahnya.
- b. Daerah Swapraja menjadi daerah otonom biasa (dengan tingkatan yang layak). Hal ini terjadi jika Raja sudah tidak mempunyai pengaruh.
- c. Daerah Swapraja menjadi daerah administratif belaka dari daerah otonom yang meliputinya. Hal ini bisa terjadi jika Swapraja itu tidak mempunyai *levensvatbaarheid* sebagai daerah otonom karena kecilnya dan raja sudah tidak mempunyai pengaruh.

Dengan 3 cara diatas transformasi Swapraja dapat dilakukan. Dan demikian transformasi daerah Swapraja sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 132 UUDS sangat tergantung kepada bentuk UU Pokok tentang pemerintah daerah yang ketika itu dalam pembicaraan DPR. Keadaan daerah-daerah Swapraja itu sebagai berikut.⁴⁷

- a. Dibekas Negara NIT (Provinsi-provinsi Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku) Swapraja-swapraja praktis merupakan daerah swapraja tingkat ketiga, karena menurut hukum positif mereka itu diawasi oleh daerah-daerah Swatantra, yang dibentuk atas dasar Undang-Undang NIT No. 44 tahun 1950.
- b. Di Kalimantan beberapa Swapraja telah dibentuk sebagai daerah istimewa atau daerah Kabupaten Swatantra atas dasar UU No. 22 tahun 1948, akan tetapi beberapa daerah Swapraja lainnya belum teratur perimbnagannya hukum dengan daerah Swatantra yang meliputinya.
- c. Di Jawa dan Sumatera de facto tidak ada Swapraja lagi.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 61.

⁴⁷ *Ibid.*

4. Menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi.

Pada masa pemerintahan kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia sedang dihadapkan pada kondisi yang serba tidak stabil. Mengingat hal ini dikarenakan kebijakan ekonomi yang diterapkan Menteri Perekonomian Iskaq pada masa kabinet Ali I lalu membuat buruk ekonomi nasional. Sebagai pengganti kabinet Ali I, Kabinet Burhanuddin Harahap mau tidak mau harus memperbaiki keadaan ekonomi agar rakyat dapat hidup sejahtera. Masalah Inflasi⁴⁸ yang semakin membahayakan menjadi salah satu sorotan utama dalam program kerja kabinet Burhanuddin Harahap mengingat inflasi menimbulkan terjadinya pembagian pendapatan yang tidak adil, dalam arti bahwa hanya beberapa gelintir orang saja yang mendapat untung. Selain itu, timbul penimbunan barang-barang disektor perdagangan, naiknya harga barang-barang yang diikuti dengan naiknya biaya-biaya kehidupan, naiknya biaya produksi, turunnya pendapatan-pendapatan ekspor yang diperlukan sekali untuk mengimpor barang-barang konsumsi dan barang-barang modal untuk pembangunan karena perusahaan-perusahaan ekspor tidak dapat bersaing lagi dengan luar negeri sehingga yang terkena imbas dari inflasi diatas adalah masyarakat. Keadaan inflasi tersebut pada hakekatnya mempunyai 2 aspek yaitu sebagai berikut.

a. Aspek Kebijakan Keuangan Negara

⁴⁸ Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.

Kejanggalan disekitar keuangan negara merupakan sebab yang utama, sehingga disektor ekonomi moneter nilai uang makin merosot. Jumlah peredaran uang yang melampaui batas disebabkan oleh defisit pada anggaran belanja Pemerintah. Sehingga tekanan inflasi sangat melemahkan kedudukan devisen⁴⁹ negara kita. Menghadapi permasalahan tersebut Perdana Menteri Burhanuddin Harahap mengambil beberapa langkah untuk menyelesaikannya.

Langkah Pertama, Sebelumnya pemerintah telah mengadakan penyelidikan tentang keadaan sebenarnya sekitar anggaran belanja negara tahun 1955. Ternyata tidak benar defisit anggaran belanja untuk tahun 1955 adalah sebesar Rp.2,5 Milyard seperti apa yang dikatakan kabinet Ali Sastroamidjoyo, melainkan Rp.3,5 Milyard. Berdasarkan peraturan-peraturan baru mengenai import, maka Pemerintah dapat memperkecil defisit tahun 1955 menjadi Rp.3 Milyard karena tambahan dari penerimaan T.P.I yang mula-mula ditaksir Rp.1 Milyard kemudian bertambah Rp.1,6 Milyard. Pemerintah juga menekan lebih jauh defisit Rp.3 Milyard menjadi Rp.2 Milyard tersebut dengan jalan sebagai berikut.⁵⁰

1. Mengadakan penghematan keras dalam banyak pengeluaran, terutama pengeluaran rutin yang berlebihan.
2. Menyempurnakan penerimaan pajak dan memperbaiki cara-cara dan dasar pemungutan.
3. Terus berlangsungnya serta dipegang teguh peraturan yang telah berjalan mengenai pengawasan preventif oleh pihak Kementerian Keuangan.

⁴⁹ Devisen merupakan instrumen untuk pembayaran antar negara, terutama dalam bentuk cek, draft, debit dan kredit.

⁵⁰ *Keterangan dan Jawaban Pemerintah. op.cit.*, hlm. 21.

Langkah kedua, Pemerintah juga telah mempersiapkan Rancangan Anggaran Belanja untuk Tahun 1956. Pemerintah akan memperkecil defisit Anggaran Belanja untuk tahun 1956. Perkiraan defisit anggaran belanja Negara tahun 1956 dapat diperkecil dengan jalan memperluas pajak-pajak langsung. Dengan demikian, maka akan tercapailah anggaran belanja Negara yang seimbang pada tingkat yang lebih tinggi.

Langkah ketiga, Pemerintah telah melakukan penyelidikan tentang Devisen. Dari penyelidikan Devisen dapat diperoleh data yaitu Reserve devisen pada tanggal 1 Juli 1955 berjumlah Rp. 1.522 Juta (pada 1 Januari 1955, Rp. 1.620 juta). Dalam setengah tahun pertama 1955 realisasi impor adalah Rp. 2,8 Milyard, termasuk import pemerintah sebesar lebih kurang Rp. 0,3 Milyard. Jumlah 8000 juta untuk penghasilan ekspor adalah perkiraan berdasar atas adanya peraturan-peraturan yang diterapkan kabinet Burhanuddin Harahap.⁵¹ Jadi tidak mustahil bahwa dapat diperoleh ekspor yang lebih tinggi jika peraturan-peraturan yang menghalangi lancarnya perdagangan dapat segera dihapuskan. Disamping itu pasar dunia untuk bahan-bahan mentah pada waktu itu sangat baik.

b. Aspek Ekonomi Moneter

Dalam masa kabinet Ali sampai kabinet Burhanuddin Harahap tidak dapat dipungkiri bahwa terjadi ketegangan-ketegangan arus barang-barang dan tidak meratanya penyebaran barang-barang. Hal itu dikarenakan berbagai peraturan ekspor impor yang membingungkan.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 23.

Adapun sistem impor serta peraturan-peraturan yang membingungkan adalah transaksi kompensasi Hongkong, perdagangan Barter, transaksi paralel, kredit-kredit Eropa Barat, transaksi-transaksi berjangka, transaksi antara Pemerintah dengan Pemerintah, pembelian-pembelian Pemerintah melalui J.P.P dan Impor bebas devisen yang sangat merugikan Negara dari sudut ekonomi keuangan.⁵² Berhubung dengan itulah maka Pemerintah Burhanuddin Harahap melaksanakan tindakan-tindakan baru dilapangan ekonomi-moneter, khususnya dilapangan impor. Pemerintah memberikan devisen lebih banyak kepada importir nasional. Hal ini terbukti dari jumlah devisen yang diberikan dari tanggal 15 September 1955-18 Oktober 1955 adalah sejumlah Rp. 448 juta, dari jumlah ini telah diberikan pada importir nasional Rp. 329 juta dan pada importir asing Rp. 118 juta. Selanjutnya jika kita perhatikan pemberian devisen menurut jumlah importir, maka selama waktu 15 September-18 Oktober 1955 tersebut devisen diberikan pada 2138 orang importir. 1681 untuk importir nasional, dan 457 merupakan importir asing.⁵³

Selain itu kabinet Burhanuddin juga melakukan perlindungan pada pengusaha dan pedagang nasional mengingat ketika itu kedudukan mereka masih lemah. Keadaan ini merupakan salah satu faktor terpenting dalam pelaksanaan politik Ekonomi-Kuangan pemerintah. Pemerintah menyediakan impor dari negara-negara di Asia seperti Hongkong, Jepang,

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*, hlm. 73.

Singapura, dan lain sebagainya hanya untuk pedagang-pedagang Nasional. Selain itu, maka beberapa barang oleh Pemerintah khusus disediakan hanya untuk importir-importir nasional, misalnya benang tenun. Selanjutnya mengenai import bahan-bahan industri kepada importir-importir nasional diberikan pula fasilitas kredit antara lain pembayaran muka sampai pembukaan L.C. Lagi pula importir-importir nasional tidak diwajibkan menyetor Rp. 5 juta, yang diwajibkan menyetor hanyalah importir asing.⁵⁴

Kabinet Burhanuddin Harahap juga berhasil mengadakan perbaikan ekonomi, termasuk didalamnya menekan harga barang-barang, baik harga barang impor maupun harga beberapa macam barang-barang dalam negeri yang merupakan kebutuhan sehari-hari. Hal ini terbukti dalam data angka-angka index mengenai barang-barang tersebut.

Angka-angka index rata-rata dipasar bebas.

Nama Barang	15 Agustus 1955	13 September 1955	11 Oktober 1955
Tekstil (poplin, keper putih, drill, kain putih)	100	74	68
Pakaian Jadi	100	94	83
Daging kornet, susu kental dan susu bubuk	100	95	86
Sayuran	100	100	94
Telur Mentah	100	95	100
Bumbu-bumbu	100	122	98
Tepung, tempe, Kentang, Tahu	100	112	90
Minyak Kelapa	100	100	99
Gula, Kopi, Teh	100	101	96

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 165.

Bahan bakar(minyak tanah, arang)	100	148	99
----------------------------------	-----	-----	----

Sumber: *Keterangan dan Jawaban Pemerintah tentang Program Kabinet*

Burhanuddin Harahap. Kementerian Penerangan: Jakarta. 1955, hlm. 81.

Kesulitan yang dialami pemerintah adalah krisis beras. Pada awalnya berdasarkan atas keterangan-keterangan resmi dan tidak resmi oleh Pemerintah Ali I disebutkan produksi beras dalam negeri tahun 1955 adalah cukup. Akan tetapi setelah diadakan penyelidikan kenyataannya sangat berbeda. Januari-Agustus 1954 penghasilan beras di Indonesia adalah 5.575.000 ton, sedangkan Januari-Agustus 1955 hanya 5.214.000 ton. Hal ini terjadi karena produksi diluar Jawa dan Madura tahun 1955 lebih rendah daripada tahun 1954 karena terkena bencana alam dan sebagainya. ⁵⁵Mengenai impor beras Januari-Agustus 1954 impor berjumlah 173.780 ton, sedangkan Januari-Agustus 1955 impor beras hanya 12.913 ton. Jadi persediaan seluruhnya dalam tahun 1955 dapat dikatakan jauh lebih kurang daripada tahun 1954. Walaupun mengalami kesulitan sekitar beras, tetapi kabinet Burhanuddin Harahap dapat dikatakan relatif berhasil dalam menangani masalah ekonomi.

5. Memberantas Korupsi.

Salah satu gejala yang timbul didalam masyarakat dan kalangan para pejabat Negeri ini sejak pecahnya revolusi Nasional Indonesia sampai sekarang dan yang perlu sekali mendapat perhatian dari Pemerintah adalah korupsi. Terutama sejak tahun 1950 khususnya yang terjadi pada masa

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 82.

sebelum hingga terbentuknya kabinet Burhanuddin Harahap ini terjadi korupsi yang sangat merajalela. Korupsi itu sangat merugikan Negara sampai ratusan juta rupiah, menghambat produksi nasional dan memperlambat kemajuan finansial dan ekonomis serta merosotkan nama baik Republik Indonesia dimata dunia internasional. Selain merugikan negara, korupsi inilah yang menurunkan kewibawaan Pemerintah kepada masyarakat. Dengan adanya oknum-oknum Pemerintah yang korupsi maka masyarakat tidak percaya lagi kepada Pemerintah. Bahaya korupsi sangat disadari juga oleh formatur Kabinet Ali I, hal ini terbukti dengan dibentuknya fungsi Menteri Urusan Kesejahteraan Negara yang bertugas memberantas korupsi. Tetapi hal itu sangat bertolak belakang dengan tugas yang diembannya, Menteri Urusan Kesejahteraan tidak berhasil mewujudkan tindakan untuk mengatasi bahaya korupsi namun justru dikala itulah dirasakan merajalelanya korupsi.

Dengan pergantian Kabinet Ali kepada Kabinet Burhanuddin Harahap tahun 1955, bekas Menteri Perekonomian Iskaq harus menerima konsekuensi dari kebijaksanaannya sewaktu menjadi menteri. Burhanuddin Harahap, begitu menjadi perdana menteri segera meluncurkan kampanye antikorupsi. Pemerintah Burhanuddin Harahap menganggap sangat perlu untuk melakukan pemberantasan korupsi, karena pemberantasan korupsi dirasa merupakan salah satu usaha yang utama untuk memulihkan kewibawaan Pemerintah, memperbaiki administrasi pemerintahan, untuk menyehatkan kembali alat-alat serta cara pembangunan Negara disegala

bidang. Ia juga ingin menyehatkan keadaan ekonomi negara melalui gerakan antikorupsi. Pada masa Pemerintahan Burhanuddin Harahap Menteri Kesejahteraan Negara dihapus, sebab keberadaan Menteri Kesejahteraan Negara tersebut pada masa Kabinet Ali I dirasa tidak efisien dan ternyata Kementerian tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya.

Pemerintah Burhanuddin Harahap juga menindak tegas terhadap mereka yang dicurigai terlibat di masa Kabinet Ali I, dengan menahan mereka. Ini termasuk Djody Gondokusumo mantan Menteri Kehakiman dan Ong Eng Die mantan Menteri Keuangan pada masa Kabinet Ali.⁵⁶ Rumah kediaman mantan Menteri Ekonomi Iskaq digeledah dan Iskaq yang pada waktu itu sedang di luar negeri dipanggil pulang ke Indonesia oleh Jaksa Agung, tetapi dia malah memperpanjang liburannya di luar negeri. Daftar mereka yang ditahan meliputi pejabat-pejabat di kantor impor dan badan penyelidikan negara, beberapa orang importir serta beberapa orang Cina.⁵⁷ Pemerintah Burhanuddin Harahap lebih mengutamakan tindakan-tindakan yang praktis dan *uitvoerbaar* dengan menggunakan peraturan-peraturan hukum pidana materiel dan peraturan-peraturan administratif yang ada beserta mengerahkan alat-alat kelengkapan Negara yang ada dengan memberikan tugas khusus kepada beberapa pejabat yang perlu. Seperti yang disebutkan dalam pengumuman Pemerintah tanggal 20

⁵⁶ Deliar Noer. *Partai Islam di tengah Pentas Nasional*. Jakarta: Grafiti Press. 1987, hlm. 302.

⁵⁷ Abadi, 22 Agustus 1955, hlm. 2.

Agustus 1955, maka sekali lagi ditegaskan bahwa Pemerintah tidaklah bermaksud untuk menunjukkan tindakan-tindakan pemberantasan korupsi itu khusus kepada suatu golongan, partai, ataupun aliran.⁵⁸ Akan tetapi semata-mata sasaran tindakan Pemerintah dalam hal ini adalah untuk menuntut orang-orang yang dianggap bersalah melanggar hukum dengan tidak memandang partai, golongan, atau agama. Karena jika korupsi yang mulai merajalela di berbagai kalangan itu dibiarkan saja, maka akan sangat merugikan rakyat dan negara.

Perdana Menteri Burhanuddin Harahap mengungkapkan bahwa pemerintahannya akan menyusun Undang-Undang untuk menindak korupsi secara lebih efektif. Ia juga katanya membebaskan Jaksa Agung dari tiap pembatasan sehingga Jaksa Agung dapat bertindak terhadap siapa saja atas dasar hukum. Perdana Menteri Burhanuddin Harahap malah ingin mengeluarkan Undang-Undang antikorupsi itu sebagai Undang-Undang darurat agar melancarkan prosedur pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak-tindak pidana korupsi, dan untuk mendapat keterangan yang sebenarnya tentang harta benda dari setiap orang yang dianggap perlu oleh pihak yang berwajib.

Tentang rancangan Undang-Undang itu, bahwa rancangan itu terdiri dari dua bagian. Bagian I mengatur tindakan-tindakan didalam peradilan dan

⁵⁸ *Keterangan dan Jawaban Pemerintah, op.cit.*, hlm. 29.

bagian II mengatur tindakan-tindakan diluar peradilan. Bagian I memuat ketentuan yang berlainan dari peradilan biasa, yaitu sebagai berikut.⁵⁹

- a. Dengan diadakannya badan pengadilan tersendiri, seperti juga untuk tindak pidana ekonomi.
- b. Terdakwa harus menjawab dan menjawab dengan sebenarnya.

Bagian II memungkinkan penyelidikan terhadap harta benda seseorang oleh Biro Penilik Harta Benda, hal ini tidaklah otomatis berarti bahwa diadakan tuduhan terhadap dirinya. Penyelidikan ini hanya dimaksudkan untuk memeriksa besarnya harta benda dan apakah harta benda tersebut diperolehnya secara halal. Tindakan ini bertujuan menghindarkan kemungkinan penangkapan-penangkapan yang kemudian tidak dapat dibuktikan kesalahan yang dituduhkan. Rancangan Undang-Undang itu telah dimajukan ke Parlemen, tetapi NU dan Perti merasa keberatan. Bahkan NU akan menarik menteri-menterinya dari Kabinet Burhanuddin Harahap jika Kabinet tetap nekat mempercepat usaha pemberantasan korupsi dengan mengeluarkan Undang-Undang darurat.⁶⁰ Kabinet akhirnya tidak jadi mengeluarkan Undang-Undang darurat itu.

6. Meneruskan Pengembalian Irian Barat.

Meneruskan kembali perjuangan pengembalian Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia merupakan salah satu program kerja dari Kabinet Burhanuddin Harahap. Program pengembalian Irian Barat ke dalam wilayah RI sudah menjadi agenda tersendiri dari kabinet-kabinet

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 93.

⁶⁰ Deliar Noer, *op. cit.*, hlm. 303.

sebelumnya. Belanda mulai berkuasa di Irian Barat sejak abad ke-19 dan pada waktu itu Irian Barat berada di bawah kekuasaan Tidore, sementara Tidore sudah lama menjadi jajahan Belanda. Jadi secara otomatis Irian Barat juga termasuk dalam jajahan Belanda. Dalam mempertahankan monopoli perdagangan rempah-rempah di Irian Barat, Belanda mengadakan perjanjian dengan para kepala daerah di perairan kepulauan Maluku. Di bawah kekuasaan Belanda, Irian Barat mendapat julukan *Nederland Nieuw Guinea*. Segala peraturan mengenai pemerintahan di Irian Barat diatur oleh Ratu Belanda. Ketika pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan RI sepenuhnya kecuali Irian Barat yang akan dikembalikan setahun kemudian. Setahun setelah pengakuan kedaulatan, Belanda tidak kunjung menyerahkan Irian Barat kepada RI seperti janjinya.

Pada masa Pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap, pengembalian Irian Barat ke tangan Indonesia menjadi program keenam pemerintah. Setelah pemilu diselenggarakan, perhatian pemerintah ditujukan tentang cara penyelesaian masalah hubungan Indonesia dengan Belanda khususnya mengenai pembatalan perjanjian KMB. Usaha kabinet Harahap dalam hal ini memang dimulai dengan persiapan yang lebih matang dibandingkan Kabinet Ali. Usaha ini diawali dengan pengiriman delegasi, delegasi yang dikirim diketuai oleh Menteri Luar Negeri Anak Agung Gede Agung (seorang moderat yang bekerjasama dengan Belanda di masa revolusi). Namun dalam usahanya, kabinet kurang mendapat

dukungan dari Presiden Soekarno yang tampaknya tidak sabar dengan perundingan yang dirasa berlama-lama. Hal yang sama juga dilakukan oleh partai-partai yang biasa mengikuti pendapat Presiden. Perdana Menteri Harahap sebagai anggota Masyumi, mendasarkan kebijaksanaannya tentang masalah Irian Barat berdasarkan pada ketentuan kongres Masyumi yang diselenggarakan Desember 1954 lalu di Surabaya. Kongres ini menyatakan bahwa perjuangan Irian ini akan dapat berhasil jika negara di tiap bidang diperkuat.⁶¹ Selain itu, politik luar negeri Indonesia hendaklah memperoleh kepercayaan dan penghargaan di dunia luar. Partai Masyumi melihat kegagalan perjuangan di Sidang Umum PBB tahun 1954 sebagai bukti tidak adanya kepercayaan dan penghargaan itu. Menyelesaikan masalah Irian, Kabinet Harahap berjuang dalam 3 front yaitu di PBB dengan berhasil sehingga resolusi Sidang Umum menyokong pendapat Indonesia, terhadap Australia agar negeri ini menaruh simpati, dan perundingan langsung dengan negeri Belanda.

Tentang Australia, kabinet mengirimkan goodwill mission ke Australia yang diketuai oleh Mohamad Roem dari Masyumi.⁶² Tugas misi adalah untuk menjernihkan berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh berbagai pejabat tinggi Indonesia beberapa waktu lalu, mengharapakan simpati Australia terhadap Irian dan Australia diminta tidak memberi dukungan aktif kepada Belanda. Menteri Luar Negeri Anak Agung

⁶¹ *Ibid*, hlm. 321.

⁶² Abadi, 23 Oktober 1955, hlm. 1.

memanfaatkan kunjungan sahabatnya dari Australia, Richard G. Casey ke Jakarta dari tanggal 29 Oktober-2November 1955 untuk memperbaiki hubungan. Kedua menteri ini setuju jika masalah Irian diselesaikan dengan jalan perundingan secara damai.

Persiapan perundingan dengan Negeri Belanda juga memperlihatkan arah yang menguntungkan. Utoyo Ramelan yang diutus oleh Kabinet Harahap sebagai duta besar dengan tugas khusus, berhasil memperoleh persetujuan dari pihak Belanda untuk mengadakan perundingan yang membicarakan 3 hal yaitu pembatalan Uni, pergantian perjanjian KMB tentang soal-soal ekonomi dan keuangan dengan perjanjian biasa, dan masalah Irian Barat tetapi dengan ketentuan bahwa setiap pihak akan perpegang pada pendirian masing-masing dalam hal kedaulatan daerah ini. Tetapi berita bahagia dari pihak-pihak luar ini disertai hal buruk di dalam negeri. Dalam pidatonya di Palembang tanggal 7 Desember 1955, Presiden tampaknya mengecilkan arti usaha kabinet dengan mengatakan "tanpa persatuan revolusioner dengan segala diplomasi dan omong-omong di PBB sampai botak kita tidak akan mencapai hasil".⁶³ Sehari sebelum pidato itu, tepatnya tanggal 6 Desember 1955 NU mengirimkan surat kepada Perdana Menteri Burhanuddin Harahap yang pada intinya bahwa NU tidak akan turut duduk dalam delegasi perundingan

⁶³ P.N.H Simanjuntak . *op.cit.*, hlm. 155.

dengan Belanda, baik sebagai anggota maupun penasehat.⁶⁴ NU beralasan bahwa perundingan tidak akan mencapai hasil yang diharapkan. Hal ini juga diikuti oleh PSII, yang awalnya bersedia turut dalam delegasi dan telah menunjuk Arudji Kartawinata.⁶⁵ Tetapi partainya menunda keberangkatan, karena insiden Cililitan tetapi tiba-tiba beralasan tidak setuju diadakannya perundingan. PSII menyatakan, tidak bersedia lagi menyokong dilanjutkannya perundingan Indonesia-Belanda dan menuntut agar perundingan dihentikan serta delegasi Indonesia dipanggil kembali saat itu juga.

Pada tanggal 6 Januari 1956 perundingan ditunda sampai tanggal 14 Januari 1956 untuk memberi kesempatan kepada kedua delegasi untuk berkonsultasi dengan pemerintah masing-masing tentang hasil yang sudah dicapai. Diantara masa penundaan perundingan ini, perkembangan politik dalam negeri Indonesia menjadi tidak menguntungkan bagi Kabinet Harahap dan secara tidak langsung juga bagi delegasi Indonesia di Jenewa. Tanggal 9 Januari, NU dan PSII dalam suatu rapat bersama memutuskan mengirim nota kepada pemerintah yang isinya sejalan dengan pendapat PSII tersebut. Karena keadaan politik dalam negeri yang memanas, dalam sidangnya tanggal 16 Januari 1956 kabinet memutuskan untuk memanggil kembali delegasi dari Jenewa agar memberi laporan lebih lanjut kepada

⁶⁴ ANRI. Kabinet Perdana Menteri Republik Indonesia No. 2234 Tahun 1955. Selengkapnya lihat dalam lampiran.

⁶⁵ Abadi, 13 Desember 1955, hlm. 2.

Pemerintah tentang hasil-hasil perundingan yang telah dicapainya. Untuk maksud ini Perdana Menteri Harahap mengutus Sardjan Menteri Pertanian dan Mr. Indrakusuma dari Bank Indonesia ke Jenewa.⁶⁶ Namun keputusan Perdana Menteri Harahap ini tidak memuaskan NU dan PSII yang mengambil tindakan untuk menarik menteri-menterinya dari Kabinet.

Selanjutnya pada tanggal 18 Januari 1956, PSII memutuskan untuk menarik Menteri-menterinya yaitu Harsono dan Sudibyo.⁶⁷ Sehari setelah itu, tepatnya pada tanggal 19 Januari 1956 putusan PSII menarik Menteri-menterinya dari kabinet disampaikan kepada Perdana Menteri Harahap. Menurut PSII, pengiriman utusan ke Jenewa bukanlah untuk memutuskan perundingan sebagai yang dituntutnya, akan tetapi hanya untuk menunda perundingan. Dengan demikian, tuntutan PSII ini dibuat menjadi permainan politik yang membahayakan bagi kedudukan PSII di mata masyarakat. PSII juga menuntut Kabinet agar menyerahkan mandat kepada Kepala Negara. Sedangkan NU dalam rapatnya tanggal 19 Januari 1956 memutuskan menarik menteri-menterinya yaitu Sunaryo dan Moh. Ilyas dari kabinet.⁶⁸ Seperti PSII dan NU, Perti juga menyarankan agar Pemerintah menyerahkan mandat kepada Kepala Negara demi keutuhan bersama. Perti berpendapat meneruskan Kabinet ini berarti merugikan bangsa dan negara, disebabkan Kabinet ini tidak mencerminkan aliran yang

⁶⁶ P.N.H Simanjuntak. *op.cit.*, hlm. 156.

⁶⁷ Merdeka, 19 Januari 1955, hlm. 1.

⁶⁸ *Ibid*, 20 Januari 1955, hlm. 2.

hidup dalam masyarakat dan kabinet ini terlalu memenuhi keinginan Belanda. Menghadapi pengunduran diri menteri-menteri dari PSII dan NU, dalam sidangnya tanggal 19 Januari 1956 kabinet memutuskan akan meneruskan Pemerintahannya dengan jalan mengadakan *reshuffle*, dan delegasi di Jenewa juga tidak jadi dipanggil pulang.⁶⁹

Menanggapi sikap NU dan PSII, Jusuf Wibisono dari Masyumi menganggap hal itu kurang wajar karena pemanggilan delegasi dari Jenewa awalnya dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan kedua partai untuk memberi penjelasan.⁷⁰ Ia juga menyarankan agar kabinet melanjutkan kegiatannya. Keadaan politik semakin memanas setelah terlontar suatu komentar yang bersifat provokatif, komentar ini dilontarkan oleh Sirajuddin Abbas dari Perti yang menanyakan mengapa Masyumi lebih suka bekerjasama dengan Parkindo dan Katolik daripada dengan NU dan PSII yang merupakan rekan seagama.⁷¹ Komentar Abbas disambut hangat oleh Natsir, ia menegaskan bahwa permasalahannya tidak sesederhana memilih kawan untuk bekerjasama. Ia juga mengingatkan keputusan rapat-rapat antara partai Pemerintah serta Kabinet tanggal 13 Desember 1955 untuk mengakhiri perundingan dalam waktu yang singkat.⁷² Namun tentu tidak semudah itu, untuk mengakhiri perundingan perlu dilakukan dengan

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Deliar Noer. *op.cit.*, hlm. 324.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*, hlm. 325.

prosedur biasa dan tata tertib serta waktu yang menguntungkan Indonesia. Akibat yang terjadi untuk Pemerintah yang akan datang juga harus diperhatikan. Ia juga mengingatkan bahwa tanggal 6 Januari rumusan akhir telah disusun di Jenewa yang perlu menunggu jawaban akhir dari pihak Belanda.

Perang pernyataan ini semakin memanas setelah Sukiman juga menyatakan keterangannya pada pers. Ia mengatakan bahwa sebaiknya perundingan ditunda dan persoalan ini dilanjutkan kepada Pemerintah yang akan datang. Ia mengingatkan bahwa semula perundingan akan merupakan suatu "tragedi nasional" sambil menambahkan bahwa penarikan sokongan dari NU dan PSII hanya menambah perpecahan dalam lingkungan umat.⁷³ Sukiman mengemukakan bahwa perundingan Jenewa akan menyebabkan pengaruh tidak menguntungkan bagi kabinet berikutnya.

Melayani pernyataan Sukiman, Perdana Menteri Harahap juga memberi keterangannya pada pers. Ia mengatakan tindakan kabinetnya telah disetujui oleh partai, dan hasil perundingan Jenewa tidak akan menyebabkan kesulitan bagi partai-partai di masa yang akan datang serta bagi kabinet berikutnya. Tetapi sebaliknya, hasil perundingan akan membantu kabinet berikut untuk seterusnya menyelesaikan masalah-masalah keuangan dan ekonomi secara lebih positif.⁷⁴ Perdana Menteri Harahap telah mengirim instruksi kepada delegasi di Jenewa

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Abadi, 24 Januari 1956, hlm. 1.

untuk”menutup perundingan dengan pertemuan terakhir”. Ia menegaskan bahwa kabinet seluruhnya menyetujui kebijaksanaan delegasi, dan terserah kepada Belanda untuk menerima atau menolak hasil perundingan tanggal 6 Januari. Perundingan baru dapat dimulai lagi pada minggu kedua Februari 1956, karena Belanda meminta penambahan waktu. Awalnya delegasi Indonesia sudah bermaksud untuk pulang, namun Belanda membuka kembali perundingan. Penambahan penundaan ini menyebabkan kejengkelan bagi delegasi serta pemerintah di Indonesia termasuk wakil-wakil Masyumi yang dianggap moderat dalam menghadapi Belanda. Melalui dua orang wakilnya di Parlemen, Ali Akbar dan Zainal Abidin Ahmad Masyumi mengumumkan bahwa ia mendukung pembatalan Uni secara sepihak jika pihak Belanda terus menunda pengambilan keputusan. Selanjutnya masalah konsekuensi yang timbul dari pembatalan Uni secara sepihak itu masih dipelajari.⁷⁵

Kemudian pada tanggal 24 Januari 1956, Perdana Menteri Harahap mengirimkan perintah kepada delegasi di Jenewa untuk “menghadapi pertemuan terakhir guna menutup perundingan” dengan Belanda. Dalam pernyataannya pada tanggal 26 Januari 1956 PNI menuntut agar Kabinet Harahap menghentikan perundingan Indonesia-Belanda dan diminta menyerahkan mandatnya kepada Kepala Negara. Selain itu, PNI juga menyatakan tidak turut bertanggungjawab apabila hasil-hasil perundingan Indonesia-Belanda itu dipaksakan untuk disahkan oleh DPR sementara

⁷⁵ Abadi, 8 Februari 1956, hlm. 1.

sekarang ini. Dalam keterangannya tanggal 8 Februari 1956 Perdana Menteri Harahap mengatakan bahwa letak kesulitan dan ketidaklancaran perundingan Indonesia-Belanda disebabkan karena Belanda masih ingin sekali berpegang pada Protokol Sunaryo-Luns yang ternyata memang menguntungkan bagi pihak Belanda sendiri.⁷⁶

Akhirnya pada tanggal 11 Februari 1956, perundingan di Jenewa pun menemui jalan buntu, karena Pemerintah Belanda tidak mau menyetujui beberapa pasal yang disepakati tanggal 6 Januari. Menghadapi ini, kabinet Harahap bertindak cepat dan pada tanggal 13 Februari 1956 memutuskan untuk membubarkan Uni Indonesia-Belanda secara unilateral (sepihak).⁷⁷ Kemudian tanggal 20 Februari 1956, Pemerintah mengajukan suatu rancangan Undang-Undang untuk membatalkan perjanjian KMB kepada Parlemen. Hal ini sungguh tindakan revolusioner, ini sesuai dengan keinginan rakyat menurut Jusuf Wibisono. Tetapi partai-partai oposisi seperti PNI, NU, dan PSII dalam pernyataan bersamanya tanggal 22 Februari 1956 mengemukakan pendapat, bahwa Kabinet Harahap tidak dapat menjalankan pembatalan riil yang dapat dipertanggungjawabkan dan bahwa tindakan pemerintah membatalkan KMB tanpa memperhatikan akibat yang akan ditanggung oleh Pemerintah yang akan datang.⁷⁸ Partai

⁷⁶ ANRI. Kabinet Perdana Menteri Republik Indonesia No. 1648 Tahun 1956. Selengkapnya lihat dalam lampiran.

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Merdeka, 23 Februari 1956, hlm. 2.

Masyumi sendiri pada tanggal 23 Februari 1956 menyatakan bahwa kabinet akan mengembalikan mandat pada tanggal 2 Maret 1956 karena pada tanggal ini merupakan pembacaan hasil akhir pemilu. Disamping itu kabinet Harahap juga menghadapi mosi tidak percaya dalam Parlemen, yaitu mosi Sutarjo Kartohadikusumo dari PIR Wongsonegoro yang diajukan pada tanggal 15 Februari 1956 dan Mosi A.A. Achsien dari NU yang diajukan pada tanggal 16 Februari 1956.⁷⁹ Mosi Sutarjo menuntut Pemerintah untuk mengembalikan mandatnya kepada Presiden dalam tempo yang singkat, sedangkan mosi Achsien menyatakan tidak percaya pada politik Pemerintah.

Menjelang akhir Februari 1956, diadakan pembicaraan-pembicaraan secara intensif untuk mengatasi kemacetan pembicaraan antara Pemerintah dan partai oposisi terutama PNI, NU, dan PSII mengenai pembatalan perjanjian KMB dan akhir kerja kabinet. Akhirnya Parlemen tanpa PNI dan PSII menerima rancangan Undang-Undang Pembatalan Uni. Pada tanggal 28 Februari 1956, Parlemen menyetujui dengan suara 108 setuju dan 80 tidak setuju terhadap usul Sunaryo Gondokusumo dari Parindra untuk membicarakan rancangan undang-undang itu sebelum membicarakan rancangan mosi tidak percaya dari Achsien.⁸⁰ Setelah usul Gondokusumo diterima oleh Parlemen, Ketua Parlemen Sartono (PNI) segera mengumumkan bahwa ia meletakkan jabatannya karena menurutnya

⁷⁹ P.N.H Simanjuntak. *op.cit.*, hlm. 158.

⁸⁰ Deliar Noer. *op.cit.*, hlm. 329.

pembicaraan RUU lebih dahulu dibanding mosi tidak percaya Achsien merupakan hal yang menyimpang dari tata tertib dan dipaksakan oleh Fraksi-fraksi pendukung pemerintah. Pengunduran diri Sartono juga diikuti oleh Wakil Ketua II Parlemen Aruji Kartawinata (PSII). Rapat Parlemen diteruskan oleh Wakil Ketua I yaitu A.M. Tambunan (Parkindo), tetapi fraksi-fraksi PNI, NU, PSII, Perti, dan PKI keluar dari sidang sebagai aksi protes.⁸¹ Kabinet merasa terpuak oleh ketidaksediaan Presiden menandatangani Undang-Undang itu dengan alasan bahwa pembatalan persetujuan KMB hendaklah menyeluruh dan menanti kabinet yang didukung oleh Parlemen hasil pemilu. Mulai tanggal 1 Maret 1956, pihak oposisi (PNI, NU, PSII, Perti, dan PKI) memboikot sidang-sidang Parlemen dan menganggap semua sidang yang diadakan sejak tanggal itu tidak sah selama Ketua Parlemen tidak ada. Sementara itu pada hari yang sama, nama-nama anggota Parlemen baru diumumkan.

Tanggal 1 Maret 1956, pimpinan pusat Masyumi mengeluarkan pernyataan bahwa Kabinet Harahap sudah jatuh tempo untuk mengembalikan mandatnya karena berdasarkan hasil pemilu sudah diketahui partai mana yang memenangkannya. Sehingga terdapat pegangan yang sah untuk Kepala Negara menunjuk formatur yang langsung membentuk Kabinet baru berdasarkan hasil-hasil pemilu. Akhirnya dalam

⁸¹ Abadi, 29 Februari 1956, hlm. 1.

sidangnya tanggal 2 Maret 1956 kabinet memutuskan untuk menyerahkan mandatnya kepada Kepala Negara pada tanggal 3 Maret 1956.⁸²

7. Memperkembangkan Politik Kerjasama Asia-Afrika Berdasarkan Politik Bebas dan Aktif Menuju Perdamaian.

Sejak berdirinya Republik Indonesia, pemerintahan diwaktu itu telah meletakkan dasar-dasar politik luar negeri kita yang bersifat bebas dan aktif menuju perdamaian dunia dan yang senantiasa bertujuan mengabdikan kepada kepentingan rakyat dan negara. Dalam rangka usaha untuk mengisi politik luar negeri yang bebas aktif, Pemerintah pada masa Kabinet Ali Sastroamidjono I telah menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika pada tanggal 18-24 April 1955 di Bandung. Hal ini membuktikan bahwa diantara negara-negara Asia-Afrika terdapat rasa solidaritas yang tinggi dan senasib dalam memperjuangkan kemerdekaan negara masing-masing. Konferensi Asia-Afrika juga membicarakan berbagai soal mengenai kepentingan bersama dengan Asia-Afrika. Kerjasama itu meliputi bidang ekonomi, budaya, kolonialisme dan perdamaian dunia.

Atas dasar keperluan Negara Indonesia akan perdamaian, Pemerintah Burhanuddin Harahap menganggap perlu untuk melanjutkan dasar-dasar politik yang diletakkan selama Konferensi Asia-Afrika dan merealisasikan ketentuan-ketentuan dari Konferensi tersebut. Konferensi tersebut dapat dianggap sebagai suatu pernyataan bersama tentang anti imperialisme dan kolonialisme serta soal-soal lain yang penting, akan tetapi

⁸² Deliar Noer. *op.cit.*, hlm.248.

pernyataan akan tinggal pernyataan jika tidak disertai tindakan-tindakan yang nyata.

Pertalian persahabatan dengan negara-negara tetangga akan dipererat dan diperluas. Pada waktu itu Indonesia telah mempunyai perjanjian-perjanjian persahabatan dengan Mesir, Syria, Pakistan, India, Burma, Philipina, Muang Thai dan Afganistan.⁸³ Pemerintah Burhanuddin Harahap telah mengambil langkah-langkah yang konkrit mengadakan perjanjian kebudayaan dengan Mesir, sebagai usaha dalam melaksanakan keputusan Konferensi Asia-Afrika mengenai soal-soal kebudayaan. Negara-negara Timur Tengah lainnya juga telah didekati mengenai hal ini. Selanjutnya pemerintah bermaksud memulai kembali perundingan dengan Jepang mengenai masalah penggantian kerugian perang, dan pemerintah Jepang telah bersedia mengadakan pembicaraan-pembicaraan yang konkrit. Mengenai perjanjian pengangkatan kapal-kapal tenggelam, akan ditinjau lebih jauh oleh Pemerintah dan akan dimintakan kepada DPR untuk melanjutkan pembicaraan RUU yang bersangkutan. Perhubungan dengan Republik Rakyat Tiongkok akan tetap dipelihara dengan baik. Perundingan dengan Philipina mengenai warganegara masing-masing yang berada di negara lain, mulanya menemui beberapa kesulitan namun telah didapat suatu solusi untuk mengatasi kesulitan-kesulitan itu. Indonesia pada saat itu mendapat kunjungan goodwill mission dari Singapura yang diketuai oleh

⁸³ *Keterangan dan Jawaban Pemerintah Burhanuddin Harahap. op.cit., hlm. 34.*

Chief Minister David Marshall dan telah terdapat kesesuaian paham antara kedua Pemerintah untuk merundingkan persoalan-persoalan yang dapat melancarkan hubungan kedua negara tetangga itu. Selain menerima goodwill mission, Indonesia juga mengirimkan goodwill mission ke Australia. Pemerintah Australia menerima goodwill mission Indonesia dengan sangat baik serta Menteri Luar Negeri Australia Richard G. Casey yang tiba di Jakarta bersamaan dengan misi Indonesia di Australia akan mengirimkan misi Australia ke Indonesia.

Dalam hubungan politik persahabatan, untuk melanjutkan serta memperkuat hubungan yang telah ada, kerjasama dengan Negara-negara pengusaha Konferensi Asia Afrika lainnya yaitu Burma, India, Pakistan dan Ceylon akan dipelihara dan diteruskan.⁸⁴ Bertalian dengan itu, Wakil Presiden atas undangan Negara-negara yang bersangkutan akan mengunjungi India, Burma, dan Ceylon dalam bulan Oktober dan November 1955. Mengenai prinsip pemerintah yang menolak segala macam Kolonialisme dan imperialisme, pemerintah Burhanuddin Harahap bersama dengan negara-negara Asia-Afrika lainnya dan sesuai atas keputusan Konferensi Bandung itu maka dengan keras Indonesia mengecam perbuatan-perbuatan Perancis di Afrika Utara menindas pergerakan kebangsaan di sana. Melalui jalan ini, kita membantu secara prinsipil gerakan Kebangsaan di Afrika Utara untuk mencapai kemerdekaan Bangsa Maroko Tunisia dan Algeria.

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 199.

Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap ini juga mengadakan kerjasama dengan Turki, Singapura, dan Rangoon. Kerjasama dengan Turki ini dimulai dengan pembukaan Perwakilan RI di Turki.⁸⁵ Sedangkan dengan Singapura, Indonesia mengirimkan Delegasi ke Consultative Committee Meeting Colombo Plan. Delegasi yang dikirim diantaranya berasal dari Menteri Luar Negeri, Menteri Pertanian dan Direktur Biro Perancang Negara.⁸⁶ Kerjasama seperti ini juga dilakukan dengan Rangoon. Dalam kerjasamanya, Indonesia mengirimkan delegasi untuk mengikuti Konferensi Latihan Kerja se Asia di Rangoon.⁸⁷ Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan Regional Seminar on Population Problems in Asia and the Far East di Bandung pada tanggal 21 November-3 Desember 1955. Seminar ini kurang lebih mengundang 20 negara, diantaranya Burma, China, India, Pakistan, Filipina, Thailand, Ceylon, Japan, Korea dan lain-lain.⁸⁸

Kabinet Burhanuddin Harahap juga berhasil pula dalam politik kerjasama luar negeri. Pada tanggal 2 Maret 1956, atau sehari sebelum kabinet menyerahkan mandat kepada Presiden, ditandatangani bantuan

⁸⁵ ANRI. Kabinet Perdana Menteri Republik Indonesia No. 2219 Tahun 1955.

⁸⁶ ANRI. Kabinet Perdana Menteri Republik Indonesia No. 2222 Tahun 1955.

⁸⁷ ANRI. Kabinet Perdana Menteri Republik Indonesia No. 2228 Tahun 1955.

⁸⁸ ANRI. Kabinet Perdana Menteri Republik Indonesia No. 2230 Tahun 1955.

kredit pangan dari AS oleh Menteri Luar Negeri Anak Agung dan Duta Besar AS.⁸⁹ Bantuan itu bernilai \$ 96.700.000 dan akan diserahkan dalam 2 tahun. Sepuluh hari kemudian Menteri Luar Negeri Dulles datang untuk menyampaikan undangan dari Presiden Eisenhower agar Presiden Sukarno berkunjung ke AS.

⁸⁹ Moedjanto. *Indonesia Abad 20 Jilid II*. Yogyakarta: Kanisius. 1992, hlm. 95.

BAB IV

KONDISI SOSIAL POLITIK

A. Masa Pemerintahan Sebelum Kabinet Burhanuddin Harahap.

Pasca pembubaran Republik Indonesia Serikat, Indonesia merubah sistim pemerintahannya yang tadinya menggunakan sistim liberal dirubah menjadi sistem parlementer. Dasar negara yang digunakan pun turut dirubah yaitu menggunakan UUDS 1950. Sistem demokrasi parlementer ternyata kurang tepat digunakan di negara yang baru saja merdeka seperti Indonesia pada saat itu. Dalam periode demokrasi parlementer ini ditandai dengan munculnya banyak partai politik dan sering terjadinya pergantian kabinet. Kabinet tidak berumur panjang, yang menyebabkan programnya tidak berjalan dengan tuntas. Banyak urusan negara yang terkatung-katung atau terbengkalai karena kabinet sibuk mempertahankan diri terhadap rongrongan politis. Sebelum pemilu 1955, Masyumi, PNI, PSI, dan PIR adalah partai-partai terkemuka yang mempunyai perwakilan terbanyak dalam Parlemen sementara yang seluruhnya berjumlah 232 orang. Kebanyakan orang menjadi pengikut partai bukan karena ideologi, tetapi karena menginginkan pangkat.¹ Persaingan antar partai, gonta ganti kabinet dan program-program kerja yang terbengkalai membuat kondisi sosial politik di Indonesia menjadi tidak stabil.

¹ G. Moedjanto. *Indonesia Abad ke-20 Jilid 2*. Yogyakarta: Kanisius.1992, hlm. 79.

Pemerintahan setiap kabinet memberi dampak tersendiri terhadap keadaan sosial politik bangsa pada saat itu. Kabinet pertama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kabinet Natsir. Kabinet ini terbentuk pada tanggal 6 September 1950. Kabinet ini merupakan koalisi antara partai Masyumi dengan partai kecil lainnya dan beberapa golongan non partai. Pada masa pemerintahan kabinet Natsir keadaan sosial politik Indonesia sangat tidak stabil, mengingat kabinet ini merupakan kabinet pertama pada masa demokrasi Parlementer. Pada awal terbentuknya kabinet, Presiden memiliki peran yang sangat besar dalam pembentukan kabinet ini. Selain itu, Natsir yang ditunjuk Presiden untuk menjadi formatur Kabinet telah menetapkan suatu sikap yang menyulut perpecahan partai dalam pemerintahan. Hal ini nampak pada saat menyusun kabinet, Natsir telah menetapkan sikap bahwa posisi Masyumi di Kabinet harus memberikan pengaruh yang lebih besar dari partai lainnya yang duduk dalam kabinet.² Karena tidak mendapat dukungan dari PNI, Kabinet Natsir memutuskan membentuk kabinet tanpa mengikutsertakan PNI di dalamnya. Secara tidak langsung kabinet Natsir telah mendorong PNI untuk berperan sebagai partai oposisi. Kritikan tajam juga datang dari partainya sendiri. Masyumi menilai Natsir sebagai perdana menteri yang menyalahi keputusan Kongres Desember 1949 yang melarang ketua umum partai menjadi menteri.³ Banyaknya pertentangan dari partai-

²Waluyo. *Dari pemberontak menjadi Pahlawan Nasional: Mohammad Natsir dan Perjuangan politik di Indonesia*. Yogyakarta: Ombak. 2009, hlm.80.

³ Deliar Noer. *Partai Islam di Pentas Nasional*. Jakarta: Grafiti Press. 1987, hlm. 205.

partai menunjukkan bahwa pemerintahan pada saat itu masih sangat mementingkan kepentingan partai dan mengesampingkan kepentingan negara. Banyaknya pemerintah yang sibuk mengejar idealisme partai membuat para pemimpin tersebut saling menjatuhkan.

Hal tersebut menjadi alasan jatuhnya kabinet ditambah dengan kegagalan dalam masalah Irian Barat yang juga menyebabkan terjadinya pertentangan antara Natsir dan Presiden Soekarno. Proses yang mempercepat jatuhnya kabinet ini adalah setelah 2 orang menteri dari PIR Mr. Wongsonegoro dan Prof Ir. Johannes menarik diri dari kabinet, sebagai suatu Kabinet dri impasse yang diciptakan ketika parlemen tetap berpegang teguh terhadap mosi S. Hadikusumo dari PNI. Mosi S.Hadikusumo ini tentang pencabutan PP No. 39 Tahun 1950 mengenai pembekuan DPRD, sehingga kabinet Natsir mundur. Pada tanggal 21 Maret 1951 Natsir mengembalikan mandatnya pada Presiden Soekarno.

Kabinet berikutnya setelah Kabinet Natsir jatuh adalah suatu kabinet koalisi. Kabinet ini terbentuk pada tanggal 26 April 1951. Kedua partai terbesar waktu itu yakni Masyumi dan PNI duduk didalamnya. Kabinet ini dipimpin oleh Perdana Menteri Soekiman. Kabinet ini juga tidak berusia lama, karena mendapat tantangan dari Masyumi maupun PNI sendiri. Selain itu terdapat pertentangan antara Soekiman dan Natsir yang semakin memuncak. Sebenarnya hal ini merupakan ironi politik dalam tubuh Masyumi yang seakan-akan mewakili umat islam dalam kancah politik di Indonesia. Pertentangan pendapat dan prinsip yang bukan akidah antara pemimpin

dengan pemimpin dalam satu tubuh partai sampai merembet ke luar, ke masyarakat luas bahkan tubuh kabinet yang saling berposisi dan saling menjatuhkan pihak lainnya walaupun separtai. Bahkan kabinet ini jatuh karena oposisi dari temannya sendiri yang separtai. Selain itu, kabinet ini jatuh dikarenakan politik luar negerinya yang dianggap melanggar prinsip bebas aktif. Puncak daripada politik luar negeri yang sedemikian itu ialah penerimaan bantuan Amerika Serikat atas dasar Mutual Security Act (MSA) yang berhasil mendiskreditkan menteri Luar Negeri Ahmad Subardjo.⁴ Hal ini membuat Indonesia tidak konsisten dalam menjalankan politik bebas aktif yang dijalankan dan cenderung memihak salah satu blok dalam perang dingin. Timbunya krisis moral seperti korupsi, ketimpangan sosial, dan hubungan antara sipil dan militer yang tidak baik semakin mempercepat jatuhnya kabinet ini. Ditambah dengan kegagalan memperjuangkan pembebasan Irian Barat. Kabinet ini akhirnya demissioner pada tanggal 23 Februari 1952.

Setelah kabinet Soekiman jatuh, pada tanggal 30 Maret 1952 Mr. Wilopo (PNI) berhasil membentuk kabinet baru. Pada masa Kabinet Wilopo bekerja, terdapat perkembangan politik yang menarik, yakni berubahnya Nahdlatul Ulama (NU) menjadi sebuah partai politik, dan perubahan haluan Partai Komunis Indonesia (PKI). Perubahan NU menjadi partai politik berawal dari keluarnya NU dari Masyumi pada 31 juli 1952 dan berdiri

⁴ *Mutual Security Act* merupakan undang-undang keamanan bersama yang dibuat antara Amerika Serikat dan Indonesia dalam menjalin kerja sama. Lihat Rhoma Dwi Aria Yuliantri. "Catatan Singkat Soekiman: Sepuluh Bulan Menjadi Perdana Menteri". *Basis*. No. 03-04. tahun ke-60, 2011, hlm. 55.

sebagai partai baru pada 30 Agustus 1952. Pada tanggal yang sama juga bersama Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dan Persatuan Tarbiyan Islam (Perti) membentuk Liga Muslim Indonesia. Keluarnya NU dari Masyumi dipicu oleh pertikaian antara modernis Islam Muhammadiyah dengan Islam “kolot” NU. Tokoh-tokoh NU merasa dilangkahi saja oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah dalam kancah politik.⁵ Karena hal itu pilihan terakhir bagi NU agar terus eksis adalah dengan menjelmakan diri sebagai partai politik dan berpisah dari Masyumi. Perubahan haluan NU ini murni karena konflik dalam tubuh Masyumi sendiri tanpa adanya campur tangan pihak lain. Ternyata kondisi pecahnya Masyumi sangat menguntungkan bagi PNI. Dengan pecahnya Masyumi, Partai Nasionalis Indonesia (PNI) dapat muncul sebagai partai terbesar.

Selain masalah NU, perubahan haluan yang terjadi pada PKI juga menjadi sorotan menarik dalam perjalanan kabinet Wilopo. Pada bulan Agustus 1951 pada masa pemerintahan Kabinet Soekiman telah terjadi pembersihan terhadap anggota-anggota PKI yang dianggap menentang pemerintah. Pada gerakan awal pembersihan sekitar 200 orang ditangkap, sampai beberapa kali razia dilakukan hampir 2.000 tokoh-tokoh kiri dipenjarakan.⁶ Pasca peristiwa itu PKI menjadi lemah. Dibawah kepemimpinan D.N. Aidit PKI mengubah haluan gerakannya demi

⁵ G. Moedjanto.*op. cit.*, hlm. 87.

⁶ Abdullah. *Langkah Merah : Gerakan PKI 1950-1955*. Yogyakarta: Bentang. 1996, hlm. 32-33.

mengembalikan kekuatannya dalam pemerintahan. PKI yang gerakannya selalu diidentikan dengan radikalisme kini harus bekerja sama dengan partai-partai dalam front persatuan nasional dan mendukung pemerintahan kabinet Wilopo meskipun di dalamnya terdapat tokoh-tokoh Masyumi.⁷ Dalam sejarah PKI dan Masyumi selalu bersebrangan hal ini dikarenakan perbedaan ideologi antara keduanya. Ketika PKI mulai aktif kembali dalam pemerintahan, Masyumi menunjukkan sikap yang antipati dan perlawanan terhadap partai tersebut. Namun PKI tetap dapat diuntungkan dengan keadaan Masyumi pasca keluarnya NU. Dengan hal ini PKI dapat dengan mudah menghadapi lawan politiknya tersebut.

Taktik yang digunakan PKI ini sangat menguntungkan. Selain posisinya kembali aman PKI juga memulai hubungan baiknya dengan PNI. Dukungan PKI terhadap pemerintahan juga semakin digencarkan. Pada tanggal 22 April 1952 PKI mengeluarkan pernyataan mendukung kabinet, selain itu delapan hari kemudian diikuti Jaminan PKI untuk melarang Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) untuk menggerakkan aksi-aksi pemogokan.⁸ Alhasil pemogokan-pemogokan dan kerusuhan yang sering terjadi pada masa pemerintahan Soekiman kini mulai mereda bahkan tidak lagi terjadi. Selain menguntungkan pemerintahan, hal ini juga menguntungkan bagi pihak PKI. Maka PKI akan terus memberikan dukungannya terhadap Wilopo selama pemerintah tetap bersifat Progresif dan antifasis.

⁷ Herbert Feith. *The Wilopo Cabinet 1952-1953 : A Turning Point in Post-Revolutionary Indonesia*. New York: Cornel University Press. 2009, hlm. 101.

⁸ Abdullah. *op. cit.*, hlm. 43.

Perkembangan politik dari NU dan PKI hanyalah salah satu peristiwa yang mewarnai perjalanan kabinet ini. Sama halnya seperti kabinet-kabinet sebelumnya, dalam menjalankan tugasnya Wilopo juga mengalami berbagai macam hambatan. Banyak masalah berat yang harus dihadapi oleh kabinet ini, diantaranya Peristiwa 17 Oktober 1952 dalam TNI Angkatan Darat sebagai ledakan rasa amarah dari pihak militer terhadap campurtangan kaum politikus terhadap soal-soal intern Angkatan Darat. Tetapi jatuhnya Kabinet disebabkan oleh persoalan tanah perusahaan asing di Sumatera Utara. Sesuai dengan persetujuan KMB, tanah-tanah perkebunan itu harus dikembalikan pada pemiliknya, orang asing. Penduduk yang telah mengusahakan tanah itu tidak bersedia meninggalkan, sehingga timbul bentrokan antara penduduk yang telah dihasut PKI dengan alat negara yang ditugaskan mengosongkan tanah-tanah itu. Dalam peristiwa itu 5 orang penduduk terbunuh diantaranya 4 orang Cina. Mosi tidak percaya dilancarkan di DPR, sehingga kabinet Wilopo pada tanggal 3 Juni 1953.

Setelah melalui masa krisis 58 hari lamanya. Kabinet berikutnya terbentuk pada tanggal 1 Agustus 1953 dengan Perdana Menteri Mr. Ali Sastroamidjoyo (PNI) dan Wakil Perdana Menteri Mr. Wongsonegoro (PIR). Kabinet ini dikenal dengan turut sertanya Nahdatul Ulama (NU) setelah keluar dari Masyumi. Namun, kali ini Masyumi tidak diikutsertakan di dalam pemerintahan. Kabinet Ali merencanakan mengadakan pemilihan umum pada pertengahan tahun 1955. Seperti halnya dengan kabinet-kabinet terdahulu, kabinet Ali juga mengalami bermacam-macam kesulitan. Di dalam negeri

kabinet Ali menghadapi masalah keamanan seperti masalah DI/TII di Jawa Barat, Aceh dan Sulawesi Selatan. Di dalam politik luar negeri harus menghadapi masalah Irian yang tidak kunjung selesai. Persoalan pokok yang akan diselesaikan oleh kabinet Ali yaitu pemilihan umum, tidak dapat terlaksana. Pada masa Kabinet Ali bekerja, terdapat perkembangan politik yang menarik, yakni terdapat keretakan dalam tubuh kabinet sendiri ataupun partai koalisi pendukung kabinet, sebagaimana kabinet-kabinet koalisi sebelumnya. Keretakan yang paling menonjol terlihat pada tubuh PIR yaitu partainya Mr. Wongsonegoro Wakil Perdana Menteri I kabinet ini.⁹ Tanggal 17 Oktober 1954 PIR yang dipelopori oleh Mr. Tajuddin Mur menuntut agar Kabinet Ali menyerahkan mandatnya kembali kepada Presiden. Sebenarnya hal ini merupakan ironisme Politik yang terjadi dalam tubuh PIR. Anehnya mengapa PIR yang menuntut bubarnya kabinet, mengapa bukan PSI atau Masyumi yang termasuk oposisi kabinet ini. Sebenarnya kedudukan PIR dalam partai dapat dibilang penting. Mr. Wongso sendiri sebagai tokoh PIR menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri I. Disamping itu terdapat dua anggota PIR lainnya yang duduk dalam kabinet yakni Hazairin dan Rooseno. Hal ini berarti dalam tubuh PIR terdapat keretakan, yang mana ada kelompok dalam partai yang tidak setuju terhadap kawannya separtai yang duduk dalam kabinet. Tetapi tuntutan Tajuddin Nur cs tidak sampai menggoyahkan kabinet. Keretakan dalam tubuh PIR akhirnya nampak jelas, pada tanggal 22 Oktober 1954 PIR pecah menjadi dua golongan atau partai yaitu PIR Wongsonegoro

⁹ Bibit Suprpto. *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1985, hlm. 159.

dan PIR Hazairin. Peristiwa perpecahan ini terjadi 5 hari setelah tuntutan Mr. Tajuddin Nur tentang bubarnya kabinet tadi. Kedudukan menteri-menteri PIR dalam kabinet semakin sulit. Akibat keretakan dalam tubuh partainya. Apalagi dalam keretakan tersebut yang terlibat langsung adalah para tokoh yang duduk dalam kabinet seperti Mr. Hazairin (Mendagri), Mr. Wongsonegoro (Waperdam I) dan tokoh-tokoh lainnya. Akibatnya tanggal 17 November 1954, menteri-menteri dari PIR Wongso mengundurkan diri dari kabinet. Akibatnya diadakan *resuffle*. Prestasi utama kabinet Ali Sastroamidjoyo I adalah penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika pada tanggal 18-24 April 1955. Kabinet Ali jatuh karena suatu konflik dengan TNI AD dalam persoalan pengangkatan seorang KSAD. Kabinet Ali sempat berumur 2 tahun (Juli 1953-Juli 1955).

B. Masa Pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap.

Kabinet Ali Sastroamidjoyo I mengembalikan mandatnya pada tanggal 24 Juli 1955. Kemudian sebagai gantinya Wakil Presiden Moh. Hatta menunjuk Mr. Burhanuddin Harahap sebagai formatur kabinet. Tanggal 11 Agustus 1955, Kabinet pimpinan Burhanuddin Harahap diumumkan dan telah disahkan dengan Surat Keputusan Wakil Presiden No. 141 tahun 1955.¹⁰ Keesokan harinya tanggal 12 Agustus 1955, diadakan pelantikan dan serah terima. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi antara Masyumi dengan partai-partai kecil lainnya. Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap di Indonesia, terdapat perkembangan sosial politik yang sangat menarik. Diawal

¹⁰ ANRI. Kabinet Presiden Republik Indonesia No. 1396, hlm. 12.

terbentuknya kabinet ini saja, terdapat pertentangan antara Masyumi dan PNI. Pertentangan ini dimulai ketika pembentukan komposisi kabinet oleh formatur Burhanuddin Harahap. PNI menuntut kursi Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum. Selain itu, PNI juga menuntut agar kursi Menteri Pertahanan tidak diduduki Masyumi. Oleh sebab itu, maka Burhanuddin Harahap tidak mengikutsertakan PNI dalam komposisi kabinetnya. Hal ini berarti PNI duduk sebagai partai oposisi yang cukup kuat terhadapnya di Parlemen, karena tentu saja PKI akan memberi bantuan pada PNI dalam hal ini. Menghadapi hal tersebut, Masyumi mencari kawan sebanyak-banyaknya walaupun terdiri dari partai-partai kecil. Tetapi Masyumi beruntung mendapat dukungan dari NU dan PSII yang bersedia turut duduk dalam komposisi kabinet. Hal ini sangat membahagiakan bagi formatur Burhanuddin Harahap dari Masyumi, dengan ikutnya NU berarti merentang jalan untuk mengembalikan kerjasama umat Islam di Indonesia. Mengingat pada masa Kabinet Wilopo berkuasa, terdapat perselisihan antara NU dan Masyumi. NU merasa tidak puas selama menjadi satu dengan Masyumi. Akhirnya perselisihan antara NU dan Masyumi ini berbuntut keluarnya NU dari Masyumi. Tidak hanya mendapat dukungan dari NU dan PSII, kabinet Harahap juga bekerjasama dengan partai-partai lain seperti PIR Hazairin, Demokrat, PSI, PKRI, Partai Buruh, PRN, Parindra, Parkindo, dan PRI.¹¹

Ketika selesai dilantik, Kabinet Burhanuddin Harahap nampak semangat untuk memulai tugas-tugasnya terutama dalam mengembalikan

¹¹ P.N.H Simanjuntak. *Kabinet-kabinet Republik Indonesia dari Awal Kemerdekaan sampai Reformasi*. Jakarta: Djambatan. 2003, hlm. 150.

kewibawaan pemerintah. Tindakan pertama yang dilakukan dalam rangka mengembalikan kewibawaan Pemerintah yaitu pemberantasan korupsi dengan mengadakan penangkapan-penangkapan terhadap orang yang dicurigainya. Hal ini dipicu oleh tindakan aparat pemerintah yang melakukan korupsi, skandal pembagian lisensi istimewa (untuk mengimpor barang) menjadi rahasia umum, pengisian jabatan tidak ditentukan oleh kecakapan dan kejujuran tetapi oleh kesetiaan kepada partai.¹² Ini semua menyebabkan perekonomian menjadi kacau. Berbagai penyelewengan itu terjadi terutama karena partai-partai sedang menghadapi pemilu dan untuk melakukan kampanye banyak biaya yang diperlukan. Memungut iuran dari anggota jelas tidak mungkin, karena itulah mereka memanfaatkan kedudukan. Uang yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat malah dijadikan untuk kepentingan kampanye partai politik. Sungguh suatu keadaan yang tragis mengingat dikala itu perekonomian Indonesia masih tidak stabil. Menghadapi hal itu Kabinet Burhanuddin Harahap segera meluncurkan kampanye anti korupsi, bukan saja untuk menindak mereka yang terlibat dalam perbuatan ini, tetapi untuk memperbaiki administrasi pemerintahan. Ia juga ingin menstabilkan keadaan ekonomi negara melalui gerakan anti korupsi. Oleh sebab itu ia mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang dicurigai terlibat di masa kabinet Ali, dengan menahan mereka. Ini termasuk bekas Menteri Kehakiman yaitu Djody Gondokusumo dan bekas menteri Keuangan Ong Eng Die. Selain itu, daftar mereka yang ditahan karena korupsi meliputi pejabat-

¹² Moedjanto. *op.cit.*, hlm. 90.

pejabat kantor impor dan badan penyelidik negara, beberapa orang importir serta beberapa orang Cina.¹³ Dengan adanya pemberantasan korupsi diatas, Kabinet Burhanuddin Harahap berhasil mendapat simpati dan dukungan dari kalangan masyarakat.

Hubungannya dengan usaha mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat kepada Pemerintah, maka kabinet mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan persoalan 17 Oktober 1952 dengan memutuskan tidak akan diadakan penuntutan-penuntutan di muka pengadilan sedangkan tindakan-tindakan selanjutnya disesuaikan dengan jiwa Piagam Yogya. Pemerintah juga mengambil kebijaksanaan untuk menempatkan kembali jabatan aktif semua perwira yang telah dibebastugaskan dari tugasnya karena tersangkut peristiwa 17 Oktober. Malahan pada tanggal 27 Oktober 1955 Kolonel A.H Nasution ditunjuk sebagai KSAD baru. Dalam Perintah Hariannya 3 November 1955, Kolonel Zulkifli Lubis menegaskan bahwa pengangkatan Nasution sebagai KSAD baru itu adalah berdasarkan usul Angkatan Darat dan menyerukan pula agar disiplin pribadi dan disiplin tentara ditegakkan. Pemerintah beranggapan bahwa dengan itu, maka soal pro dan kontra peristiwa 17 Oktober telah ikubur oleh Angkatan Darat sendiri.

Pada masa ini, telah terjalin hubungan yang baik antara Angkatan Darat dengan Pemerintah. Bahkan ketika Kabinet Burhanuddin Harahap berakhir dan terpilihnya Kabinet Ali Sastroamidjoyo untuk yang kedua kalinya, Militer merasa sangat kecewa. Kalangan-kalangan luas dalam

¹³ Deliar Noer. *op.cit.*, hlm. 302.

Angkatan Darat (AD) telah mengikuti perkembangan pada akhir tahun 1955 dan awal tahun 1956 dengan rasa kecewa semakin besar. Hubungan antara Angkatan Darat dan Kabinet Burhanuddin Harahap telah berjalan lancar dan pengunduran diri kabinet Burhanuddin Harahap sangat disesalkan dikalangan tentara. Selain itu, cara kabinet ini jatuh pun menimbulkan kekhawatiran di kalangan banyak perwira bahwa orang-orang politik akan meneruskan pola mereka yang lama untuk pertama-tama memusatkan perhatian pada upaya untuk menjatuhkan pemerintah. Yang memperburuk keadaan adalah kenyataan bahwa pimpinan kabinet itu berada di tangan orang yang mereka anggap telah gagal sama sekali dalam pertengahan tahun sebelumnya untuk mengenali ketidakpuasan-ketidakpuasan di pihak tentara untuk dan untuk memberikan pimpinan nasional. Selain itu orang yang sama yang telah kehilangan jabatannya untuk sebagian karena tidak dapat memahami pandangan-pandangan pihak tentara, sekarang memimpin kementerian pertahanan.

Setelah berhasil memberantas korupsi, Kabinet Burhanuddin Harahap mengatur kembali keadaan ekonomi negara. Pemerintah Harahap dapat memperkecil defisit tahun 1955 menjadi Rp.3 Milyard karena tambahan dari penerimaan T.P.I yang mula-mula ditaksir Rp.1 Milyard kemudian bertambah Rp.1,6 Milyard. Pemerintah juga menekan lebih jauh defisit Rp.3 Milyard menjadi Rp.2 Milyard dalam masa empat bulan, serta peningkatan pendapatan kurang lebih Rp.1,1 milyar. Neraca perdagangan juga positif pada masa ini Rp.1,8 milyar. Kabinet Burhanuddin juga melakukan perlindungan pada

pengusaha dan pedagang nasional. Pemerintah menyediakan impor dari negara-negara di Asia seperti Hongkong, Jepang, Singapura, dan lain sebagainya hanya untuk pedagang-pedagang Nasional.¹⁴Selain itu, beberapa barang oleh Pemerintah khusus disediakan hanya untuk importir-importir nasional, misalnya benang tenun. Selanjutnya mengenai import bahan-bahan industri kepada importir-importir nasional diberikan pula fasilitas kredit antara lain pembayaran muka sampai pembukaan L.C dan tidak diwajibkan menyeter Rp.5 juta. Selain melindungi pengusaha nasional, kabinet ini berhasil mengendalikan harga, menjaga agar jangan terjadi inflasi dan sebagainya. Dalam masalah ekonomi kabinet ini berhasil baik. Dapat dikatakan kehidupan rakyat semasa kabinet cukup makmur, harga barang tidak melonjak naik akibat inflasi.

Pada tahun 1955, masyarakat Indonesia sudah diliputi frustasi nasional. Instabilitas politik yang tidak memberikan kesempatan kerja kepada sebuah kabinet lebih dari satu tahun, menyebabkan program kerja yang terlaksana tidak maksimal. Partai-partai politik tidak terlihat melaksanakan tugasnya sebagai penyalur kehendak rakyat, pemimpin-pemimpin partai bahkan terlalu sibuk mengurus kepentingan diri dan golongannya masing-masing. Timbullah dugaan bahwa kepincangan-kepincangan di bidang politik disebabkan karena partai-partai tidak mencerminkan dukungan nyata dari rakyat pemilih. Karena itu masyarakat mulai mendambakan pemilihan umum

¹⁴*Keterangan dan Jawaban Pemerintah tentang Program Kabinet Burhanuddin Harahap 1955.* Jakarta: Kementerian Penerangan RI. 1955, hlm. 165.

yang diharapkan mampu menghasilkan suatu pemerintahan yang stabil dan kuat, suatu pemerintahan yang sudah bertahun-tahun dijanjikan namun belum juga terlaksana.

Akhirnya pemilihan umum yang dinanti-nantikan berhasil dilaksanakan dalam masa Kabinet Burhanuddin Harahap ini. Tanggal pelaksanaan pemilihan umum telah ditetapkan, pemilu untuk anggota DPR tanggal 29 September 1955 dan pemilu untuk anggota Konstituante tanggal 15 Desember 1955 menurut pengumuman Pemerintah pada tanggal 8 September 1955.¹⁵ Sejak saat itu semua partai meningkatkan kampanye-kampanyenya sampai taraf yang tinggi. Karena kampanye yang dilakukan dalam waktu yang singkat dengan intensitas begitu tinggi, pertentangan sesuai dengan garis-garis kepartaian memecah belah masyarakat Indonesia sampai ke desa-desa. Dengan semakin dekatnya hari pelaksanaan pemilu, kehidupan politik di Indonesia pun semakin bergairah dengan makin banyaknya wakil partai turun ke desa-desa untuk berkampanye langsung. Terkadang, mereka berkampanye dengan memberi janji-janji tak jarang pula dengan berbagai bentuk ancaman atau tekanan. Salah satu bentuk ancamannya dengan teror psikologis berupa cerita-cerita gaib, misalnya dikatakan kalau suatu desa tak memilih partai tertentu maka desa itu akan mendapat celaka. Kampanye politik yang terjadi waktu itu juga mendorong proses “de-tradisionalisasi” di desa-desa. Ikatan-ikatan lama yang selama ini berdasar kekerabatan atau tradisi menjadi renggang dan berubah menjadi ikatan baru yang berdasarkan asosiasi politis

¹⁵ Wilopo. *Zaman Pemerintahan Partai-partai dan kelemahan-kelemahannya*. Jakarta: Yayasan Idayu. 1976, hlm. 43.

yang sering kali menimbulkan friksi-friksi baru. Akibatnya suasana tegang menjelang pemilu tak dapat dihindari.

Pada hari H pelaksanaan pemilu, jumlah mereka yang pergi ke kotak-kotak suara dinilai sangat besar. Ketegangan-ketegangan yang sempat muncul menjelang pemilu semua sirna begitu saja. Orang-orang rela berjalan kaki sejauh lima kilometer atau lebih untuk sampai ke tempat pemungutan suara. Ada pula yang harus naik perahu untuk bisa mencapai tempat pemilihannya. Bagi mereka, jarak tidak membuat golput. Meskipun jarak yang harus ditempuh jauh, tetapi bagi mereka yang terpenting adalah dapat berpartisipasi dalam peristiwa Nasional yang amat penting itu. Tingginya partisipasi rakyat pada pemilu tanggal 29 September 1955 tercermin dalam jumlah orang yang ikut mencoblos yaitu 91,4 persen dari mereka yang telah terdaftar.¹⁶ Hasil pemilihan umum yang pertama dalam kehidupan Republik Indonesia itu ternyata membawa beberapa hal yang baru. Empat partai muncul sebagai pemenang, yakni Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, Nahdatul Ulama (NU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Dalam hal ini munculnya NU dan PKI sebagai partai besar merupakan suatu hal yang sebelumnya tidak terduga.

Berdasarkan hasil pemilu 1955, berbagai tanggapan muncul untuk memaknai pemilu 1955. Bagi Bernard Dahm misalnya secara sosiologis Pemilu 1955 menunjukkan kuatnya pengaruh partai-partai dikalangan bawah

¹⁶ Basakara T. Wardaya. *Membuka Kotak Pandora Pemilu 1955*. Basis. No. 03-04. Tahun ke 53. 2004, hlm. 12.

masyarakat, sebagaimana telah dimulai pada zaman pergerakan.¹⁷ Meskipun persiapan pemilu nasional pertama itu relatif singkat, tetapi tampak bahwa kampanye berjalan efektif dan rakyat benar-benar mau melibatkan diri dalam peristiwa politik nasional yang bersejarah itu. Di mata Daniel Lev, pemilu 1955 luar biasa. Pemilu ini diadakan hanya lima tahun setelah pengakuan kedaulatan, tetapi pelaksanaannya mengagumkan. Ia terkesan dengan tanggapan masyarakat yang sangat antusias. Baginya, pemilu 1955 menunjukkan bahwa rakyat Indonesia menerima sistem parlementer itu dengan semangat yang luar biasa. Dimatanya tuduhan bahwa kebudayaan Indonesia tidak bisa menyokong sistem politik modern, sistem parlementer atau sistem demokrasi adalah tuduhan yang tidak mendasar. Sebaliknya pemilu 1955 menunjukkan bahwa rakyat Indonesia mampu dan sangat antusias dalam mempraktikkan demokrasi.

Berdasarkan hasil pemilu 1955, dari segi penyelenggaraan pemilu dapat dikatakan berjalan dengan bersih dan jujur karena suara yang diberikan masyarakat mencerminkan aspirasi dan kehendak politik mereka. Akan tetapi kampanye yang relatif terlalu lama (2,5 tahun) dan bebas telah mengundang emosi politik yang amat tinggi terutama kecintaan yang berlebihan terhadap partai. Pemilu tahun 1955 ternyata tidak mampu menciptakan stabilitas politik seperti yang diharapkan. Bahkan muncul perpecahan antara pemerintahan pusat dan beberapa daerah. Kondisi tersebut diperparah dengan ketidakmampuan anggota Konstituante untuk mencapai titik temu dalam

¹⁷ *Ibid*, hlm. 13.

menyusun UUD baru untuk mengatasi kondisi negara yang kritis. Sampai akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit. Dekrit ini terkenal dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Setelah selesai diselenggarakannya Pemilihan Umum, perhatian kabinet tertuju pada cara menyelesaikan masalah hubungan Indonesia dengan Belanda khususnya mengenai pembatalan perjanjian KMB. Usaha kabinet Harahap dalam hubungan ini memang dimulai dengan persiapan yang jauh lebih matang dibanding kabinet Ali I, maka dari itu kabinet ini berhasil menempatkan kedudukan Indonesia pada tempat yang lebih menguntungkan daripada sebelumnya. Delegasi yang dikirim ke Jenewa diketuai oleh Anak Agung Gde Agung. Tetapi sangat disayangkan, nampaknya Presiden kurang menghargai usaha kabinet. Karena tampaknya Presiden tidak sabar dengan perundingan yang dirasa berlam-lama. Tindakan Presiden juga diikuti dengan partai-partai yang biasanya pro pendapat Presiden. Hal ini terbukti dalam pidatonya di Palembang tanggal 7 Desember 1955, Presiden tampaknya mengecilkan arti usaha kabinet dengan mengatakan "tanpa persatuan revolusioner dengan segala diplomasi dan omong-omong di PBB sampai botak kita tidak akan mencapai hasil".

Beberapa hal diantara masalah yang menyangkut keputusan Perdana Menteri dalam perundingan ini, menyebabkan kembalinya perpecahan dalam lingkungan Masyumi serta partai-partai Islam sehingga permulaan yang menguntungkan bagi mereka pada saat kabinet mulai bekerja tidak dapat diteruskan. Perseturuan antara umat islam kembali terjadi yaitu antara NU,

PSII dengan Masyumi.¹⁸ Padahal kita tahu pada awal terbentuknya Kabinet Burhanuddin Harahap (Masyumi), NU sangat mendukung bahkan bersedia duduk dalam komposisi kabinet. Tetapi seiring berjalannya waktu hal ini berubah. Sehari sebelum pidato Presiden tanggal 7 Desember 1955 di Palembang, NU mengirim surat kepada Perdana Menteri Harahap. Isi surat itu pada intinya mengatakan bahwa NU tidak bersedia duduk dalam delegasi perundingan dengan Belanda baik sebagai anggota maupun penasihat. NU beralasan perundingan tidak akan mencapai hasil yang diharapkan. Sama halnya NU, PSII yang awalnya mendukung dan ikut duduk dalam komposisi kabinet juga berbalik arah memusuhi kabinet Harahap. PSII yang semula telah menunjuk Aruji Kartawinata untuk bersedia turut dalam delegasi namun partainya menunda keberangkatannya karena peristiwa Cililitan awalnya tetapi kemudian tidak setuju diadakannya perundingan.

Dalam tubuh Masyumi perpecahan itu ditandai dengan Kelompok Sukiman dan Kelompok Natsir yang kembali memperlihatkan hubungan yang tidak harmonis, seperti tercermin dalam berbagai pernyataannya.¹⁹ Pernyataan ini seakan-akan menambah keadaan politik semakin memanas. Suatu komentar yang bersifat provokatif, komentar ini dilontarkan oleh Sirajuddin Abbas dari Perti yang menanyakan mengapa Masyumi lebih suka bekerjasama dengan Parkindo dan Katolik daripada dengan NU dan PSII yang merupakan rekan seagama. Komentar Abbas disambut oleh Natsir, ia mengatakan bahwa tidak

¹⁸ Deliar Noer. *op.cit.*, hlm. 246.

¹⁹ *Ibid.*

sesederhana itu. Hal ini bukan masalah memilih kawan untuk bekerjasama, ia juga mengingatkan keputusan rapat-rapat antara partai pemerintah serta kabinet tanggal 13 Desember 1955 untuk mengakhiri perundingan dalam waktu yang singkat. Namun tentu tidak semudah itu, untuk mengakhiri perundingan perlu dilakukan dengan prosedur biasa dan tata tertib serta waktu yang menguntungkan Indonesia. Akibat yang terjadi untuk pemerintah yang akan datang juga harus diperhatikan. Ia juga mengingatkan bahwa tanggal 6 Januari rumusan akhir telah disusun di Jenewa yang perlu menunggu jawaban akhir dari pihak Belanda.

Perang pernyataan ini semakin memanas setelah Sukiman juga menyatakan keterangannya pada pers. Ia mengatakan bahwa sebaiknya perundingan ditunda dan persoalan ini dilanjutkan kepada pemerintah yang akan datang. Ia mengingatkan bahwa semula perundingan akan merupakan suatu "tragedi nasional" sambil menambahkan bahwa penarikan sokongan dari NU dan PSII hanya menambah perpecahan dalam lingkungan umat.²⁰ Sukiman mengemukakan bahwa perundingan Jenewa akan menyebabkan pengaruh tidak menguntungkan bagi kabinet berikutnya.

Melayani pernyataan Sukiman, Perdana Menteri Harahap juga memberi keterangannya pada pers. Ia mengatakan tindakan kabinetnya telah disetujui oleh partai, dan hasil perundingan Jenewa tidak akan menyebabkan kesulitan bagi partai-partai di masa yang akan datang serta bagi kabinet berikutnya. Tetapi sebaliknya, hasil perundingan akan membantu kabinet

²⁰ *Ibid*, hlm. 325.

berikut untuk seterusnya menyelesaikan masalah-masalah keuangan dan ekonomi secara lebih positif. Perdana Menteri Harahap telah mengirim instruksi kepada delegasi di Jenewa untuk ”menutup perundingan dengan pertemuan terakhir”. Ia menegaskan bahwa kabinet seluruhnya menyetujui kebijaksanaan delegasi, dan terserah kepada Belanda untuk menerima atau menolak hasil perundingan tanggal 6 Januari. Dalam periode ini pula Presiden Soekarno mulai campur tangan secara mendalam dalam pemerintahan serta partai.

Kabinet Burhanuddin Harahap dapat dilihat sebagai kabinet dengan tugas khusus, yaitu menyelenggarakan pemilihan umum. Dan tugas ini dapat dilaksanakan dengan baik. Tetapi, ia tidak ingin berhenti begitu pemilihan umum diselenggarakan karena ia juga masih ingin menyelesaikan masalah hubungan dengan Negeri Belanda. Oleh sebab itu, pada permulaan tahun 1956 setelah pemilihan umum diselenggarakan, perhatian kabinet ditujukan tentang cara pemutuserannya. Soal prestise tentu menyangkut di sini, seperti juga bagi tiap golongan yang berada dalam kedudukan yang sama. Dalam rangka ini perlu dicatat masuknya dua buah mosi tidak percaya oleh parlemen dalam permulaan 1956. Mosi ini diantaranya mosi Sutardjo Kartohadikusumo dari PIR Wongsonegoro yang diajukan pada tanggal 15 Februari 1956 dan Mosi A.A. Achsien dari NU yang diajukan pada tanggal 16 Februari 1956. Mosi Sutarjo menuntut Pemerintah untuk mengembalikan mandatnya kepada Presiden dalam tempo yang singkat sedangkan mosi Achsien menyatakan

tidak percaya pada politik Pemerintah.²¹ Soal seperti ini merupakan contoh pula tentang berbagai cara pembubaran kabinet, yang dibicarakan oleh partai-partai Masyumi, NU, dan PNI. Rapat untuk ini diadakan beberapa kali dengan maksud melicinkan jalan bagi pembentukan kabinet yang baru. PNI dalam rapat-rapat seperti itu mengusulkan agar kabinet mengembalikan mandatnya kepada Kepala Negara sehingga dapat dibentuk suatu kabinet kemudian, menanti pembentukan parlemen berdasarkan pemilihan umum. Masyumi menolak usul ini karena melihat bahwa usul ini tidak akan menyelesaikan masalah tetapi malah membuat masalah semakin rumit. Masyumi juga berpendapat bahwa tiap partai besar yang tiga itu (Masyumi, PNI, dan NU), apakah di dalam maupun di luar kabinet, bertanggung jawab untuk menciptakan harmoni antar partai.²² Tetapi sementara itu karena pertikaian tentang soal hubungan Indonesia dengan Negeri Belanda, PSII pada tanggal 18 Januari 1956, memutuskan untuk menarik Menterinya yaitu Harsono dan Sudibyo. Sehari setelah itu, tepatnya pada tanggal 19 Januari 1956 putusan PSII menarik Menteri-menterinya dari kabinet disampaikan kepada Perdana Menteri Harahap. Sedangkan NU dalam rapatnya tanggal 19 Januari 1956 memutuskan menarik menteri-menterinya yaitu Sunaryo dan Moh. Ilyas dari kabinet. Seperti PSII dan NU, Perti juga menyarankan agar Pemerintah menyerahkan mandat kepada Kepala Negara demi keutuhan bersama. Menghadapi pengunduran diri menteri-menteri dari PSII dan NU, dalam

²¹ P.N.H Simanjuntak. *op.cit.*, hlm. 158.

²² Deliar Noer. *op.cit.*, hlm. 247.

sidangnya tanggal 19 Januari 1956 kabinet memutuskan akan meneruskan Pemerintahannya dengan jalan mengadakan *reshuffle*.²³

Pembicaraan-pembicaraan dilakukan dengan intensif menjelang akhir Februari 1956 untuk mencairkan kembali kemacetan hubungan antara pemerintah dengan partai-partai oposisi terutama PNI, NU, dan PSII. Ketika itu NU dan PSII tidak lagi dalam kabinet. Seperti disebut diatas, yang dijadikan persoalan pokok adalah pembatalan persetujuan KMB serta cara membubarkan kabinet. Partai-partai pemerintah pada tanggal 26 Februari mencari legalisasi keputusan pemerintah untuk membatalkan persetujuan KMB, serta untuk mengakhiri masa tugasnya yaitu sesudah pengumuman nama-nama mereka yang terpilih sebagai anggota parlemen tanggal 2 Maret 1956. Dalam hal-hal ini pemerintah berpendapat dukungan seharusnya diberikan oleh semua partai termasuk oposisi. Tetapi pihak oposisi dalam pernyataannya tanggal 22 Februari mengemukakan bahwa pembatalan persetujuan KMB hendaknya dilakukan oleh kabinet baru, yaitu kabinet yang berdasar pemilihan umum.²⁴

Tanggal 1 Maret 1956, pimpinan pusat Masyumi mengeluarkan pernyataan bahwa Kabinet Harahap sudah jatuh tempo untuk mengembalikan mandatnya karena berdasarkan hasil pemilu sudah diketahui partai mana yang memenangkannya. Sehingga terdapat pegangan yang sah untuk Kepala Negara menunjuk formatur yang langsung membentuk Kabinet baru berdasarkan

²³Reshuffle adalah suatu peristiwa kenegaraan yang mana Kepala Pemerintahan mengganti komposisi menteri dalam kabinet.

²⁴ Deliar Noer. *op.cit.*, hlm. 248.

hasil-hasil pemilu. Akhirnya dalam sidangnya tanggal 2 Maret 1956 kabinet memutuskan untuk menyerahkan mandatnya kepada Kepala Negara pada tanggal 3 Maret 1956.

Ada hal menarik dalam permasalahan hubungan Indonesia-Belanda. Jika kita telusuri lebih dalam, terdapat campur tangan Presiden dalam hal ini yang nampaknya aneh. Tanda-tanda ikut campurnya Presiden itu terlihat saat Presiden enggan menandatangani kesepakatan antara pemerintah Belanda mengenai pembubaran yang RUUnya disusun oleh Kabinet Burhanuddin Harahap dan telah disahkan oleh parlemen. Padahal sejak masa kabinet Natsir, Soekarno bersikeras untuk segera membubarkan hasil-hasil KMB. Cara pembubaran itulah yang menimbulkan ketegangan antara Kabinet Natsir dengan Soekarno. Tetapi kini, ketika pembubaran hasil-hasil KMB itu sudah di depan mata, Soekarno justru mengelak untuk menandatanganinya. Undang-undang pembubaran hasil-hasil KMB itu baru ditandatangani Presiden, dengan perubahan-perubahan kecil di dalam redaksinya, sesudah kabinet Burhanuddin Harahap mengundurkan diri karena terpilihnya anggota parlemen hasil pemilihan umum. Rupanya Soekarno seperti tidak ingin jika Perdana Menteri Burhanuddin Harahap dari Masyumi menorehkan prestasinya dalam sejarah perjuangan negara ini.²⁵

²⁵ Anwar Harjono. *Perjalanan Politik Bangsa Menoleh ke Belakang Menatap Masa Depan*. Jakarta: Gema Insani Press. 1997, hlm. 127.

BAB V

BERAKHIRNYA PEMERINTAHAN KABINET BURHANUDDIN HARAHAP

Kabinet Burhanuddin Harahap selama periode pemerintahannya telah banyak melakukan kebijakan-kebijakan dalam mengatasi permasalahan yang ada pada saat itu. Program kerja yang dilaksanakan pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap secara tidak langsung juga membawa kemajuan yang pesat dalam beberapa bidang bagi Indonesia. Seperti halnya kabinet-kabinet sebelumnya, sepak terjang pemerintahan kabinet ini tidak berjalan semulus yang dibayangkan. Terdapat beberapa hal yang membuat kabinet ini berakhir dan digantikan oleh kabinet baru. Untuk memperdalam pengetahuan tentang berakhirnya Kabinet Burhanuddin Harahap, maka akan diuraikan sebab-sebab jatuhnya Kabinet Burhanuddin Harahap dan Pembentukan kabinet baru.

A. Jatuhnya Kabinet Burhanuddin Harahap

Sejak awal terbentuknya kabinet ini sudah mendapat tugas khusus yang harus dilakukan yaitu mengembalikan kewibawaan moril Pemerintah, termasuk kepercayaan AD dan masyarakat kepada Pemerintah. Karena seperti yang kita ketahui Kabinet Ali I jatuh karena peristiwa Angkatan Darat 27 Juni 1955. Selain itu banyaknya aparatur pemerintah yang melakukan korupsi juga menambah rentetan kewibawaan Pemerintah jatuh dimata Angkatan Darat dan masyarakat. Tetapi dalam menghadapi masalah ini, Kabinet Burhanuddin Harahap berhasil mengatasi masalah Angkatan Darat dan korupsi yang merajalela. Dalam menyelesaikan masalah Angkatan Darat, Kabinet Burhanuddin Harahap mengangkat kembali A.H. Nasution yang dibebastugaskan sebagai KSAD pada

masa Kabinet Wilopo. Pengangkatan Nasution didukung oleh Presiden dan Pimpinan TNI. Sedangkan korupsi, Kabinet Burhanuddin Harahap mengatasinya dengan cara mengadakan kampanye korupsi dan menindak tegas siapapun tanpa pandang bulu jika ia terbukti terlibat korupsi bahkan menyeretnya ke tahanan. Keberhasilan Kabinet Burhanuddin Harahap dalam mengatasi kedua masalah tersebut dapat dikatakan berhasil. Kabinet Burhanuddin Harahap berhasil mendapat simpati dan dukungan dari kalangan Angkatan Darat serta masyarakat. Pada masa ini hubungan antara Angkatan Darat dengan Pemerintah juga terjalin dengan baik.

Namun sangat disayangkan, setelah berhasil mengembalikan disiplin dalam Angkatan Darat timbul masalah baru dalam Angkatan Udara. Semasa Kabinet Ali I, ketidaksenangan yang timbul dalam Angkatan Udara dipertajam dengan Menteri Pertahanan Iwa Kusumasumantri. Untuk mengurangi ketidaksenangan tersebut, Kabinet Burhanuddin mengangkat Komodor Muda Udara Hubertus Sujono sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Udara. Tetapi upacara pelantikan di Pangkalan Udara Cililitan (Halim Perdanakusuma sekarang) pada tanggal 14 Desember 1955, yang tidak dihadiri oleh Surjadarma, digagalkan oleh beberapa anggota yang membangkang dengan menimbulkan insiden berupa antara lain pemukulan Komodor Sujono oleh beberapa orang bawahan serta perebutan pataka angkatan.¹ Menteri Pertahanan yang tidak lain adalah Perdana Menteri Harahap sendiri segera mengambil tindakan keras terhadap mereka yang membangkang, termasuk pada KSAU Surjadarma sendiri yang terlibat dalam

¹ A.B. Lopian. *Terminologi Sejarah 1945-1949 & 1950-1959*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1996, hlm. 242.

masalah ini. Selain KSAU, seorang sersan Angkatan Udara yang melakukan tindakan pengacauan pada upacara di Cililitan itu telah ditahan. Wakil Presiden Moh. Hatta sendiri menyetujui langkah Menteri Pertahanan Harahap tersebut dalam menyelesaikan Peristiwa Cililitan. Namun, Sujadarma yang dikenai tahanan rumah segera dibebaskan atas campur tangan Presiden.²Kabinet sendiri berbeda pendapat dalam mencari penyelesaiannya. Akhirnya, kabinet menyetujui untuk menyerahkan penyelesaian ini kepada Gabungan Kepala Staf serta Jaksa Agung. Tetapi bulan Januari 1956, Sersan Kalebos yang termasuk terlibat dalam insiden tersebut dikeluarkan dari tahanan. Kemudian tidak terdengar kabar lagi tentang penyelesaian ini. Para perwira yang diangkat semula terus saja tidak diangkat.

Sementara itu sesuai dengan programnya yang kedua, Kabinet Burhanuddin Harahap pun berhasil melaksanakannya. Pada tanggal 29 September 1955 diselenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih Konstituante (Badan Pembuat Undang-Undang Dasar). Adapun empat partai muncul sebagai pemenang yakni Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, Nahdatul Ulama (NU), dan PKI sebagai partai besar merupakan suatu hal yang sebelumnya tidak terduga. Meleset dari yang diharapkan, ternyata jumlah partai tidak berkurang namun bertambah dengan adanya pemilihan ini. Pemilihan umum pertama di Indonesia ini, pelaksanaannya baik. Pemilu sendiri berjalan secara demokratis, bebas dari segala bentuk ancaman serta rahasia. Untuk sekelas bangsa

² Moedjanto. *Indonesia Abad 20 jilid II*. Yogyakarta: Kanisius.1992, hlm. 94.

Indonesia yang kala itu belum maju, pelaksanaan pemilu ini sungguh mengesankan.

Setelah pemilihan umum diselenggarakan, perhatian Kabinet ditujukan tentang cara menyelesaikan masalah hubungan Indonesia dengan Belanda, khususnya mengenai pembatalan perjanjian KMB. Dalam perjuangan menghadapi Belanda Kabinet Burhanuddin Harahap tidak berhasil pula. Perundingan Menteri Luar Negeri Anak Agung Gde Agung di Jenewa Desember 1955-Februari 1956 tidak berhasil membujuk Belanda untuk membatalkan Uni dengan ketentuan-ketentuan persetujuan ekonomi keuangan yang berarti, apalagi Irian Barat. Berbagai partai bahkan Presiden Soekarno sendiri tidak mendukung perundingan itu karena toh tidak akan membawa hasil. Beberapa hal diantara masalah yang menyangkut keputusan Perdana Menteri dalam perundingan ini, menyebabkan kembalinya perpecahan dalam lingkungan Masyumi serta partai-partai Islam sehingga permulaan yang menguntungkan bagi mereka pada saat kabinet mulai bekerja tidak dapat diteruskan. Perseturuan antara umat islam kembali terjadi yaitu antara NU, PSII dan Masyumi. NU dan PSII bahkan menarik menteri-menterinya. Sedangkan dalam tubuh Masyumi sendiri perpecahan itu ditandai dengan Kelompok Sukiman dan Kelompok Natsir yang kembali memperlihatkan hubungan yang tidak harmonis, seperti tercermin dalam berbagai pernyataan yang kedua kubu itu lontarkan. Meskipun tidak mendapat dukungan dari Presiden Soekarno, kabinet mempunyai keberanian untuk membubarkan Uni Indonesia Belanda secara unilateral (sepihak) pada tanggal 13 Februari 1956 dan akan mengadakan tindakan lebih lanjut berhubungan dengan persetujuan KMB.

Parlemen, tanpa PNI dan PSII menerima Undang-undang Pembatalan Uni.³ Tetapi kabinet terpukul oleh ketidaksediaan Presiden menandatangani Undang-undang itu dengan alasan bahwa pembatalan persetujuan KMB hendaklah menyeluruh dan menanti kabinet yang didukung oleh parlemen hasil pemilu.

Setelah hasil pemungutan suara diumumkan dan pembagian kursi di DPR diumumkan pada tanggal 2 Maret 1956, pada tanggal yang sama dalam sidangnya kabinet Burhanuddin Harahap memutuskan untuk menyerahkan mandatnya kepada Kepala Negara tanggal 3 Maret 1956. Tanggal 3 Maret 1956, penyerahan mandat oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap pun diterima Presiden Soekarno, dan Kabinet dinyatakan demisioner. Namun kabinet Harahap masih melaksanakan tugasnya seperti biasa sampai terbentuknya Kabinet baru.

Jadi kabinet ini sebenarnya hampir sama dengan kabinet-kabinet lain, berakhir karena terdapat keretakan dalam tubuh kabinet sendiri. Walau dikatakan berhasil di dalam melaksanakan tugas khususnya, namun akhirnya meletakkan jabatannya juga setelah Parlemen hasil pemilu dilantik. Kabinet ini kehilangan prestige-nya ketika usahanya mengontrol Angkatan Udara gagal, tidak adanya restu dari Presiden Soekarno, dan gagalnya menyelesaikan masalah-masalah hubungan Indonesia-Belanda. Dengan demikian, Kabinet Harahap hanya bertahan selama hampir 7 bulan sebelum demisioner.

B. Pembentukan Kabinet Ali Sastroamidjoyo II

Setelah Kabinet Burhanuddin Harahap menyerahkan mandatnya kepada Presiden tanggal 3 Maret 1956, Kabinet ini dinyatakan demisioner. Namun

³ *Ibid.*

kabinet Harahap masih melaksanakan tugasnya seperti biasa sampai terbentuknya Kabinet baru. Untuk membentuk kabinet baru, Presiden mulai mengadakan *hearing* dengan partai-partai politik hasil pemilu 1955. *Hearing* pertama diadakan pada tanggal 6 Maret 1956, Presiden Soekarno mengadakan *hearing* dengan PNI, NU, Masyumi, PKI dan PSII.⁴ Keesokan harinya pada tanggal 7 Maret 1956, Presiden Soekarno mengadakan *hearing* dengan Parkindo, Partai Katolik, PSI, Perti, dan IPKI. Setelah mendengar pendapat dari partai-partai politik tersebut, maka akhirnya Presiden Soekarno pada tanggal 8 Maret 1956 memutuskan untuk menunjuk Ali Sastroamidjoyo dari PNI sebagai formatur kabinet dengan tugas untuk “membentuk kabinet yang mendapat dukungan yang luas” dengan diberi waktu seminggu yaitu sampai 16 Maret 1956. Alasan yang dijadikan Presiden untuk mengangkat formatur dari PNI karena dalam Pemilu 1955, PNI mendapat kelebihan suara di atas jumlah suara yang diperoleh Masyumi.⁵

Pada tanggal 9 Maret 1956, dengan didampingi oleh Mr. Wilopo (PNI), formatur Ali Sastroamidjoyo mulai mengadakan *hearing* dengan wakil-wakil partai. Dalam *hearing* ini, formatur hanya mengadakan perundingan dengan partai yang sedikit-sedikitnya mempunyai 4 kursi di Parlemen. Formatur tidak menemui kesulitan-kesulitan yang prinsipil mengenai program Kabinet. Karena pada prinsipnya partai-partai yang diajak *hearing* itu dapat mendukung konsepsi program yang diajukan formatur. Mengenai komposisi kabinet mulailah timbul

⁴ Merdeka, 7 Maret 1956, hlm. 1.

⁵ P.N.H Simanjuntak. *Kabinet-kabinet Indonesia dari Awal Kemerdekaan sampai Reformasi*. Jakarta: Djambatan. 2003, hlm. 160.

persoalan-persoalan. Dewan Pimpinan Pusat PNI berpendapat bahwa yang paling baik adalah suatu Kabinet koalisi antara golongan nasionalis dan golongan Islam, jadi tegasnya adalah PNI, Masyumi dan NU. Koalisi ini menurut PNI akan membawa kestabilan politik dalam negeri, namun PNI menolak berkoalisi dengan PKI.⁶ Sedangkan antara PNI, NU dan Masyumi tidak ada kesulitan yang prinsipil baik mengenai pembagian Kementerian maupun personalianya. Sesuai dengan pendirian PNI, Masyumi menolak tegas berkoalisi dengan PKI bahkan tidak hanya orang PKI saja tetapi orang yang dianggapnya sebagai simpatisan atau berbau komunis. Selain berunding dengan wakil-wakil partai yang di hearing, formatur juga perlu mendengarkan pendapat dari Kepala-kepala Staf ketiga Angkatan (Angkatan Darat, Laut dan Udara). Tetapi sesuai pendirian pemimpin-pemimpin Angkatan Bersenjata, mereka tidak mau terlibat diri dalam urusan politik dan menyerahkan penyelesaian pembentukan Kabinet kepada formatur bahkan soal siapa yang akan menjabat sebagai Menteri Pertahanan.⁷ Untuk lebih memperkuat kedudukan Pemerintah, diikutsertakan pula partai-partai kecil seperti PSII, Perti, Partai Katolik, Parkindo dan IPKI yang bersama-sama menguasai 30 suara di DPR. Namun PSI tidak diikutsertakan. Dengan demikian, maka Kabinet nantinya akan mendapat dukungan 189 suara dalam DPR.

Sesuai dengan batas waktu yang diberikan oleh Kepala Negara kepada formatur, maka pada tanggal 16 Maret 1956 formatur Ali Sastroamidjoyo menyampaikan susunan Kabinet baru kepada Presiden. Setelah bertemu dengan

⁶ Moedjanto. *op.cit.*, hlm. 96.

⁷ P.N.H Simanjuntak. *op.cit.*, hlm. 161.

formatur, Presiden kepada pers bahwa ia belum bersedia menerima susunan Kabinet tersebut karena masih hendak mendapatkan keterangan lebih lanjut mengenai beberapa nama yang kurang familiar. Belum diterimanya susunan Kabinet oleh Presiden membuat banyak pihak bertanya-tanya ada apa gerangan. Namun sebenarnya alasan Presiden Soekarno adalah ia merasa kecewa dengan tidak diikutsertakannya PKI dalam Kabinet padahal PKI termasuk salah satu partai empat besar dalam pemilu.⁸ Tetapi kekecewaan Presiden tidak berpengaruh pada formatur, formatur tidak bisa menerima kehendak Presiden. Karena apa yang telah dicapainya itu merupakan hasil dari persetujuan partai-partai yang akan berkoalisi. Oleh karena itu, susunan Kabinet baru itu sudah menjadi milik bersama partai-partai tersebut dan tidak dapat dirubah lagi.

Selama kurang lebih seminggu, Presiden Soekarno berusaha keras untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam susunan Kabinet yang diajukan formatur, dengan jalan mengundang tokoh-tokoh Masyumi dan NU seperti Dr. Sukiman dan K.H. Idham Chalid ke Istana merdeka. Kepada tokoh-tokoh ini, Presiden mendesakkan kehendaknya agar mau menerima wakil-wakil dari PKI untuk ikut duduk dalam komposisi kabinet setidaknya "simpatisannya". Tokoh-tokoh dari PNI dan PSII seperti Suwiryo dan Arudji Kartawinata pun mendapat tekanan yang sama dari Presiden.⁹ Tetapi rupanya usaha Presiden Soekarno dalam mengadakan perubahan-perubahan dalam susunan kabinet baru itu gagal.

⁸ Merdeka, 17 Maret 1956, hlm. 2.

⁹ P.N.H Simanjuntak. *op.cit.*, hlm. 162.

Setelah usahanya gagal, maka pada tanggal 20 Maret 1956, akhirnya Presiden menyetujui susunan Kabinet baru yang telah diajukan formatur Ali Sastroamidjoyo tersebut tanpa adanya perubahan.¹⁰ Namun, Presiden tetap saja tidak puas dengan susunan kabinet tersebut. Kabinet Ali Sastroamidjoyo kedua ini terdiri dari 2 orang Wakil Perdana Menteri, 16 Kementerian, 3 Menteri Negara, dan 3 Menteri Muda. Tanggal 24 Maret 1956, Kabinet baru pimpinan Perdana Menteri Ali Sastroamidjoyo pun dilantik oleh Presiden Soekarno yang berdasarkan Kepres RI No. 85 Tahun 1956. Kabinet mulai bekerja setelah diadakan timbang terima antara kabinet lama dengan kabinet baru. Dalam Kabinet Ali Sastroamidjoyo II ini, PKI, PSI dan partai-partai kecil lainnya di DPR menjadi oposisi. Adapun partai politik yang diikutsertakan dalam kabinet ini yaitu PNI (6 menteri), Masyumi dan NU masing-masing 5 menteri, PSII, Parkindo, PKRI (masing-masing 2 Menteri) dan IPKI, Perti (masing-masing 1 menteri) serta seorang menteri yang tidak perpartai. Dalam kabinet ini, juga terdapat tiga menteri yang berasal dari Kabinet Burhanuddin Harahap yaitu Mr. Sunaryo, K.H. Muh. Ilyas dan Sudibyo.

¹⁰ Deliar Noer. *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*. Jakarta: Grafiti Press. 1987, hlm. 251.

BAB VI

KESIMPULAN

Burhanuddin Harahap dilahirkan pada tanggal 12 Februari 1917 di Medan Sumatera Utara. Burhanuddin Harahap merupakan putra dari pasangan suami istri Muhammad Yunus dan Siti Nurfiah. Burhanuddin Harahap aktif dalam beberapa organisasi pemuda dan organisasi politik yang membawanya ke kursi Perdana Menteri pada kabinetnya sendiri. Terpilihnya Burhanuddin Harahap sebagai perdana menteri tidak lepas dari jatuhnya kabinet Ali Sastroamidjoyo I yang dikarenakan Peristiwa Angkatan Darat 27 Juni 1955. Setelah itu Wakil Presiden Moh.Hatta menunjuk 3 orang formatur untuk membentuk Kabinet Baru, yaitu Sukiman (Masyumi), Wilopo (PNI), dan Assaat (Non Partai). Namun ketiga formatur ini gagal melaksanakan tugasnya. Akhirnya Wakil Presiden Moh.Hatta melimpahkan tugas tersebut kepada Burhanuddin Harahap dan menunjuknya sebagai formatur yang baru.

Kabinet Burhanuddin harahap merupakan kabinet koalisi yang terdiri dari beberapa partai dan hampir merupakan kabinet Nasional, karena jumlah partai yang tergabung dalam koalisi kabinet ini semua berjumlah 13 partai. Kabinet ini juga sering disebut kabinet koalisi, hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa partai yang tidak duduk dalam kabinet seperti PNI dan beberapa partai lainnya. Program Kabinet Burhanuddin Harahap terdiri dari tujuh poin yaitu: (1) Mengembalikan kewibawaan (Gezag) moril pemerintah, i.c. kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada Pemerintah, (2) Melaksanakan Pemilihan Umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan menyegerakan terbentuknya

Parlemen yang baru, (3) Menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi sedapat-dapatnya dalam tahun 1955 ini juga, (4) Menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi, (5) Memberantas korupsi, (6) Meneruskan perjuangan mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia, (7) Memperkembangkan politik kerjasama Asia-Afrika, berdasarkan politik bebas dan aktif menuju perdamaian. Program kerja yang diajukan Kabinet ini tidak jauh berbeda dari kabinet sebelumnya, meskipun demikian pelaksanaannya mengandung pengertian yang luas. Burhanuddin Harahap diwajibkan mengembalikan kewibawaan atau gezag moril Pemerintah i.c. kepercayaan Angkatan Darat dan Masyarakat kepada Pemerintah serta melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan menyelenggarakan terbentuknya Parlemen baru.

Program Kerja yang diajukan Kabinet Burhanuddin Harahap hampir semua terealisasi dengan baik meskipun didalamnya masih ada kekurangan-kekurangan. Kabinet Burhanuddin Harahap telah berhasil mengembalikan wibawa pemerintah terhadap Angkatan Darat dan masyarakat, berhasil mengatasi korupsi, mengadakan perbaikan ekonomi, serta berhasil menyelenggarakan pemilihan umum. Kegagalan ditemui ketika usahanya gagal untuk mengontrol Angkatan Udara, juga tidak adanya restu dari Presiden Soekarno, dan gagalnya menyelesaikan permasalahan hubungan Indonesia Belanda yang memang menjadi masalah utama dari kabinet-kabinet sebelumnya.

Pada masa pemerintahan Burhanuddin Harahap terdapat peristiwa-peristiwa yang mewarnai kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia.

Kewibawaan Pemerintah yang sempat jatuh karena peristiwa 27 Juni 1955 dan korupsi yang merajalela mendorong pemerintah untuk memperbaiki citra pemerintah dihadapan Angkatan Darat dan masyarakat. Segala upaya dilakukan Burhanuddin Harahap, ia mengangkat kembali A.H Nasution sebagai KSAD dan memberantas korupsi yang merugikan negara serta menimbulkan perekonomian Indonesia carut marut itu. Burhanuddin menindak tegas bahkan menjebloskan mereka yang terbukti bersalah ke dalam tahanan.

Pelaksanaan pemilihan umum juga berjalan secara aman, tertib dan demokratis. Masyarakat yang ketika kampanye terpecah belah sesuai dengan garis kepartaian, ketika hari H pergi ke kotak-kotak suara dengan tertib dan disiplin. Sungguh suatu yang tidak terduga. Setelah pemilihan umum diselenggarakan, dan dalam hubungan Indonesia Belanda, kabinet berhasil menempatkan kedudukan Indonesia pada tempat yang lebih menguntungkan daripada sebelumnya. Beberapa diantara masalah itu menyebabkan kembalinya perpecahan dalam lingkungan Masyumi serta antara partai-partai Islam sehingga permulaan yang sangat menguntungkan bagi mereka jika kabinet yang mulai bekerja ini tidak dapat diteruskan. Kelompok Sukiman dengan kelompok Natsir memperlihatkan kembali hubungan yang tidak harmonis. Pertikaian antara partai Islam, terutama Masyumi dan partai-partai Islam lain bersangkutan pula dengan soal hubungan Indonesia Belanda. Dalam periode ini Presiden Soekarno mulai campur tangan.

Setelah hasil pemungutan suara diumumkan dan pembagian kursi di DPR diumumkan pada tanggal 2 Maret 1956, pada tanggal yang sama dalam sidangnya kabinet Burhanuddin Harahap memutuskan untuk menyerahkan mandatnya

kepada Kepala Negara tanggal 3 Maret 1956. Tanggal 3 Maret 1956, penyerahan mandat oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap pun diterima Presiden Soekarno, dan Kabinet dinyatakan demisioner. Namun kabinet Harahap masih melaksanakan tugasnya seperti biasa sampai terbentuknya Kabinet baru yaitu kabinet Ali Sastroamidjoyo II. Dengan demikian, Kabinet Harahap hanya bertahan selama hampir 7 bulan sebelum demisioner

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

- ANRI. *Kabinet Perdana Menteri Republik Indonesia No. 1648 Tahun 1956.*
- ANRI. *Kabinet Presiden Republik Indonesia No. 1396 Tahun 1955.*
- ANRI. *Kabinet Perdana Menteri Republik Indonesia No. 2234 Tahun 1955.*
- ANRI. *Kabinet Perdana Menteri Republik Indonesia No. 2230 Tahun 1955.*
- ANRI. *Kabinet Perdana Menteri Republik Indonesia No. 2228 Tahun 1955.*
- ANRI. *Kabinet Perdana Menteri Republik Indonesia No. 2222 Tahun 1955.*
- ANRI. *Kabinet Perdana Menteri Republik Indonesia No. 2219 Tahun 1955.*

Buku

- Abdul Haris Nasution. (2013) *Peristiwa 17 Oktober 1952 : Ketika “Moncong” Meriam Mengarah ke Istana Merdeka.* Yogyakarta : Narasi.
- Abdullah. (1996). *Langkah Merah : Gerakan PKI 1950-1955.* Yogyakarta : Bentang .
- Ali Sastroamidjoyo. (1954). *Pendapat Pemerintah terhadap Mosi Mr. Jusuf Wibisono.* Jakarta: Kementerian Penerangan RI.
- _____. (1954). *Tonggak-tonggak perjalananku.* Jakarta: Kinta.
- Anwar Harjono. 1997. *Perjalanan Politik Bangsa.* Jakarta: Gema Insani Press.
- Arsip Nasional Republik Indonesia. (2004). Jakarta: Proyek dan Diseminasi Kearsipan Nasional.
- Bibit Suprpto. (1985) *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia.* Jakarta: Ghalia Indonesia.
- .
Dadang Supardan. 2011. *Pengantar Ilmu Sosisal : Sebuah kajian pendekatan structural.* Jakarta : Bumi Aksara.
- Daliman. (2006) *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi.* Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Sejarah FISE UNY.

- _____. (2012) *Metode Penelitian Sejarah*, Yogyakarta : Penerbit Ombak.
- Deliar Noer. (1987). *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*. Jakarta: Grafity Press.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2000). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Departemen Penerangan.((1970). *Susunan dan Program Kabinet Republik Indonesia selama 25 Tahun*. Jakarta : Pradnja Paramita.
- Feith Herbert. (2009). *The Wilopo Cabinet 1952-1953 : A Turning Point in Post-Revolutionary Indonesia*. New York: Cornel University Press.
- Helius Sjamsuddin. (2007) *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- I Gde Widja. (1989) *Sejarah Lokal dan Perspektif dalam Pengajaran Sejarah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kardiyat Wiharyanto, A. (2011) *Sejarah Indonesia : Dari Proklamasi Sampai Pemilu 2009*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Kementerian Penerangan Republik Indonesia.(1955). *Keterangan dan Jawaban Pemerintah atas Program Kabinet Burhanuddin Haarahap*. Jakarta:Kementerian Penerangan.
- _____.(1956). *Kabinet RI ke XV: Kabinet Burhanuddin Harahap*. Jakarta: Kementerian Penerangan.
- Kuntowidjoyo. (1994) *Metodologi Sejarah*. Jakarta: Tiara Wacana.
- _____. (2001) *Pengantar Ilmu Sejarah (cet. IV)*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Lapian, A.B dkk. (1996) *Terminologi Sejarah 1945-1949 & 1950-1959*. Jakarta: Proyek Inventaris dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat SEjarah dan Nilai TRadisi Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Marbun, B.N. (2003). *Kamus Politik*. Jakarta: pustaka sinar harapan
- Marwati Djoenet Pusponogoro dan Nugroho Notosusanto. (1984) *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Moedjanto , G. (1992) *Indonesia abad 20 jilid II*. Yogyakarta: Kanisius.
- Nasution. (2011). *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara

- Pusat Sejarah Militer Angkatan Darat. (1965). *Sejarah TNI Angkatan Darat 1945-1965*. Bandung: Pussemad.
- Redaksi Great Publisier. (2009). *Buku Pintar Politik: Sejarah, Pemerintahan, dan Ketatanegaraan*. Yogyakarta: GalangPress.
- Saefur Rochmat. (2009). *Ilmu Sejarah dalam Perspektif Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sartono Kartodirdjo. (1993). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia.
- Simanjutak, P.N.H. (2003) *Kabinet-Kabinet Indonesia dari Awal Kemerdekaan sampai Reformasi*, Jakarta : Djambatan.
- Sunarso, dkk. (2006) *Pendidikan Kewarganegaraan : PKN untuk Perguruan Tinggi Negeri*. Yogyakarta: UNY PRESS.
- Suwanta. (2000) *Keberanian Untuk Takut: Tiga Tokoh Masyumi dalam Drama PRRI*. Yogyakarta: Avyrouz.
- Wilopo S. H. (1976) *Zaman Pemerintahan Partai-Partai dan Kelemahan-Kelemahannya*. Jakarta :Yayasan Idayu.
- Yahya A. Muhaimin. (2002) *Perkembangan Militer Dalam Politik di Indonesia 1945-1966*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Zulkarnain. (2012) *Jalan Meneguhkan Negara: Sejarah Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta : Pujangga Press.

Majalah/jurnal

- Rhoma Dwi Aria Yuliantri. (2011) “Catatan Singkat Soekiman: Sepuluh Bulan Menjadi Perdana Menteri”. *Basis*. No. 03-04. tahun ke-60.
- Baskara T. Wardaya. (2004). “Membuka Kotak Pandora Pemilu 1955”. *Basis*. No. 03-04. Tahun ke-53

Skripsi

- Lusia Iskandari. 2004. *Indonesia Pada Masa Pemerintahan Kabinet Ali I (1953-1955)*. FIS UNY
- Wawan Riyadi. 2004. *Hubungan Sipil Militer Selama Demokrasi Parlementer Tahun 1950-1959*. FIB UGM.

Syella Joe Deshita. 2014. Program Kerja Pemerintahan Kabinet Wilopo 1952-1953. FIS UNY

Surat Kabar

Merdeka, tanggal 27 Juli dan 1, 2, 12 agustus tahun 1955

Merdeka, tanggal 19,20 Januari, 23 Februari, 7 Maret, 17 Maret 1956

Merdeka tanggal 29 Oktober, 8 November tahun 1955

Abadi tanggal 1 agustus, 22 agustus, 23 oktober, 13 Desember 1955

Abadi 24 Januari 1956, 8 Februari tahun 1956

Lampiran. 1 Foto Burhanuddin Harahap



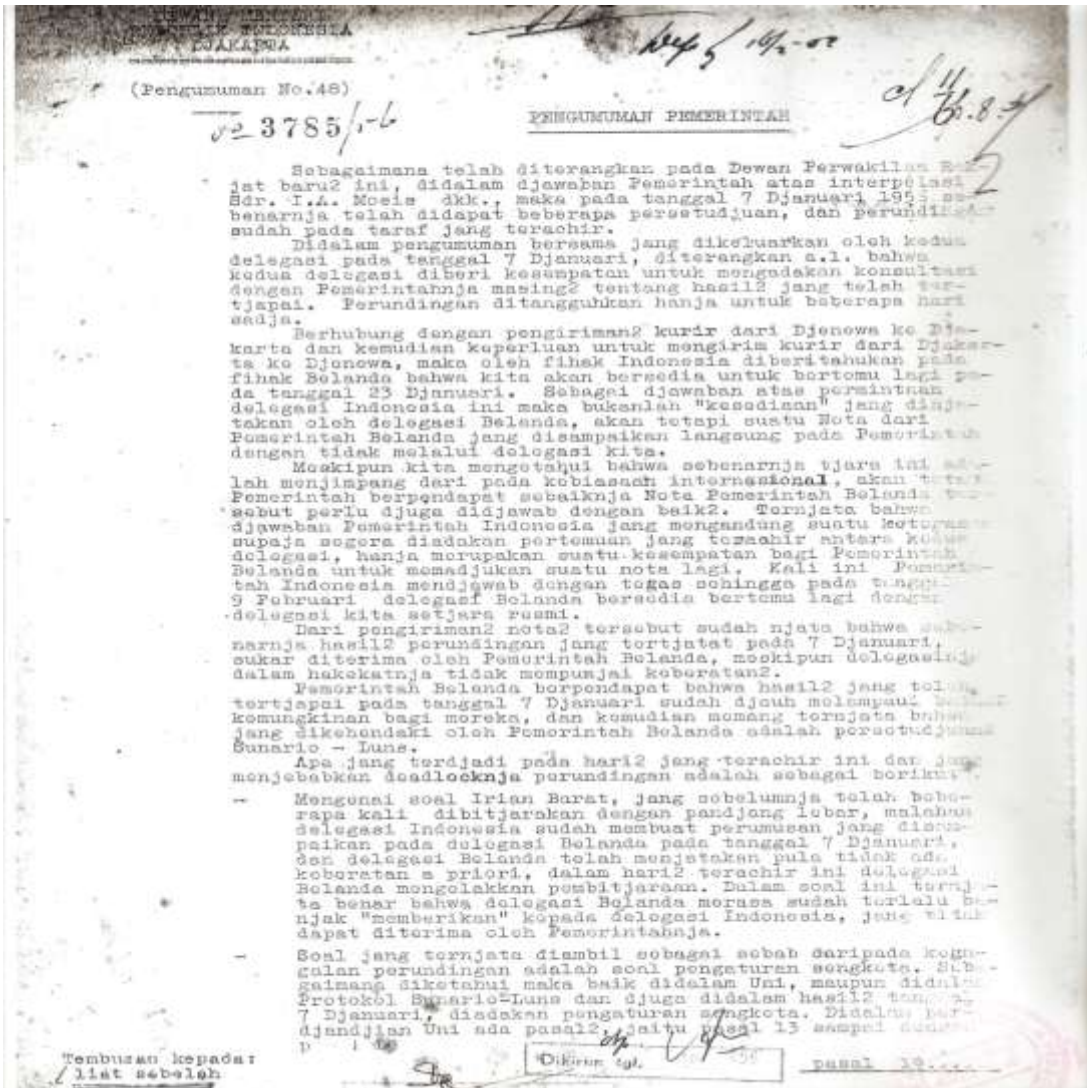
Sumber: <http://wwinfonusantara.blogspot.com/2010/07/burhanuddin-harahap.html>
diakses pada Rabu, 24 September 2014 pukul 16.12 WIB

Lampiran.2 Kabinet Burhanuddin Harahap



Sumber: http://kepuustakaan-presiden.pnri.go.id/uploaded_files/jpg/photo/normal/SUKARNO_WIR_0021.jpg
diakses pada Rabu, 24 September 2014 pukul 16.15 WIB

**Lampiran. 3 Kabinet Perdana Menteri Republik Indonesia No. 1648 Tahun
1956**



pasal 19, yang mengatur arbitrase; "Union Court of Arbitration" didirikan menurut ketentuan dalam pasal 2 ini.

Pasal 6 daripada Protokol Sunario-Luna menerangkan hal-hal "dalam hal itu (sengketa) mereka hanya akan mempergunakan alat penyelesaian dengan jalan damai, seperti termaktub dalam piagam P.B.B. Dikalaupun ternyata tidak mungkin menyelesaikan sesuatu pertikaian hukum dengan menempuh jalan diplomatik dalam waktu yang layak, maka pertikaian itu dengan persetujuan kedua belah pihak dapat dihadapkan dibawah perwasitan dengan maksud kompromi. Dikalaupun kedua belah pihak dalam waktu yang layak tidak mendapat persetujuan tentang menghidupkan pertikaian itu dibawah perwasitan tentang ketentuan kompromi atau perihal menunduk wasit, maka pihak ingin berontak akan berhak memajukan perkara itu dengan surat permohonan, dihadapan Mahkamah Internasional, sebelum sesudah memberi hukan kepada pihak lain.

Hasil2 pada tanggal 7 Januari juga memuat pengumuman sengketa. Karena dalam hari2 ini ternyata bahwa pengantar sengketa yang diusulkan oleh delegasi kita tidak dapat diterima oleh delegasi Belanda atau karena sudah nampak pada delegasi kita bahwa hal ini akan dipakai oleh delegasi Belanda untuk menggagalkan perundingan, maka delegasi kita memajukan sekali lagi usul mengenai hal ini.

Usulanja adalah sebagai berikut : "sambil menunggu adanya pengatur sengketa yang tetap, maka kalau timbul sengketa atas permintaan salah satu pihak, sengketa ini dapat diselesaikan pada sebuah komisi yang didirikan atas dasar pariter, untuk menyelesaikan sengketa2, menurut pokok2 yang mungkin kini lasim dipakai didalam hal penyelesaian sengketa2 oleh bekas2 peserta2 dari Uni yang dibubarkan. Kalau satu pihak memajukan permintaan, maka Komisi itu didirikan didalam waktu dua bulan".

Pun usul delegasi kita ini tidak dapat diterima oleh delegasi dan Pemerintah Belanda.

Ternyata bahwa delegasi kita sudah berkali-kali berusah mendekati pendirian pihak Belanda dan siapapun dijam sengketa dapat menjaksikan bahwa kita selalu bersedia menerima dan mentjari penyelesaian yang rationeel. Penolakan usul yang terakhir mengenai pengaturan sengketa ini oleh pihak Pemerintah Belanda didalam hakikatnja berarti bahwa Pemerintah Belanda menolak Protokol Penghapusan Pinoo, karena sengketa2 yang akan timbul dikemudian hari kebanyakan dan dengan sendirinya akan mengenai soal2 Keuangan dan Ekonomi.

Setelah ternyata bagi delegasi kita bahwa Pemerintah Belanda tidak dapat menerima usul terakhir dari delegasi Indonesia itu, maka delegasi kita telah yakin bahwa sedikit dikitnja didalam dua hal maka delegasi Belanda sudah sudah daripada hasil2 tanggal 7 Januari, yaitu a) soal Irian Barat, dan b) soal pengaturan sengketa yang dalam kata2 lain sama artinya dengan menolak Pinoo, hal2 mana pada tanggal 7 Januari sudah disetujui atau "tidak ada keberatan".

Disebalik benar bahwa perundingan yang telah berdjalan begitu lama, diperpanjang, malahan pada suatu saat telah dapat memberi harapan akan terbentuknja hubungan2 yang normal antara Nederland dan Indonesia, sebagaimana antara dua negara lainnya, pada ahirnja toh harus gagal diakibatkan sikap Pemerintah Belanda yang tidak menunjukkan kemauan baik untuk mentjapai persetujuan.

Berhubung dengan kegagalan perundingan ini, maka Komisi dalam sidangnja pada hari Senin tanggal 13 Februari 1956 telah meninjau kelanjutan daripada kegagalan itu dan mengundikan keputusan sebagai berikut :

1. membubarkan UNI Indonesia - Belanda,
2. meninjau tindakan2 selanjutnja mengenai persetujuan lainnja dari K.M.B.,

3. membubarkan

W 3 -

- 3. memberikan keterangan kepada D.P.R. tentang keputusan2 ini.

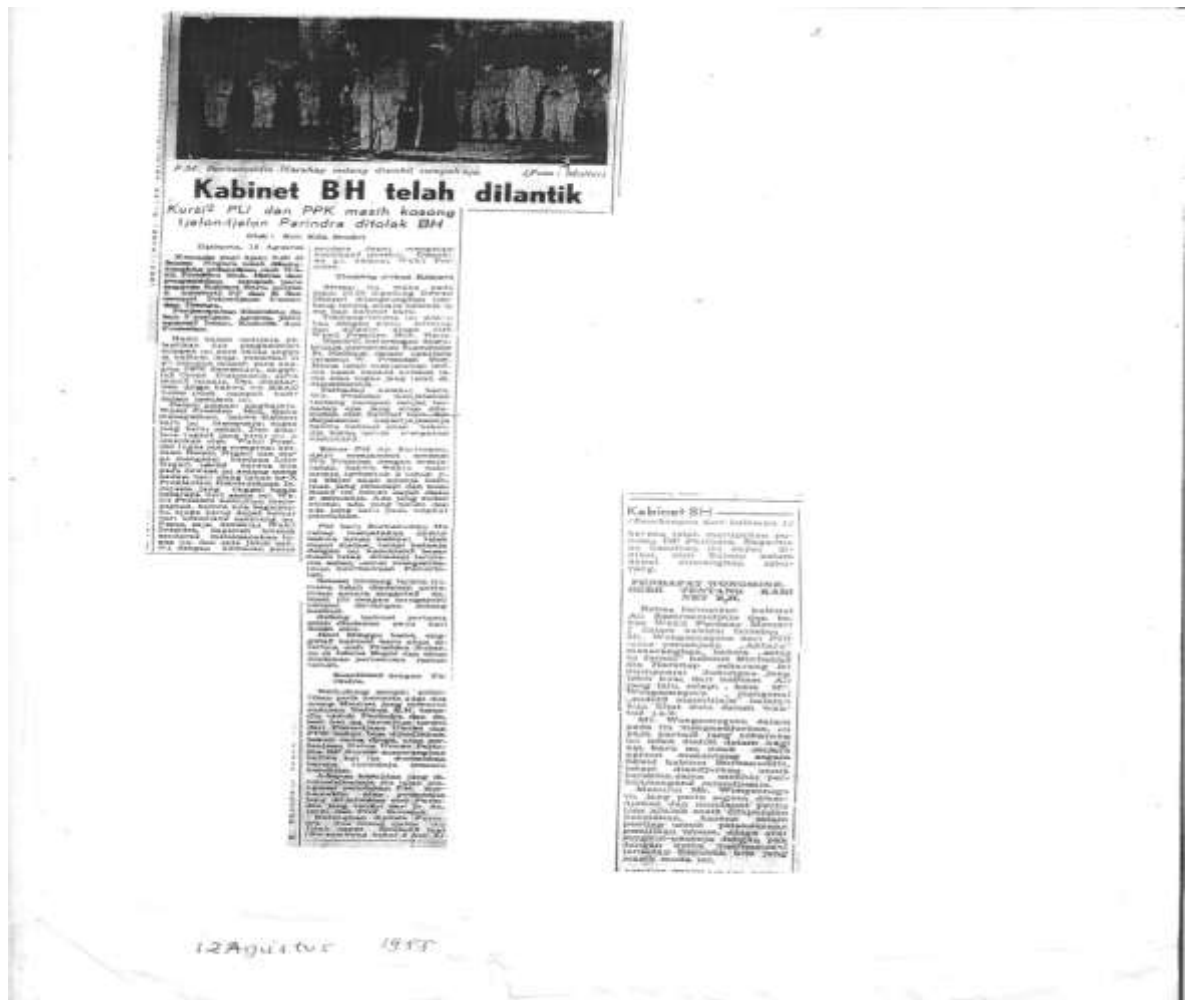
Djakarta, 13 Februari 1956.

PERDANA MENTERI/MENTERI LUAR NEGERI a.i.,

t.t.d.

Mr. BOERHANORDIN HARAHAP.

Lampiran.4 Berita Pelantikan Kabinet Burhanuddin Harahap



Sumber: Merdeka, 12 Agustus 1955

Lampiran.5 Berita Susunan Kabinet Burhanuddin Harahap



Sumber: Merdeka, 13 Agustus 1955.